

BULETIN **Arabes**

Media Informasi Pelestari Cagar Budaya

Volume 3, Nomor 2, Desember 2019



BALAI PELESTARIAN CAGAR BUDAYA ACEH
Wilayah Kerja Provinsi Aceh dan Sumatera Utara

Journal of Diabetes Research

BULLETIN

Volume 2, Number 2, December 2019 ISSN 2581-2955

BULETIN **Arabes**

Media Informasi Pelestari Cagar Budaya

Volume 3, Nomor 2, Desember 2019

Foto Cover :



Foto Cover : GEDUNG AVROS di Kesawan, Medan. Oleh Hengki Suwandi



Ornamen di Makam Sultanah Nahrisyah di Kabupaten Aceh Utara,
yang telah digambar ulang

BALAI PELESTARIAN CAGAR BUDAYA ACEH
Wilayah Kerja Provinsi Aceh dan Sumatera Utara

Volume 3, Nomor 2, Desember 2019

Pelindung
Direktur Jenderal Kebudayaan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Penanggungjawab
Bambang Sakti Wiku Atmojo, S.S
Kepala Balai Pelestarian Cagar Budaya Aceh

Dewan Redaksi
Toto Harryanto, M.Hum
Dwi Fajariyatno, M.A
Lucki Armanda, S.S

Redaksi Pelaksana
Rizal Dhani, S.S
Cut Putra Sunjaya, S.S

Desain Grafis dan Tata Letak
Muhammad Fauzarrahman

Diterbitkan oleh
Balai Pelestarian Cagar Budaya Aceh
Jl. Banda Aceh-Meulaboh Km. 7,5 Kec. Peukan Bada,
Kab. Aceh Besar 23351
Telp. +62651-45306 / Fax. +62651-45171
e-mail. bp3.aceh@gmail.com /
bp3_aceh@yahoo.com

BULETIN arabes

Media Informasi Pelestari Cagar Budaya

Volume 3, Nomor 2, Desember 2019

Arabes bermakna bentuk ornamen yang terdiri dari dekorasi permukaan. Ornamen semacam ini sering digabungkan dengan elemen lain. Biasanya terdiri dari pola tunggal yang bisa disusun berpetak atau disusun berulang-ulang. Dari sekian banyak seni ornamen Eurasia menyebabkan istilah *arabesque* digunakan sebagai istilah teknis oleh para sejarawan seni untuk menggambarkan unsur-unsur dalam ornamen yang ditemukan dalam dua fase, yaitu seni ornamen Islam yang lahir sejak abad ke-9, dan seni ornamen Eropa yang lahir sejak Zaman *Renaissance*. Menurut M. Khalafallah Ahmed, dalam bukunya yang berjudul “*Sumbangan Islam Kepada Ilmu dan Kebudayaan (1986)*”, desain *Arabesque* dibuat melalui suatu kombinasi pola-pola geometris dengan pola-pola dedaunan. Dengan demikian variasi bentuk telah diciptakan, yang terdiri dari berbagai macam bentuk dan konfigurasi geometris, seperti lingkaran, cincin, kurva, segitiga, segi banyak, saling di jalin atau di gabungkan. Selain itu banyak unsur-unsur pokok dalam seni *Arabesque* dedaunan adalah tangkai, daun, bunga dan buah yang penggambarannya diatur dalam bentuk-bentuk geometris.

Arabes adalah buletin yang memuat hasil-hasil kegiatan pelestarian maupun konsep pelestarian cagar budaya yang ada di wilayah kerja Balai Pelestarian Cagar Budaya Aceh. Penamaan **Arabes** diambil dari kata *Arabesque* yang telah diserap kedalam Bahasa Indonesia sesuai dengan buku “Daftar Istilah Arsitektur” terbitan Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (1978). Redaksi juga menerima artikel hasil pelestarian cagar budaya di Indonesia pada umumnya. **Buletin Arabes** diterbitkan secara berkala dua kali setiap Juni dan Desember dalam satu tahun. Siapa pun dapat mengutip sebagian isi dari buletin ini dengan ketentuan menuliskan sumbernya.



Sambutan Kepala BPCB ACEH

**Assalamualaikum
Warahmatullahi
Wabarakatuh**

Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan Rahmat, Inayah, Taufik dan Hidayahnya sehingga pada tahun 2019 ini, Balai Pelestarian Cagar Budaya Aceh dapat menerbitkan Buletin Arabes Volume 3, Nomor 2. Buletin ini berisi mengenai informasi seputar pelestarian cagar budaya di Indonesia.

Penerbitan Buletin Arabes bertujuan untuk meningkatkan kepedulian para siswa dan masyarakat pada umumnya tentang pelestarian cagar budaya. Disamping itu juga sebagai media informasi tentang pelestarian cagar budaya yang telah dilakukan oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya Aceh, instansi terkait serta masyarakat penggiat cagar budaya di wilayah Aceh dan Sumatera Utara. Semoga buletin ini dapat dipergunakan sebagai salah satu acuan, petunjuk maupun pedoman bagi pembaca dalam bidang pelestarian cagar budaya.

Balai Pelestarian Cagar Budaya Aceh adalah sebuah Unit Pelaksana Tugas dari sebagian tugas pokok dan fungsi Direktorat Jenderal Kebudayaan yang berada di Aceh dengan wilayah kerja Provinsi Aceh dan Sumatera Utara dan bertanggungjawab kepada Direktur Jenderal Kebudayaan. Tugas dari Balai Pelestarian Cagar Budaya Aceh adalah melakukan pelestarian cagar budaya, yaitu melindungi, mengembangkan dan memanfaatkan cagar budaya dalam bidang pendidikan, agama, sosial dan budaya. Upaya publikasi informasi karya tulis dalam bentuk media cetak merupakan salah satu pemanfaatan cagar budaya di bidang pendidikan.

Kami menyadari penerbitan Buletin Arabes ini tentu masih banyak kekurangan, oleh karena itu kepada semua pihak kiranya berkenan untuk memberikan sumbang saran, usul, dan kritik agar penerbitan selanjutnya lebih baik.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Aceh Besar, Desember 2019
Kepala BPCB Aceh,

Bambang Sakti Wiku Atmojo
NIP. 19681001 199601 1 001

Daftar ISI

Peran Masyarakat Dalam Melestarikan Bangunan Cagar Budaya di Kawasan Kesawan Medan 1992-2015

Oleh: Akhmad Supandi

1

Gambaran Umum temuan Arkeologis era Kerajaan Aceh Darussalam di Gampong Rima Jeuneu, Kecamatan Peukan Bada, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh

Oleh: Ambo Asse Ajis

21

50 kiri 21 kanan Pemanfaatan dan Analisis Nilai Penting Terhadap Masjid Teungku Di Anjong Peulanggahan, Kota Banda Aceh

Oleh: Arisnawati

51

LHOKNGA 1945-1949: MODAL PERJUANGAN DARI UJUNG BARAT SUMATERA

Oleh: Dede Semiawan

64

PELINDUNGAN SITUS BENTENG PUTRI HIJAU MELALUI PENGEMBANGAN STRATEGI KOMUNIKASI LINGKUNGAN

Oleh: Defri Elias Simatupang

84

Sejarah Teuku Po Miruk Abdul Wahid Pada Masa Pemerintahan Sultan Alaidin Mansyursyah di Pulau Weh/Sabang

Oleh: Masnauli Butarbutar

109

Peran Masyarakat Dalam Melestarikan Bangunan Cagar Budaya di Kawasan Kesawan Medan 1992-2015

Oleh: Akhmad Supandi
Akhmadsupandi70@gmail.com

ABSTRACT

Medan City is one of the cities that have many buildings from the Dutch colonial era. One of the areas in Medan that has many of these buildings is the Kesawan area. The historical heritage buildings in the Kesawan area were formerly government and private offices, bank offices, shop houses for ethnic Chinese traders and also public facilities built by the Dutch colonials to support the plantation industry in the Medan City. In the Law of the Republic of Indonesia Number 11 Year 2010 Regarding Cultural Heritage it is explained that the community must play an active role in maintaining or preserving cultural heritage buildings. This is the author's reference in conducting research, which is to find out how the role of the community in maintaining and preserving cultural heritage buildings contained in the city of Medan, especially the Kesawan area. Because at this time the role of the community in preserving cultural heritage buildings is still not optimal, there are even some buildings that have begun to experience damage to their form and function.

Keywords: Society, Preservation, Building, Cultural Heritage, Medan City.

ABSTRAK

Kota Medan adalah salah satu kota yang banyak memiliki bangunan-bangunan peninggalan masa kolonial Belanda. Salah satu daerah di Kota Medan yang banyak memiliki peninggalan-peninggalan bangunan tersebut adalah daerah Kesawan. Bangunan-bangunan peninggalan sejarah yang terdapat di daerah Kesawan tersebut dahulunya adalah berupa kantor-kantor pemerintahan maupun swasta, kantor-kantor bank, rumah toko bagi para pedagang etnis Cina dan juga fasilitas-fasilitas umum yang dibangun oleh kolonial Belanda sebagai penunjang industri perkebunan di Kota Medan. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya dijelaskan bahwa masyarakat harus berperan aktif dalam menjaga maupun melestarikan bangunan cagar budaya. Hal tersebut yang menjadi acuan penulis dalam melakukan penelitian, yaitu ingin mengetahui bagaimana peran masyarakat dalam menjaga maupun melestarikan bangunan cagar budaya yang terdapat di kota Medan, khususnya kawasan Kesawan. Karena saat ini peran masyarakat dalam melestarikan bangunan cagar budaya masih belum maksimal, bahkan terdapat beberapa bangunan yang sudah mulai mengalami kerusakan pada bentuk dan juga fungsinya.

Kata kunci: Masyarakat, Pelestarian, Bangunan, Cagar Budaya, Kota Medan.

Dilihat dari literatur sejarah, Kota Medan banyak memiliki peninggalan-peninggalan sejarah. Salah satu peninggalan sejarah tersebut berupa bangunan-bangunan yang telah ada sejak masa kolonial Belanda. Salah satu daerah di Kota Medan yang banyak memiliki bangunan bersejarah peninggalan kolonial Belanda adalah daerah Kesawan. Secara administratif, daerah Kesawan ini terletak di Kelurahan Kesawan, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan. Nama Kesawan berasal dari kata “kesawahan”, pergi ke sawah, “*de naam spreekt van een landelijk verleden*”¹. Pada masa kolonial Belanda, Kesawan berkembang pesat setelah dipindahkannya kantor pusat perkebunan dari Labuhan (Deli) ke Kampung Medan Putri karena wilayahnya yang lebih strategis untuk dijadikan pusat perkebunan. Oleh karena pusat perkebunan berada disini, maka ramailah orang-orang berdatangan dan berdiam di Medan. Seiring bertambahnya waktu dan berkembangnya perkebunan tersebut, maka pada kampung Kesawan ini banyak dilakukan pembangunan berupa kantor-kantor pemerintah maupun swasta sebagai penunjang industri perkebunan pada saat itu.

Dewasa ini, daerah Kesawan telah banyak mengalami perubahan, terutama dari segi fisik bangunan tersebut. Padahal kita mengetahui bahwa bangunan-bangunan seperti kantor milik pemerintah maupun swasta, rumah toko, pasar dan juga tempat beribadah lainnya adalah suatu peninggalan sejarah yang telah ada sejak masa kolonial Belanda. Perubahan yang terjadi dapat terlihat dari tidak terawatnya bangunan-bangunan tersebut, atau bahkan sengaja dibiarkan hancur, serta tidak tepatnya pemanfaatan dari bangunan-bangunan peninggalan sejarah tersebut. Padahal, kita telah mengetahui bahwasanya bangunan-bangunan bersejarah di kawasan Kesawan adalah suatu peninggalan yang harus dijaga dan dilestarikan keberadaannya sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya, menyebutkan bahwa Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan². Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya tersebut, sangatlah pantas bangunan yang terdapat di daerah Kesawan ini menjadi sebuah Bangunan Cagar Budaya³ dan juga sebagai sebuah Kawasan Cagar Budaya karena daerah Kesawan memiliki dua Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas⁴.

¹Tengku Luckman Sinar Basarshah, *Medan Tempo Doeloe*, Medan: Lembaga Penelitian dan Pengembangan Seni Melayu, 1991, hal 54

²Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya*, Jakarta: Republik Indonesia, 2010, Bab I hal 2.

³*Ibid.* hal 3

⁴*Ibid.*

Maka dari itu kita sebagai masyarakat diharapkan agar dapat berperan lebih aktif dalam melakukan pelestarian Cagar Budaya sesuai dengan konsep pelestariannya⁵. Bagi daerah perkotaan, pelestarian sejarah dapat diperhatikan dari dua kondisi. Kondisi pertama adalah lokasi atau bangunan bersejarah, dan kondisi kedua adalah kawasan bersejarah yang mengandung sekumpulan bangunan indah, baik suatu kawasan yang diperindah dengan tanaman maupun benda lainnya, dan mempunyai arti sejarah suatu tempat di mana peristiwa bersejarah pernah terjadi⁶.

Metode

Dalam penelitian, penulis memakai metode penelitian yaitu metode sejarah. Pemakaian metode sejarah ini agar penulisan dari sebuah peristiwa bersejarah dapat dituangkan kedalam bentuk historiografi. Metode sejarah yang dimaksudkan untuk menceritakan kejadian masa lampau guna mendapatkan sebuah karya yang mempunyai nilai. Metode sejarah adalah proses menguji dan menganalisa secara kritis rekaman peninggalan masa lampau⁷. Tahap-tahap yang dilakukan dalam penelitian sejarah antara lain:

- **Heuristik** merupakan tahap awal yang dilakukan penulis untuk mencari sumber yang relevan dengan penelitian yang dilakukan. Dalam tahap heuristik, sumber dapat diperoleh melalui dua cara, yaitu studi kepustakaan (*library research*) dan studi lapangan (*field research*).
- **Kritik Sumber** merupakan proses yang dilakukan peneliti untuk mencari nilai kebenaran dari sebuah sumber, sehingga dapat menjadi sebuah penelitian yang obyektif. Dalam tahap ini sumber-sumber yang telah terkumpul dilakukan kritik, baik itu kritik internal maupun kritik eksternal. Kritik internal merupakan kritik yang dilakukan untuk mencari kesesuaian data dengan permasalahan yang diteliti, adapun kritik eksternal merupakan kritik yang mencari kebenaran sumber pustaka yang diambil oleh peneliti maupun fakta yang diperoleh dari wawancara yang dilakukan dengan informan.
- **Interpretasi** yaitu tahap peneliti berusaha untuk menuangkan berbagai ide pemikirannya yang diperoleh melalui sumber primer ataupun sekunder dalam penelitian, sehingga diharapkan sumber tersebut menjadi data yang obyektif.
- **Historiografi** yaitu tahap akhir dalam metode sejarah. Dalam tahap ini peneliti menuliskan hasil penelitian menjadi sebuah karya tulisan secara kronologis dan sistematis.

⁵*Ibid.* hal 5.

⁶Yuanita F.D. Sidabutar, Jurnal: Pemanfaatan Keberadaan Bangunan Bersejarah Dalam Mendukung Aktivitas Pengembangan Wilayah Di Kota Medan (Studi Kasus: Kawasan Kesawan Dan Lapangan Merdeka), Medan: Wahana Hijau Jurnal Perencanaan & Pengembangan Wilayah, Vol.3, No.1, 2007, hal 9.

⁷Louis Gottschalk, 1985, *Mengerti Sejarah*, terjemahan Nugroho Notosusanto, Jakarta: UI Press, hal 103

1. Letak Geografis Kawasan Kesawan

Kawasan Kesawan adalah sebuah daerah yang memiliki bangunan-bangunan bersejarah peninggalan kolonial Belanda. Secara administrasi kawasan Kesawan ini terletak pada Kelurahan Kesawan Kecamatan Medan Barat Kota Medan. Kelurahan Kesawan ini memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Kelurahan Silalas
- Sebelah Selatan : Kelurahan Aur
- Sebelah Barat : Aliran Sungai Belawan
- Sebelah Timur : Kelurahan P. Tengah/ Silalas

Adapun batas-batas kawasan Kesawan yang menjadi objek penelitian saat ini antara lain meliputi:

- Sebelah Utara dibatasi oleh Jln. Pulau Pinang - Jln. Jend. A. Yani VII.
- Sebelah Selatan dibatasi oleh Jln. Palang Merah.
- Sebelah Timur dibatasi oleh Jln. Kereta Api.
- Sebelah Barat dibatasi oleh Jln Hindu- Jln. Mesjid.

2. Sejarah Singkat Kawasan Kesawan

Kawasan Kesawan adalah suatu kawasan di Kota Medan yang terkenal sebagai salah satu kawasan “kota tua”. Pada kawasan Kesawan ini terdapat beberapa toko-toko, dan juga gedung perkantoran yang bangunannya sudah ada sejak masa kolonial Belanda, sekitar awal abad ke-20. Pada tahun 1869, Jacobus Nienhyus memindahkan kantor pusat perkebunannya ke Kampung Medan Putri, tepatnya pada pertemuan sungai Deli dan Babura yang sebelumnya pusat kantor perkebunan tersebut berada di daerah Labuhan Deli. Seiring bertambahnya waktu, usaha perkebunan milik Belanda menjadi maju dan berkembang, maka Kampung Medan dibuka dan diperluas.

Menyadari potensi ekonomi yang bakal diperoleh di wilayah Sumatera Timur, maka pada tahun 1880 pemerintah kolonial Belanda di Medan mengumumkan bahwa Sumatera Timur dinyatakan sebagai daerah terbuka untuk penanaman modal asing⁸. Dengan adanya perkembangan tersebut, maka pada tanggal 1 Maret 1887 Ibukota Residensi Sumatera Timur dipindahkan dari Bengkalis ke Medan. Pada saat menjadi ibukota karesidenan, Medan awalnya meliputi empat kampung, yaitu: Kampung Petisah Hulu, Kampung Petisah Hilir, Kampung Kesawan, dan Kampung Sungai Rengas. Selanjutnya Kampung Petisah Hulu dan Kampung Petisah Hilir dijadikan satu kampung, sehingga menjadi tiga kampung saja⁹.

Pada masa kolonial Belanda, Kampung Kesawan menjadi salah satu daerah ataupun kawasan perdagangan¹⁰. Sebagai kawasan perdagangan, banyaklah para pedagang dan pengusaha yang membangun rumah toko dan kantor-kantor perusahaannya di wilayah ini. Para pedagang yang banyak menempati wilayah Kesawan ini adalah para pedagang asal Cina. Hal tersebut karena di izinkannya para pedagang Etnis Cina oleh pihak kolonial Belanda. Konsep kompleks pertokoan di daerah Kesawan ini memiliki ciri-ciri yang bangunannya adalah bangunan yang bertingkat, berdempetan serta tidak memiliki sebuah halaman. Pada tahun 1889 terjadi kebakaran dan menghancurkan beberapa bangunan yang terdapat di kawasan Kesawan¹¹. Sekitar 67 bangunan rumah dan toko yang terbuat dari kayu habis terbakar dalam kejadian tersebut. Setelah kebakaran tersebut, mulailah dibangun kembali kawasan Kesawan dengan konsep rumah toko yang permanen yang kebanyakan dibangun dengan memakai bahan baku semen dan batu bata¹².

Setelah dilakukannya pembangunan kembali, kawasan Kesawan menjadi sebuah kawasan inti kota, yang pada saat itu menjadi pedoman untuk pengembangan kota Medan, yang dilakukan oleh pemerintah kolonial Belanda. Hal ini dapat dilihat dari perkembangan Kesawan yang terdiri dari beberapa bangunan-bangunan berupa kantor pemerintah dan swasta (bank), toko, rumah, dan bangunan umum seperti tempat ibadah (Mesjid Lama Gang Bengkok) dan pasar (Pajak Ikan Lama). Pembangunan tersebut dilakukan sebagai penunjang perkembangan industri perkebunan di Tanah Deli, yang pada masa itu lagi berkembang pesat.

⁸Repelita Wahyu Oetomo dkk., *Bangunan Bersejarah di Kota Medan*, Medan: Museum Negeri Sumatera Utara, 2011, hlm 11.

⁹*Ibid.*, hal 13.

¹⁰*Ibid.*, hal 15.

¹¹Julaihi Wahid, *Kajian Urbanisasi dan Morfologi Bandar: Khusus Kepada Bandar-Bandar IMT-GT*, Malaysia: Pusat Pengajian Perumahan, Bangunan dan Perancangan Universiti Sains Malaysia, TT, hlm 27.

¹²*Ibid.*

Saat ini kawasan Kesawan sebagai kawasan bersejarah/kota tua memiliki lahan seluas 31, 40 ha dan terdapat lebih kurang 834 unit bangunan. Sekitar 817 unit bangunan dimiliki oleh perseorangan ataupun swasta, dan 17 unit bangunan dimiliki oleh pemerintah¹³. Saat ini bangunan-bangunan yang terdapat di kawasan Kesawan dapat dibedakan menjadi bangunan lama/bersejarah, bangunan modifikasi (antara lama dan baru/mengalami perubahan), dan bangunan baru. Terdapat sekitar 166 unit bangunan lama/bersejarah (45 unit bangunan tunggal, dua sampai empat lantai dan 121 unit bangunan rumah toko dua sampai tiga lantai). Terdapat 94 bangunan modifikasi (antara lama dan baru/mengalami perubahan), serta 538 bangunan baru terdiri dari rumah toko tiga sampai lima lantai¹⁴.

3. Potensi Kawasan Kesawan

Potensi Sejarah

Kota Medan memiliki sejarah yang panjang, banyak peristiwa yang telah terjadi di kota Medan. Dalam sejarah ada keberhasilan dan ada juga kegagalan. Maka dalam melakukan proses pembelajaran sejarah sebaiknya kita mempelajari seutuhnya, dengan catatan agar kita dapat terhindar dari kegagalan yang serupa di masa akan datang. Sebagaimana yang kita ketahui, kota Medan mempunyai karakteristik sebagai kota industri pada masa kolonial Belanda dan bertahan menjadi kota industri sampai saat ini.

Salah satu daerah yang memiliki sejarah panjang dan memiliki banyak peninggalan-peninggalan berupa bangunan cagar budaya di kota Medan adalah daerah Kesawan. Daerah Kesawan ini adalah suatu daerah yang menjadi prioritas dalam pembangunan pada masa kolonial Belanda. Hal tersebut dikarenakan daerah Kesawan memegang peranan yang sangat penting dalam hal perdagangan, mengingat daerah Kesawan ini merupakan pusat perdagangan Kota Medan pada masa kolonial Belanda. Bahkan transaksi perdagangan yang terjadi di kawasan Kesawan ini selain untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, juga memenuhi kebutuhan luar negeri, melalui transaksi ekspor dan impor.

Mengingat hal tersebut sangatlah pantas kita sebagai masyarakat harus mengetahui potensi sejarah dari kawasan Kesawan ini sebagai suatu peninggalan sejarah yang harus dijaga dan dilestarikan keberadaannya. Kawasan Kesawan dahulu dan sekarang pada dasarnya tidak banyak yang berubah secara fungsi, masih tetap merupakan kawasan perdagangan/pertokoan sampai saat ini. Namun yang terjadi pada kawasan Kesawan saat ini adalah bentuk dari bangunan-bangunan peninggalan masa kolonial Belanda tersebut yang mengalami perubahan. Bangunan-bangunan peninggalan masa kolonial Belanda ini secara perlahan tapi pasti mulai runtuh ataupun diruntuhkan bangunannya untuk diganti dengan bangunan baru yang diaanggap lebih modern sesuai perkembangan zaman saat ini.

¹³J. P. Marthin Sibarani, Tesis: "Pengendalian Kawasan Pelestarian Kota Lama di Kawasan Kesawan Medan", Bandung: ITB, 2002, hlm 111.

¹⁴*Ibid.*

Hal tersebut terjadi dikarenakan kita sebagai masyarakat tidak mengetahui atau memang tidak memperdulikan pentingnya menjaga dan melestarikan sebuah peninggalan sejarah. Namun, jika kita mengetahui betapa pentingnya nilai dari benda peninggalan sejarah tersebut, baik dari segi seninya, arsitekturnya, tekniknya, ekonominya, dan lain sebagainya, maka kita baru sadar akan penting dan berartinya sebuah peninggalan sejarah itu sebagai sumber pelajaran kita dan keturunan kita untuk saat ini dan untuk masa depan.

Jika suatu peninggalan sejarah tidak cukup bernilai, maka suatu peninggalan sejarah tersebut bisa terangkat nilainya dari sisi lain yang mendukung suatu peradaban manusia. Maka hal yang terpenting disini adalah apakah suatu peninggalan sejarah itu benar-benar penting bagi perkembangan kebudayaan dan peradaban manusia kedepannya. Bagaimanapun tingginya suatu nilai peninggalan sejarah, jika tidak dapat dijadikan sebagai pembelajaran maka nilai-nilai tersebut tetap tidak berarti apa-apa.

Sejarah membutuhkan bukti, bukan hanya sekedar narasi. Bukti-bukti peninggalan sejarah dari sisa-sisa industri perkebunan kolonial Belanda yang masih ada dan bisa kita lihat sampai saat ini adalah berupa bangunan-bangunan, yang peninggalannya banyak terdapat di daerah Kesawan. Keberadaan bangunan-bangunan peninggalan sejarah di kawasan Kesawan tersebut merupakan data sejarah yang sangat penting untuk mengenal dan mengetahui kembali bagaimana keadaan kota Medan pada masa lampau. Bahkan data tersebut dapat memberikan suatu identitas ataupun ciri khas kepada kota Medan yang dapat membedakan dengan kota-kota lainnya.

Potensi Parawisata

Istilah pariwisata berasal dari bahasa Sansekerta yang terdiri dari beberapa kata antara lain: *Pari* berarti penuh, lengkap, keliling, sementara *Wis* (man) berarti rumah, property, kampung, komunitas, sedangkan *Ata* berarti pergi terus-menerus, mengembara (*roaming about*) yang bila dirangkai menjadi satu kata melahirkan istilah pariwisata, berarti: pergi secara lengkap meninggalkan rumah (kampung) berkeliling terus menerus¹⁵. Pada awalnya hakikat paling utama yang melahirkan pariwisata adalah perasaan manusia yang terdalam, yang serba ingin mengetahui segala sesuatu selama hidup di dunia.

Dalam pengelompokan jenis pariwisata, wisata sejarah masuk dalam jenis wisata budaya. Seringnya perjalanan serupa ini disatukan dengan kesempatan-kesempatan mengambil bagian dalam kegiatan-kegiatan, seperti eksposisi seni (seni tari, seni drama, seni musik dan seni suara). Atau kegiatan yang bermotif kesejarahan dan sebagainya¹⁶.

¹⁵Nyoman S. Pendit, Ilmu Pariwisata Sebuah Pengantar Perdana, Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2003, hal 1.

¹⁶*Ibid.*, hal 38.

Wisata sejarah pada saat ini banyak diminati oleh para wisatawan, selain dapat pemahaman sejarah, juga dapat memberikan nuansa bagaimana kehidupan masa lampau kepada wisatawan yang tidak didapat pada masa sekarang ini. Kemampuan mengembangkan wisata sejarah adalah nilai yang penting dalam pariwisata. Karena pariwisata telah menjadi industri yang mampu mendatangkan devisa negara dan penerimaan asli daerah yang berimplikasi pada kesejahteraan masyarakat dalam berbagai sektor ekonomi.

Suatu cagar budaya juga dapat dimanfaatkan untuk kepentingan agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan dan pariwisata. Kawasan Kesawan adalah salah satu daerah yang dapat dijadikan sebagai suatu objek wisata. Hal ini mengingat kawasan Kesawan banyak memiliki sisa-sisa peninggalan sejarah berupa bangunan-bangunan cagar budaya. Dalam melakukan perjalanan wisata sejarah, pihak-pihak yang terkait harus bisa seoptimal mungkin dalam mengelola objek wisata kawasan Kesawan nantinya, baik itu masyarakat setempat maupun pemerintah kota Medan. Seperti halnya masyarakat yang sangat diharapkan untuk bersifat ramah tamah kepada setiap wisatawan yang berkunjung ke kawasan Kesawan.

Sebab, faktor keramah tamahan masyarakat sangat berpengaruh terhadap kemajuan suatu objek wisata. Selain itu, Pemerintah Kota Medan juga perlu mempertimbangkan mengenai ketersediaannya penginapan, fasilitas umum yang memadai, serta jasa transportasi yang aman dan nyaman bagi para wisatawan ketika melakukan perjalanan pariwisata ke kawasan Kesawan nantinya. Kemudian pemerintah juga harus melakukan publisitas dan promosi kepariwisataan kawasan Kesawan kepada masyarakat.

Ada dua promosi wisata yang harus dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat kepada para calon wisatawan. Pertama yaitu melakukan promosi kepada calon wisatawan dalam negeri, hal ini bertujuan menggugah pandangan masyarakat agar mempunyai kesadaran akan kegunaan pariwisata bagi masyarakat, dan juga memperoleh dukungan dari masyarakat. Kedua, yaitu promosi pariwisata kepada para calon wisatawan mancanegara, promosi yang dilakukan hendaknya mengedepankan atraksi-atraksi ataupun objek wisata yang unik dan menakjubkan, serta mengedepankan promosi yang tidak dimiliki oleh negara para calon wisatawan tersebut.

Ada dua promosi wisata yang harus dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat kepada para calon wisatawan. Pertama yaitu melakukan promosi kepada calon wisatawan dalam negeri, hal ini bertujuan menggugah pandangan masyarakat agar mempunyai kesadaran akan kegunaan pariwisata bagi masyarakat, dan juga memperoleh dukungan dari masyarakat. Kedua, yaitu promosi pariwisata kepada para calon wisatawan mancanegara, promosi yang dilakukan hendaknya mengedepankan atraksi-atraksi ataupun objek wisata yang unik dan menakjubkan, serta mengedepankan promosi yang tidak dimiliki oleh negara para calon wisatawan tersebut.

Setelah itu, kemudian pihak-pihak yang terkait dalam pariwisata kawasan Kesawan harus bisa memberikan penjelasan sejarah dari tiap-tiap tempat yang menjadi destinasi wisata yang dikunjungi oleh para wisatawan. Seperti sejarah berdirinya tempat tersebut, siapa pemilik dari tempat tersebut, serta fungsi dari bangunan tersebut pada masa kolonia Belanda. Dalam memberikan informasi, pihak-pihak terkait dapat melakukannya dengan cara penyampaian langsung yang dilakukan oleh para pemandu wisata (*tour guide*) yang disediakan oleh pemerintah maupun pihak-pihak pengelola tempat wisata tersebut. Serta dapat juga memberikan sebuah katalog kepada setiap para pengunjung. Katalog tersebut berisi tentang berdirinya tempat tersebut, siapa pemilik dari tempat tersebut, serta apa fungsi dari bangunan tersebut pada masa kolonia Belanda, dan juga berisi gambar-gambar bangunan tersebut, baik pada masa kolonial Belanda maupun kondisi terkini dari bangunan tersebut.

4. Peran Masyarakat Dalam Melestarikan Bangunan Cagar Budaya Di Kawasan Kesawan

Seperti yang telah disebutkan pada bab-bab sebelumnya, bahwa kawasan Kesawan memiliki beberapa bangunan yang sudah ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya dan ada juga beberapa bangunan yang telah dilindungi oleh peraturan pemerintah Kota Medan maupun pemerintah pusat. Dalam bab ini penulis melakukan wawancara untuk mengetahui bagaimana peran masyarakat dalam melakukan pelestarian bangunan cagar budaya di kawasan Kesawan yang sudah ditetapkan dan dilindungi oleh pemerintah Kota Medan maupun pemerintah pusat.

Masyarakat yang dimaksudkan dalam penelitian ini antara lain, orang-orang yang memiliki dan juga mengelola bangunan cagar budaya tersebut, seperti pengelola Restoran Tip Top, *Tjong A Fie Mansion*, Mesjid Lama Gang Bengkok, dan ada juga orang yang hanya mendiami bangunan tersebut, seperti halnya di bangunan Gedung Eks Tenaga Kerja. Selain itu ada juga pihak akademisi dan juga organisasi-organisasi ataupun komunitas-komunitas pecinta sejarah seperti Badan Warisan Sumatera (BWS), yang berada di Kota Medan. Hampir semua dari pemilik, ataupun pengelola bangunan cagar budaya yang menjadi narasumber pernah mendengar dan bahkan mengetahui bahwasanya bangunan yang mereka kelola atau tempati telah ditetapkan oleh peraturan pemerintah Kota Medan maupun pemerintah pusat sebagai suatu bangunan cagar budaya yang harus dilindungi dan dilestarikan.

Menurut Kus, salah satu pengelola/manejer Restoran Tip Top, ia mengetahui bangunan yang ia kelola termasuk dalam salah satu dari beberapa bangunan cagar budaya yang terdapat di Kota Medan. Bahkan Kus juga mengatakan tentang pernah adanya suatu tetenger tepat berada di depan bangunan tersebut¹⁷.

¹⁷Wawancara, dengan Kus, Medan pada tanggal 10 Februari 2019

Hal sama juga disampaikan oleh Rudiansyah. Sebagai salah satu wakil pengelola / humas dari *Tjong A Fie Mansion*, ia mengatakan bahwa mereka selaku pihak yang mengelola *Tjong A Fie Mansion* ini mengetahui jika bangunan yang mereka kelola termasuk kedalam bangunan cagar budaya nasional yang terdapat di Kota Medan, yang tentunya harus dilindungi dan juga dilestarikan keberadaannya¹⁸.

Dalam melakukan perannya untuk menjaga maupun melestarikan bangunan cagar budaya tersebut, langkah-langkah yang diambil oleh para pemilik ataupun pengelola bangunan cagar budaya tersebut bermacam-macam. Ada yang tetap mempertahankan dari segi bentuk dan fungsi dari bangunan tersebut, bahkan ada juga yang melakukan perawatan intensif pada bangunan tersebut, seperti melakukan pengecatan ulang pada dinding-dinding bangunan yang sudah mulai terkelupas dan juga mengganti atap-atap yang sudah mulai mengalami kebocoran.

Seperti penuturan oleh Kus sebagai salah satu Manajer di Restoran Tip Top, langkah-langkah yang mereka ambil adalah tetap mempertahankan bentuk dan fungsi bangunan seperti pada awalnya, yaitu sebuah restoran. Selain itu, pihak pengelola juga melakukan pengecatan kembali dinding-dinding bangunan yang sudah mulai keropos dan berganti warna¹⁹.

Hal tersebut dilakukan agar material bangunan yang sudah mulai rusak tersebut tidak semakin parah, karena bertambahnya kerusakan pada bangunan tersebut²⁰. Menurut Rudiansyah, bahwa bangunan *Tjong A Fie Mansion* ini tidak ada mengalami perubahan bentuk yang cukup berarti, karena bentuk dan fungsi bangunan ini tetap sama seperti sebelumnya. Adapun hal yang berubah pada bangunan ini yaitu pada fungsinya, yang sebelumnya bangunan ini adalah rumah kediaman dari *Tjong A Fie*, namun sekarang bangunan ini telah menjadi museum dan telah dibuka untuk umum sejak tahun 2009²¹.

Dalam melakukan perawatan dan pemeliharaan bangunan cagar budaya tersebut, para pemilik ataupun pihak pengelola bangunan tersebut memakai dana pribadinya ataupun dana yang didapatkan dan dikelola dari para pengunjung bangunan tersebut²². Namun berbeda halnya dengan bangunan Mesjid Lama Gang Bengkok. Menurut Mukhlis, salah satu pengurus mesjid, mereka mendapatkan dana untuk melakukan perbaikan dan perawatan bangunan mesjid ini dari bantuan para jamaah mesjid, serta masyarakat sekitar wilayah mesjid dan juga bantuan dari pemerintah Kota Medan²³.

Tetapi tidak semua bangunan di kawasan Kesawan ini terawat dengan baik. Ada juga dari pengelola ataupun masyarakat yang mendiami bangunan cagar budaya tersebut yang tidak melakukan perawatan dan pemeliharaan terhadap bangunan.

¹⁸Wawancara, dengan Rudiansyah, Medan pada tanggal 4 Februari 2019.

¹⁹Wawancara, dengan Kus, Medan, pada tanggal 10 Februari 2019.

²⁰Wawancara, dengan Mukhlis Tanjung, Medan, pada tanggal 12 Februari 2019.

²¹Wawancara, dengan Rudiansyah, Medan, pada tanggal 4 Februari 2019.

²²Wawancara, dengan Kus, Medan, pada tanggal 10 Februari 2019.

²³Wawancara, dengan Mukhlis Tanjung, Medan, pada tanggal 12 Februari 2019.

Dikarenakan tidak adanya dana milik pribadi dari para pengelola maupun dana bantuan dari pemerintah Kota Medan untuk melakukan perawatan dan perbaikan pada bangunan tersebut, sehingga saat ini bangunan tersebut mengalami perubahan bentuk dan fungsinya, tidak sesuai dengan bentuk dan fungsi aslinya lagi. Perubahan bentuk dan fungsi dari bangunan tersebut berawal dari kerusakan oleh alam, seperti pada dinding bangunan yang sudah mulai berlumut, bahkan ada juga bagian-bagian material dari bangunan tersebut yang diambil oleh orang yang tidak dikenal, karena bahan-bahan material dari bangunan tersebut langka dan mahal bila dijual. Sehingga bangunan-bangunan ini menjadi tidak terawat dan hanya dibiarkan saja oleh para pengelola maupun pemerintah Kota Medan.

Salah satu bangunan yang sudah tidak terawat, bahkan sudah mulai mengalami kerusakan adalah Gedung Eks Tenaga Kerja yang sudah mulai hancur bentuk dan fungsi dari bangunannya. Berikut penuturan Ono, salah satu masyarakat yang mendiami Gedung Eks Tenaga Kerja. Menurutnya, banyak dari bahan-bahan material pada bangunan yang telah diambil oleh orang yang tidak dikenal, karena bahan-bahan material tersebut mahal jika dijual. Bangunan ini juga pernah mengalami kebakaran, hal tersebut yang membuat sisi-sisi pada dinding bangunan kelihatan hitam, dan juga kayu-kayu pada bagian atap dapat sudah tidak sekuat dan sekokoh dulu, dapat roboh dan membahayakan siapapun ²⁴.

Untuk melestarikan bangunan cagar budaya, seharusnya masyarakat juga mengambil peran aktif, termasuk dalam hal menjaga maupun mengawasi bangunan cagar budaya tersebut, agar tetap terjaga nilai-nilai kesejarahan, pendidikan, dan arsitektur yang terkandung pada bangunan tersebut. Masyarakat seperti, komunitas-komunitas pecinta sejarah, ataupun pihak akademisi seharusnya dapat memberikan edukasi publik kepada masyarakat mengenai nilai-nilai apa saja yang terkandung pada bangunan tersebut. Mulai dari nilai kesejarahannya, pendidikannya, arsitekturnya dan lain sebagainya.

Sampai saat ini peran masyarakat yang dimaksudkan di atas memang ada dalam berbagai bentuk, misalnya seperti yang dilakukan oleh masyarakat ataupun komunitas-komunitas pecinta sejarah yang selalu mensosialisasikan dan memberikan pengetahuan betapa pentingnya suatu bangunan cagar budaya. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Hairul, salah satu Ketua Harian Badan Warisan Sumatera (BWS), bahwa sejak berdirinya BWS pada tahun 1998, mereka selalu menjadi garda terdepan dalam melakukan sosialisasi kepada para pemilik ataupun pengelola dan juga masyarakat luas dan juga melakukan penjagaan, pengawasan, dan selalu memperjuangkan bangunan-bangunan cagar budaya yang ada di Kota Medan agar tidak dihancurkan²⁵. Serta melakukan dokumentasi yang rutin terhadap bangunan-bangunan tersebut dalam beberapa tahun sekali, baik itu berupa foto dan juga mengumpulkan karya-karya tulisan mengenai bangunan-bangunan yang ada di Kota Medan ²⁶.

²⁴Wawancara, dengan Ono, Medan, pada tanggal 11 Februari 2019.

²⁵Wawancara, dengan Hairul, Medan, pada tanggal 30 April 2019.

²⁶*Ibid*.

Kemudian peran pihak akademisi yang sampai saat ini juga tetap masih ada melalui pembuatan tulisan-tulisan ilmiah seperti makalah-makalah, jurnal, skripsi, tesis dan lain-lainnya. Edukasi publik juga dilakukan oleh para akademisi melalui seminar-seminar tentang pentingnya bangunan cagar budaya yang terdapat di Kota Medan. Hal tersebut disampaikan oleh Isnen Fitri, salah satu dosen di Program Studi Arsitektur USU²⁷. Dari berbagai hal tersebut, dapat diketahui bahwasanya peran masyarakat baik itu pihak pemilik, pengelola, komunitas-komunitas pecinta sejarah maupun akademisi tetap ada sampai saat ini, walaupun masih dalam kategori kurang maksimal. Namun dalam melakukan hal tersebut, masyarakat tidak bisa lepas dari peran pemerintah. Pihak pemerintah lokal, terutama Pemko Medan melalui dinas terkait seperti Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Medan cenderung pasif dalam mendukung peran masyarakat.

Terutama dalam pengawasan dan penjagaan bangunan cagar budaya yang ada di Kota Medan khususnya kawasan Kesawan, sehingga banyak bangunan-bangunan cagar budaya yang sudah mulai rusak dan bahkan hancur. Selayaknya peran kita sebagai masyarakat dan juga pemerintah Kota Medan lebih aktif lagi dalam mensosialisasikan pentingnya suatu bangunan cagar budaya. Terutama bangunan-bangunan cagar budaya tersebut memiliki nilai-nilai yang sangat penting bagi kesejarahan, pendidikan, dan arsitektur, khususnya bagaimana Kota Medan ini bisa terbentuk sampai saat ini.

Hambatan Dalam Melestarikan Bangunan Cagar Budaya

Peran masyarakat dalam melestarikan bangunan cagar budaya juga dihadapkan pada hambatan-hambatan. Terutama hambatan-hambatan yang dialami oleh para pemilik maupun pengelola bangunan tersebut. Biasanya hambatan-hambatan yang dialami oleh pemilik ataupun pengelola bangunan cagar budaya tersebut adalah karena tidak adanya dana milik pribadi ataupun dana yang diberikan pemerintah untuk melakukan perawatan, penjagaan maupun pelestarian dari bangunan cagar budaya tersebut. Salah satu dari bangunan cagar budaya tersebut adalah Gedung Eks Dinas Tenaga Kerja yang berada di Jln. Hindu/Ahmad Yani VII. Bangunan ini sangat tidak terawat, terlihat jelas dari bentuk bangunannya yang sudah mulai rusak melalui proses alam yang terjadi dan juga kebakaran pada bangunan.

Namun ada beberapa dari pemilik ataupun pengelola bangunan cagar budaya yang tidak begitu mengalami hambatan yang berarti. Seperti halnya pihak pengelola restoran Tip Top, *Tjong A Fie Mansion*, dan juga Mesjid Lama Gang Bengkok, pada saat ini mereka tidak terlalu mengalami hambatan yang berarti ataupun kesulitan dalam melestarikan ataupun mengelola bangunan cagar budaya yang mereka miliki, karena mereka memiliki dana pribadi yang sudah ditetapkan untuk melakukan perawatan dan juga perbaikan terhadap bangunan tersebut.

²⁷Wawancara, dengan Isnen Fitri, Medan pada tanggal 30 April 2019.

Hambatan-hambatan tersebut juga dialami oleh pihak akademisi dan juga masyarakat lainnya seperti BWS dalam melakukan pelestarian bangunan cagar budaya yang terdapat di Kota Medan, khususnya Kesawan.

Menurut Isnén Fitri, peran serta pemerintah dalam menjaga dan melestarikan bangunan-bangunan cagar budaya yang terdapat di Kota Medan cenderung pasif. Seperti dalam melakukan pendataan ataupun meregistrasi kembali bangunan-bangunan cagar budaya yang terdapat di Kota Medan, khususnya kawasan Kesawan. Banyak dari bangunan cagar budaya yang terdapat di Kota Medan hilang pada saat dilakukannya pendataan kembali pada tahun 2012, yang sebelumnya dilakukan pendataan pada tahun 1988²⁸.

Karena dalam penerapan kebijakan-kebijakannya, pemerintah Kota Medan seharusnya bisa memberikan perhatiannya yang lebih, karena peran pemerintah Kota Medan sangatlah penting dalam melestarikan bangunan cagar budaya yang ada, karena bangunan cagar budaya tersebut adalah aset yang sangat berharga bagi Kota Medan. Seperti dalam Peraturan Daerah Kota Medan No. 13 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kota Medan 2011-2031. Pada peraturan tersebut disebutkan bahwa kawasan Lapangan Merdeka dan kawasan Kesawan adalah kawasan inti bersejarah Kota Medan²⁹.

Namun sampai saat ini, setelah dikeluarkan peraturan daerah Kota Medan tersebut, belum ada kebijakan yang diambil oleh pemerintah Kota Medan, seperti penetapan batas-batas wilayah kawasan Lapangan Merdeka dan kawasan Kesawan, kemudian daftar-daftar bangunannya, serta panduan yang dipakai untuk mengatur bagaimana cara dan konsep dari pelestarian bangunan cagar budaya tersebut³⁰.

Hal yang serupa juga dialami pihak BWS, menurut Hairul, hambatan yang paling utama adalah kurangnya peran dari para pemilik ataupun pengelola bangunan cagar budaya tersebut untuk melestarikan bangunan yang dikelolanya, baik itu karena tidak memiliki dana ataupun karena tidak mengetahui potensi yang ada pada bangunan tersebut. Serta kurangnya peran dari pemerintah Kota Medan dalam memperhatikan bangunan cagar budaya yang dimilikinya. Sehingga masih ada beberapa bangunan yang tidak diketahuinya siapa pemilik dari bangunan cagar budaya tersebut³¹.

²⁸Wawancara, dengan Isnén Fitri, Medan, pada tanggal 30 April 2019.

²⁹*Ibid.*

³⁰*Ibid.*

³¹Wawancara, dengan Hairul, Medan, pada tanggal 30 April 2019.

1. Kesimpulan

Dari hasil uraian diatas, penulis dapat mengambil kesimpulan antara lain yaitu bangunan-bangunan Cagar Budaya yang terdapat di Kota Medan, khususnya kawasan Kesawan adalah sebuah peninggalan sejarah yang harus dijaga dan dilestarikan keberadaannya. Bangunan-bangunan tersebut telah ada sejak masa kolonial Belanda. Bangunan-bangunan tersebut adalah salah satu bukti keberhasilan industri perkebunan tembakau milik pemerintah kolonial Belanda, yang telah dirintis sejak tahun 1862 di tanah Deli. Bangunan-bangunan tersebut masih dapat kita lihat sampai saat ini peninggalan-peninggalannya, baik dari segi fisik maupun dari segi fungsi bangunan tersebut. Gaya arsitektur dari bangunan-bangunan cagar budaya peninggalan kolonial yang berada di kawasan Kesawan ini, sangatlah dipengaruhi oleh gaya arsitektur Eropa, dan juga perpaduan dari kebudayaan Melayu dan Cina pada masa itu. Seperti bangunan Tjong A Fie Mansion ini, bangunan ini secara keseluruhan merupakan perpaduan antara arsitektur Cina, Eropa yang juga dikombinasikan dengan Melayu.

Bangunan-bangunan cagar budaya peninggalan masa kolonial Belanda yang terdapat di kawasan Kesawan ini telah dilindungi melalui ketetapan Surat Keputusan WaliKota Medan Nomor 188.342/SK/1989 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Medan No. 6 Tahun 1998 tentang Pelestarian Bangunan dan Lingkungan yang Bernilai Sejarah Arsitektur Kepurbakalaan dan juga melalui Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata No. PM.01/PW.007/MKP/2010. Serta juga telah ditetapkannya Undang-Undang No. 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya. Mengenai peran masyarakat, baik dari pihak pemilik ataupun pengelola, pemerintah, masyarakat luas dan juga pihak akademisi dalam melakukan pelestarian bangunan cagar budaya di kawasan Kesawan ini tetap terus ada, namun belum terlalu maksimal dalam melakukan perawatan maupun pelestarian dari bangunan cagar budaya tersebut. Seperti adanya beberapa bangunan cagar budaya yang tetap mempertahankan bentuk dan fungsi bangunannya seperti sediakala. Namun ada juga beberapa bangunan cagar budaya tersebut yang mengalami perubahan bentuk dan juga fungsinya, bahkan ada beberapa bangunan yang sudah mulai rusak dan hancur karena proses alam.

Melihat situasi dan kondisi bangunan cagar budaya yang terdapat di Kota Medan khususnya kawasan Kesawan, sangat diharapkan kerja sama antara Pemerintah Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara dan juga masyarakat luas seperti pihak pemilik, pengelola, akademisi dan juga komunitas-komunitas pecinta sejarah lainnya agar lebih menjaga dan merawat kembali bangunan-bangunan cagar budaya yang terdapat di kawasan Kesawan. Hal tersebut diharapkan agar dapat dilakukannya inventarisasi dan juga registrasi kembali terhadap bangunan-bangunan cagar budaya tersebut, agar mendapatkan jumlah dan unit bangunan yang tepat serta penetapan batas-batas wilayah pada kawasan Kesawan agar nantinya dapat dilakukannya perlindungan

hukum yang semestinya. Kemudian diberikannya program bantuan dana kepada para pemilik ataupun pengelola bangunan untuk melakukan pelestarian terhadap bangunan tersebut, dan juga diberikannya keringanan berupa pajak bumi bangunan untuk bangunan cagar budaya tersebut.

2. Daftar Bangunan Cagar Budaya di Kawasan Kesawan dan Kondisi Terkini

Kawasan Kesawan memiliki beberapa bangunan-bangunan peninggalan masa kolonial Belanda, yang sampai sekarang masih terlihat jelas bentuk dari bangunan tersebut. Bangunan-bangunan tersebut secara administrasi terletak di Kelurahan Kesawan. Namun peneliti ingin memperkecil ruang lingkup penelitian menjadi suatu kawasan³², bukan sebagai kelurahan. Beberapa bangunan cagar budaya yang memiliki nilai sejarah, pendidikan, arsitektur dan kebudayaan di kawasan Kesawan antara lain sesuai dengan tabel berikut:

No	Nama Bangunan	Foto Lama	Foto Terkini	Ket
1	Gedung London Sumatera			★
2	Gedung BKS PPS atau Gedung AVROS			★ ★

³²Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008, hlm 653. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kawasan adalah sebuah daerah tertentu yang mempunyai ciri tertentu, seperti tempat tinggal, pertokoan, industri, dan sebagainya.

No	Nama Bangunan	Foto Lama	Foto Terkini	Ket
3	Restoran TIP TOP.			★
4	Kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Utara.			★
5	Tjong A Fi Mansion.			★★
6	Bangunan Toko Sepatu BATA, Bank BNI dan Bank Danamon.			★

No	Nama Bangunan	Foto Lama	Foto Terkini	Ket
7	Bangunan Kantor Jakarta Lloyd (PT. Jasindo) dan Toko Seng Hap			★
8	Kantor Bank Mandiri Ahmad Yani			★
9	Masjid Lama Gang Bengkok			★ ★ ★
10	Madrasah Ibtidiah Al-Washliyah 1			★ ★ ★

No	Nama Bangunan	Foto Lama	Foto Terkini	Ket
11	Gedung Eks Dinas Tenaga Kerja/ Gedung Werenhuis			★
12	Bangunan Kantor Asuransi Jiwasraya			★
13	Bangunan Pertokoan Pajak Ikan Lama	 	 	★ ★ ★

No	Nama Bangunan	Foto Lama	Foto Terkini	Ket
14	Bangunan Pertokoan Pasar Hindu			★ ★ ★
15	Bangunan-bangunan Lama di Jln. Ahmad Yani (Kesawan)			★

Keterangan	
★	Dilindungi melalui Peraturan Daerah Kota Medan No 6 Tahun 1988.
★ ★	Masuk dalam Cagar Budaya Nasional Berdasarkan Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata No PM.01/PW.007/MKP/20 tahun 2010.
★ ★ ★	Belum Dilindungi melalui Peraturan Daerah Kota Medan

Daftar Pustaka

- Basarshah II, Tengku Luckman Sinar. 2006. *Bangun Dan Runtuhnya Kerajaan Melayu Di Sumatera Timur*. Medan: Yayasan Kesultanan Serdang.
- Budiharjo, Eko. 1997, *Arsitektur Sebagai Warisan Budaya*. Jakarta: Djambatan.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa.
- Dudung, Abdulrahman, 1994, *Metode Penelitian Sejarah*. Pamulang Timur: PT Logos Wacana Timur.
- Gottschalk, Louis, 1985, *Mengerti Sejarah*, Terjemahan Nugroho Notosusanto. Jakarta: Ui Press.
- Koestoro, Lucas Partanda, 2006, *Medan, Kota Di Pesisir Timur Sumatera Utara Dan Peninggalan Tuanya*. Medan: Balai Arkeologi Medan.
- Oetomo, Repelita Wahyu, Dkk. 2011, *Bangunan Bersejarah Di Kota Medan*. Medan: Museum Negeri Provinsi Sumatera Utara.
- Republik Indonesia. 1992, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1992 Tentang Benda Cagar Budaya*. Jakarta: Republik Indonesia.
- Republik Indonesia. 2010, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya*. Jakarta: Republik Indonesia.
- Sibarani, J. P. Marthin. 2002. *Tesis: "Pengendalian Kawasan Pelestarian Kota Lama Di Kawasan Kesawan Medan"*. Bandung: ITB.
- Sidabutar, Yuanita F.D., 2007, Jurnal: *"Pemanfaatan Keberadaan Bangunan Bersejarah Dalam Mendukung Aktivitas Pembangunan Wilayah Di Kota Medan (Studi Kasus: Kawasan Kesawan Dan Lapangan Merdeka)"*, Medan: Jurnal Wahana Hijau Perencanaan & Pengembangan Wilayah, Vol.3, No.1.
- Sinar, Tengku Luckman. 1991. *Sejarah Medan Tempo Doeloe*, Medan: Lembaga Penelitian Dan Pengembangan Seni Budaya Melayu.
- Sumalyo, Yulianto. 1995, *Arsitektur Kolonial Belanda Di Indonesia*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Wahid, Julaihi. TT, *Kajian Urbanisasi Dan Morfologi Bandar: Khusus Kepada Bandar-Bandar IMT-GT*, Malaysia: Pusat Pengajian Perumahan, Bangunan Dan Perancangan Universiti Sains Malaysia.

Internet

- <https://Colonialarchitecture.eu>
- <https://kbbi.kemdikbud.go.id>
- <https://m.facebook.com/FotoHitamPutihSejarahBudayaSumateraUtaraBukuFoto>
- <https://m.facebook.com/SejarahBatakToba/DanauToba/Pulau/SamosirFotobuku>
- <https://tembakaudeli.blogspot.com>

Gambaran Umum temuan Arkeologis era Kerajaan Aceh Darussalam di Gampong Rima Jeuneu, Kecamatan Peukan Bada, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh

Oleh: Ambo Asse Ajis
Balai Pelestarian Cagar Budaya Aceh
Jl. Banda Aceh - Meulaboh Km. 7,5 Kec. Peukan Bada Kab. Aceh Besar
ambo.unsam@gmail.com
0821-6859-6640

ABSTRACT

The findings of ancient gravestone fragments of type Aceh Darussalam and Pasai type, blue and white porcelain fragments, brown glaze stoneware fragments and pottery fragments on community land in Jeuneu Hamlet, Gampong Rima Jeuneu, Peukan Bada District, Aceh Province, became strong clues to this village. existed since the era of the Kingdom of Aceh Darussalam. Likewise the results of reading Dutch colonial maps made in 1875, further strengthen the signal that the existence of this ancient village has existed since ancient times. As a result, based on a search of archaeological traces comparing the data of Dutch colonial cartography, it can be concluded that Gampong Rima Jeuneu is part of a village south of the center of the Kingdom of Bandar Aceh Darussalam. This article intends to provide an initial description of archaeological remains and the factors that support the birth of the Jeune Hamlet settlement. The method of writing is qualitatively descriptive and the results of this study succeed in explaining the life of settlements on the border of the central government of the kingdom of Aceh Darussalam in the pre-colonial era of the Netherlands.

Keywords: Ancient gravestones, fragments, ancient villages, Kingdom of Aceh Darussalam, Dutch Colonial

ABSTRAK

Temuan fragmen nisan kuno tipe Aceh Darussalam fragmen porselin biru putih, fragmen stoneware abu-abu glasir coklat dan fragmen tembikar di lahan masyarakat di Dusun Jeuneu, Gampong Rima Jeuneu, Kecamatan Peukan Bada, Provinsi Aceh, menjadi petunjuk kuat perkampungan ini telah ada sejak era Kerajaan Aceh Darussalam. Demikian juga hasil bacaan peta kolonial Belanda yang di buat tahun 1875, semakin memperkuat sinyal keberadaan perkampungan kuno ini sudah ada sejak zaman dahulu. Dari hasil penelusuran jejak arkeologis dan membandingkan data kartografi kolonial Belanda ini dapat disimpulkan Gampong Rima Jeuneu merupakan bagian dari perkampungan tua di sebelah selatan pusat Kerajaan Bandar Aceh Darussalam sejak era Sultan Iskandar Muda jauh sebelum kehadiran Kolonial Belanda di Aceh Besar. Tulisan ini bermaksud memberikan deskripsi awal tinggalan arkeologis beserta faktor yang mendukung lahirnya situs ini. Metode penulisan karya ini deskriptif kualitatif dan hasil penelitian ini menjelaskan kehidupan perkampungan di perbatasan pusat pemerintahan kerajaaan Aceh Darussalam pada masa lalu era pra kolonial Belanda.

Kata Kunci: Nisan kuno, fragmen, perkampungan kuno, Kerajaan Aceh Darussalam, Kolonial Belanda

Tinggalan arkeologis di Dusun Jeune, Gampong Rima Jeune, Kecamatan Peukan Bada, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh berada di koordinat 5°31'19.99"U 95°16'11.68"T, diketahui secara tidak sengaja oleh penulis pada tahun 2018 lalu. Secara kebetulan, penulis tinggal di areal tersebut dan setiap harinya melewati areal yang memiliki tinggalan arkeologis berupa nisan kuno baik yang telah patah maupun yang masih utuh.

Bulan April Tahun 2019, keinginan mengamati dan menulis jejak arkeologis di Dusun Jeune semakin menguat takkala secara beruntun datangnya informasi kepurbakalaan terkait sejarah Desa/Gampong Rima Jeune ini. Informasi pertama datang dari Sekertaris Desa Gampong Rima Jeune, Baihaqi, saat penulis bersilaturahmi di kediaman beliau pada hari raya Ramadhan 1440 Hijriah. Beliau mengatakan asal usul nama Gampong Rima Jeune dari 2 (dua) kata benda, yaitu "*Rima*" yang berarti rimba/hutan belantara dan "*Jeune*" yang berarti air dari pohon/getah pohon berwarna putih yang berfungsi sebagai racun. Dari informasi ini, penulis memahami, sebelum pemukiman di buka, lokasi ini adalah hutan belantara dimana salah satu habitatnya adalah tumbuh tanaman Jeune. Dengan kata lain, penduduk yang membuka hutan dan membentuk pemukiman memiliki pengetahuan tentang hutan belantara termasuk mengenali tanaman Jeune yang sudah fungsional atau familiar dalam kehidupan keseharian mereka selama ini.

Informasi kedua, berasal dari ketua kelompok tani Dusun Jeuneu, Abdul Rahman (83) yang juga salah satu tetua masyarakat Jeuneu saat ini. Penulis mewawancari beliau pada bulan september 2018 lalu, mengatakan di salah satu petak sawah milik warga ada yang dinamakan "*blang kapal*" yang berarti sawah yang dibawah tanahnya ada kapal (bekas kapal). Menurut beliau, cerita rakyat di sini menyebutkan dahulu ada kapal karam yang tertimbun tanah dan diabadikan lokasinya dengan nama tersebut di atas.

Selanjutnya, informasi ketiga datang dari penduduk pemilik kebun, Pak Abrar (40) berasal dari Pidie dan telah tinggal di tempat ini selama 5 (lima) tahun mengatakan saat mengerjakan lahan kebun, pernah menemukan beberapa fragmen kepingan (pecahan) keramik, stoneware dan tembikar di atas. Demikian juga informasi pada penguburan salah seorang warga setempat, beliau menemukan ada satu nisan utuh tepat di areal perkebunan warga. Informasi lainnya dari Ibu Febi (45) mengatakan saat membuat pondasi rumah dan meratakan timbunan tanah, ada beberapa pecahan keramik di sekitar rumahnya.

Berdasarkan kumpulan informasi di atas, penulis melakukan observasi lapangan dari tanggal 10 sampai dengan 15 Juni 2019 untuk melihat sebaran tinggalan arkeologis secara eksisiting, mengamati kondisi lingkungan sekitar perkampungan, kebun dan lingkungan batas Dusun Jeuneu serta melakukan wawancara ke beberapa tokoh masyarakat setempat guna mendapatkan informasi kesejarahan yang utuh.

Tujuan

Tulisan ini bertujuan memberikan deskripsi tinggalan arkeologis di Dusun Jeuneu, Gampong Riam Jeuneu, Kecamatan Peukan Bada, Kabupaten Aceh Besar. Lokasi tinggalan ini sangat penting mengingat keletakannya yang berada di wilayah pinggiran pusat Kerajaan Aceh Darussalam.

Metode

Penulisan karya ini menggunakan referensi 4 (empat) buah sumber, antara lain: *pertama*, data hasil observasi lapangan terkait tinggalan arkeologis dan data lingkungan; *kedua*, data dari sumber sekunder berupa peta kolonial yang menyebutkan lokasi Jeuneu; *ketiga*, hasil wawancara dari warga setempat yang mengetahui hal ikhwal Gampong Rima Jeuneu; dan *keempat*, data dari berbagai kepustakaan yang telah dibuat sebelumnya.. Dari sumber-sumber ini, informasi digali yang kemudian direkonstruksi dalam rangka mengetahui sejarah budayanya. Adapun langkah-langkah penelitian yang ditempuh dilalui dengan cara: (1) melakukan wawancara dengan narasumber yang mengetahui sejarah dan tinggalan arkeologis; (2) melakukan observasi arkeologis untuk melihat artefak dan ekofaknya; (3) melakukan kajian pustaka dan membandingkan dengan tinggalan arkeologisnya untuk melihat dimensi bentuk, ruang dan waktunya; dan (4) mengolah data dan menarik penjelasan yang simetris berdasarkan data-data yang tersedia.

Dusun Jeune, Gampong Rima Jeune berada di koordinat $5^{\circ}31'19.99''\text{U}$ $95^{\circ}16'11.68''\text{T}$. Gampong Rima Jeune merupakan salah satu gampong yang ada di Kecamatan Peukan Bada, Kabupaten Aceh Besar, dengan batas-batas antara lain:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Gampong Lamgeu Eu
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Gampong Lampisang
- Sebelah Barat berbatasan dengan Gampong Lamgeu Eu
- Sebelah Timur berbatasan dengan Gampong Rima Keunerum



Gambar 1. Keletakan Gampong Rima Jeune
(Sumber: Google Earth 2019; dimodifikasi penulis 2019)

Gampong Rima Jeuneu memiliki 4 (empat) buah dusun, antara lain: Dusun Kechiek Musa, Dusun Hanafiah, Dusun Tgk. Tuan Di Blang dan Dusun Tengku Mata Ie. Terkait asal usul nama gampong, mahasiswa KKN Universitas Syiah Kuala Tahun 2014 berhasil merekam tradisi lokal setempat terkait referensi asal usul penama Rima Jeuneu. Disebutkan, nama Gampong Rima Jeuneu berasal dari sebuah legenda. Kata *Rima* berasal dari kata Rimba (hutan) yang diceritakan area perkampungan Rima Jeune sekarang awalnya memang kawasan hutan rimba. Akibat pengaruh pengucapan dalam perkataan sehari-hari dari Rimba berubah menjadi Rima.



Gambar 2. Tanaman Jeune yang masih tersisa di pegunungan Gampong Rima Jeune
(Sumber: Koleksi pribadi, 2019)

Menurut laporan mahasiswa diketahui asal usul penduduk Gampong Rima sekarang ini dulunya berada di seberang jalan raya (jalan nasional) gampong sekarang. Saat itu karena penduduk Rima diserang penyakit *taeun* dan berkesimpulan tanah mereka telah berpenyakit dan tidak cocok lagi sebagai tempat berdomisili. Maka ditebanglah Rimba (lokasi situs) disampingnya untuk dijadikan perkampungan baru, yang sekarang menjadi area pusat Gampong Rima. Di kalangan masyarakat Aceh Besar yang telah berusia lanjut, masih sering menyebut Gampong Rima dengan sebutan Gampong Rimba. Adapun kata *Jeuneu* berasal dari kata *Jine* (akar Jine), yaitu sejenis tumbuhan yang akarnya menjalar dalam tanah, getah akarnya berwarna putih susu, dan mengandung racun yang sangat kuat. Getah ini sering digunakan oleh masyarakat untuk meracuni ikan disungai.

Gampong Rima Jeuneu merupakan salah satu gampong yang dilanda bencana tsunami tahun 2004 lalu dan mengalami kerusakan sampai tingkat hancur total. Bangunan pemukiman dan fasilitas umum hancur 100%, sehingga semua aspek kehidupan gampong hancur total.

Namun sekarang sudah terdapat sarana dan prasarana dari pihak pemerintah serta instansi terkait. Umumnya warga bekerja petani sawah, pekebun dan peternak. Masyarakat Rima Jeuneu memiliki lahan persawahan yang cukup luas tetapi tidak memiliki sistem irigasi sehingga pengelolaannya terbatas pada musim hujan saja. Demikian juga lahan perkebunan ditanami cengkeh, kepala, pinang dan sebagainya. Penduduk juga mendomestifikasi lembu, kerbau, ayam dan kambing. Pada saat ini, pusat permukiman warga ada di dua titik besar, yaitu di Jeuneu (Dusun Tgk. Di Blang dan Dusun Mata ie) dan Rima (Dusun Kechiek Musa dan Dusun Hanafiah).

1. Data Arkeologi

Tinggalan arkeologi yang ditemukan saat observasi permukaan tanah berada di Dusun Mata Ie, Gampong Rima Jeuneu, Kabupaten Aceh Besar. Temuan tersebut berupa benda dan konteksnya, antara lain: 1) nisan, makam kuno dan konteksnya; 2) fragmen keramik, stoneware, tembikar dan keletakannya dan 3) jejak lingkungan kuno. Lokasi nisan kuno berada di tanah kebun seorang penduduk yang pada masa lalu di kenal dengan nama Polem dan tanah ini disebut *lampoh to Polem*. Menurut warga, dahulunya ada jejeran nisan-nisan kuno kurang lebih 10 pasang dengan ukuran besar dan kecil. Nisan tersebut ada berbentuk pipih, umumnya besar dan ada yang bulat dengan ukuran lebih kecil.

A. Nisan dan konteksnya

Sebaran nisan kuno ada 4 titik dengan kondisi ada yang masih insitu dan tidak insitu; ada yang berada di gundukan tanah kebun, tanah perumahan dan ada yang berada di lingkungan meunasah (surau). Sebaran nisan kuno ada 4 titik dengan kondisi ada yang masih insitu dan tidak insitu; ada yang berada di gundukan tanah kebun, tanah perumahan dan ada yang berada di lingkungan meunasah (surau).

1. Nisan A



Gambar 3. Nisan A
(Sumber: Koleksi pribadi, 2019)

Nisan A terletak di koordinat 5°31'18.68"U dan 95°16'10.70"T, berada di dekat areal persawahan bagian sisi barat Dusun Tgk. Mata le. Jarak Meunasah Rima ke lokasi nisan A sekitar 152,42 meter ke arah barat laut 327,98 derajat, mengikuti jalan setapak rabat beton. Nisan ini keletakannya berada di halaman rumah warga, berada di atas gundukan tanah dengan ketinggian 1 meter dari tanah sekitarnya. Tanah gundukan ini memanjang dengan orientasi barat-selatan dan difungsikan sebagai jalan kebun. Sebagian besar badan nisan A masih tertanam dan patah di duga akibat benturan saat tsunami menerjang lokasi ini tahun 2004 lalu.

Tabel 1.
Identitas Nisan A

Tinggi	: 4 cm
Tebal	: 10 cm
Lebar	: 13 cm
- Puncak	: patah/hilang
- Badan	: patah/hilang
- Dasar Badan	: ada/terbenam sebagian
- Khaki nisan	: terbenam
Tipe	: -
Teknologi	: pahat
Bahan	: batu Pasir
Epitaf	: tidak diketahui
Keletakan	: tidak insitu

Nisan A terbuat dari batu pasir, dikerjakan dengan pahat. Bagian yang terlihat dipermukaan adalah bagian panel badan bawah yang berhubungan dengan kaki nisan. Kaki nisan kondisinya masih tertanam di dalam tanah. Berdasarkan perbandingan dengan nisan lainnya di sekitar objek ini, diketahui bentuk panel badan bawah yang berhubungan dengan kaki nisan berbentuk persegi empat yang ujungnya meruncing dengan penuh pahatan tatahan. Kemungkinan besar Nisan A adalah nisan tipe Aceh Darussalam berbentuk pipih dengan badan bulat atau di kenal dengan nama silindrik.

2. Nisan B



Gambar 4.

Nisan B (Kepala dan Khaki). Arah Pengambilan gambar timur-barat

(Sumber: Koleksi pribadi, 2019)

Nisan B terletak di koordinat $5^{\circ}31'18.67''\text{U}$ dan $95^{\circ}16'11.52''\text{T}$, berada di areal perkebunan warga di Dusun Tgk. Mata Ie. Nisan B adalah makam dengan 2 buah nisan (kaki dan kepala). Lokasi makam ini di duga masih insitu. Letak nisan pada makam ini di halaman rumah warga, berada di atas gundukan tanah dengan ketinggian 1,2 meter dari tanah sekitarnya. Tanah gundukan ini memanjang dengan orientasi barat-selatan dan difungsikan sebagai jalan kebun. Adapun jarak antara nisan A ke B sekitar 22,43 meter dengan orientasi barat ke timur dengan sudut $90,30$ derajat. Nisan B (kepala dan kaki) masih tertanam pada bagian dasarnya; bagian atasnya telah patah, di duga akibat benturan saat tsunami menerjang lokasi ini tahun 2004 lalu. Nisan B terbuat dari batu pasir, dikerjakan dengan pahat; ada 2 (dua) bagian yang masih terlihat, yaitu bagian panel dasar nisan bagian bawah dan kaki nisan.

Kaki nisan sebagian masih tertanam di dalam tanah, sebagiannya lagi tersingkap akibat geseran air; kaki nisan berbentuk persegi empat yang ujungnya meruncing dengan tatahan pada kaki nisan terlihat jelas yang berfungsi sebagai pengait saat tertanam di tanah. Panel bawah dari badan nisan berbentuk persegi empat, berfungsi sebagai dudukan badan. Dari pengamatan kaki dan panel bawah badan nisan di duga Nisan B ini termasuk jenis nisan kuno Tipe Aceh Darussalam.

Tabel 2.
Identitas Nisan B



Nisan Kepala (Utara)



Nisan Kaki (Selatan)

Gambar 5.

Model Nisan B (kaki dan kepala) pada makam kuno

Arah Pengambilan gambar arah barat-timur. (Sumber: Koleksi pribadi, 2019)

Nisan B Nisan Kepala (Utara)		Nisan B Nisan Kaki (Selatan)	
Tinggi	:20 cm	Tinggi	:21 cm
Tebal	:17 cm	Tebal	:18 cm
Lebar	:30 cm	Lebar	:30 cm
- Puncak	: patah/hilang	- Puncak	: patah/hilang
- Badan	: patah/hilang	- Badan	: patah/hilang
- Dasar Badan	: ada	- Dasar Badan	: ada
- Kaki nisan	: terbenam	- Kaki nisan	: terbenam
Tipe	: -	Tipe	: -
Teknologi	: pahat	Teknologi	: pahat
Bahan	: batu Pasir	Bahan	: batu Pasir
Epitaf	: tidak diketahui	Epitaf	: tidak diketahui
Keletakan	: tidak insitu	Keletakan	: tidak insitu

3. Nisan C



Gambar 6.
Nisan C
Arah Pengambilan gambar arah barat-
timur. (Sumber: Koleksi pribadi,
2019)

Nisan C terletak di koordinat $5^{\circ}31'18.82''\text{U}$ dan $95^{\circ}16'11.62''\text{T}$, berada di depan rumah warga dan tidak insitu lagi. Nisan C ini sengaja dipindahkan dari tempat aslinya, barangkali terkena saat pembuatan rumah/ pembuatan pagar/sumur yang tak jauh dari tempatnya sekarang. Jarak antara nisan B ke C sekitar 5,74 meter dengan orientasi barat ke timur sudut $32,31$ derajat. Nisan C telah terlepas dari konteksnya dan diletakkan di depan rumah warga yang tidak jauh dari Nisan B.

Tabel 3.
Identitas Nisan C

Tinggi	:40 cm
Tebal	:20 cm
Lebar	:40 cm
-Puncak	: hilang
-Badan	: hilang
-Dasar Badan	: ada
-Khaki nisan	: ada
Tipe	: -
Teknologi	: pahat
Bahan	: batu Pasir
Epitaf	: tidak diketahui
Keletakan	: tidak insitu

Nisan ini terbuat dari batu pasir, dikerjakan dengan pahat; ada 2 (dua) bagian yang masih terlihat, yaitu bagian kaki nisan dan bagian panel dasar nisan bagian bawah. Kaki nisan sebagiannya patah, berbentuk persegi empat dengan bekas tatahan terlihat jelas yang berfungsi sebagai pengait saat tertanam di tanah. Adapun panel bawah dari badan nisan berbentuk persegi empat, berfungsi sebagai dudukan badan. Dari pengamatan kaki dan panel bawah badan nisan di duga Nisan C ini termasuk jenis nisan kuno Tipe Aceh Darussalam.

4. Nisan D

Nisan ini terbuat dari batu pasir, dikerjakan dengan pahat; ada 2 (dua) bagian yang masih terlihat, yaitu bagian kaki nisan dan bagian panel dasar nisan bagian bawah. Kaki nisan sebagiannya patah, berbentuk persegi empat dengan bekas tatahan terlihat jelas yang berfungsi sebagai pengait saat tertanam di tanah. Adapun panel bawah dari badan nisan berbentuk persegi empat, berfungsi sebagai dudukan badan. Dari pengamatan kaki dan panel bawah badan nisan di duga Nisan C ini termasuk jenis nisan kuno Tipe Aceh Darussalam.



Gambar 7.
Nisan D
(Pengambilan gambar arah Barat-Timur.(Sumber: Penulis, 2019)

Nisan D terletak di koordinat $5^{\circ}31'19.89''\text{U}$ dan $95^{\circ}16'11.76''\text{T}$, berada di areal kebun warga dan masih insitu. Nisan D tinggal satu saja, kemungkinan nisan bagian kepala (utara) mengingat di sisi sebelah selatan ada lubang presisi utara-selatan yang diduga bekas nisan bagian kaki. Lokasi nisan D masih aktif sebagai kebun warga . Jarak antara nisan C ke D sekitar 32,83 meter dengan orientasi selatan ke utara dengan arah sudut 7,28 derajat. Lingkungan nisan D berada di atas gundukan tanah dengan elevasi 1 meter dari tanah sekitarnya.

Nisan ini terbuat dari batu pasir, dikerjakan dengan pahat; ada 3 (tiga) bagian yang masih terlihat, yaitu puncak, badan dan kaki nisan yang sebagian masih terbenam di tanah. Posisi nisan D miring condong ke arah Timur. Kelihatannya badan nisan pernah ditarik, ada sompelan pada tepi badan nisan, di duga bekas ikatan tali tambang.

Pada bagian puncak nisan terdapat susunan puncak susun 3 berbentuk segi tiga yang dipenuhi pahatan hiasan sulur. Bagian badan empat persegi panjang, rata dan memiliki 3 (tiga) buah panel berepitaf huruf Arab, gaya kuffi, hiasan bendera pada huruf tegaknya. Di bagian dasar badan, terdapat panel persegi empat panjang berisi hiasan pucok rebon, khas hiasan pada nisan-nisan tipe Aceh Darussalam. Pada kaki nisan, ada panel bagian atas kaki nisan yang berfungsi sebagai dudukan badan dan terhubung kaki nisan yang dibenam ke dalam tanah lengkap dengan tatahan-tatahannya.

Tabel 4.
Identitas Nisan D

Tinggi	: 80 cm
Tebal	: 15 cm
Lebar	: 20 cm
- Puncak Badan	: ada
- Dasar Badan	: ada
- Khaki nisan	: ada
Tipe	: pipih
Teknologi	: pahat
Bahan	: batu Pasir
Epitaf	: ada
Keletakan	: insitu

5. Nisan E



Gambar 7.

Nisan E di depan Meunasah Jeune (Sumber: Penulis, 2019)

Nisan E terletak di koordinat $5^{\circ}31'14.67''\text{U}$ dan $95^{\circ}16'13.84''\text{T}$, berada di halaman depan Mushallah Jeuneu, tepat berdampingan pagar mushalla di sisi timur. Menurut warga setempat, nisan ini dipindahkan dari lokasi Nisan A untuk keperluan warga. Hasil pengamatan arah hadapnya, nisan berorientasi utara-selatan yang menunjukkan bahwa bukan letak aslinya. Dari segi bentuk, nisan ini khas tipe Aceh Darussalam, pipih dengan bahu bulat, bagian kepala berbentuk kuncup bunga. Informasi dari Muslim (50) yang menjadi Kepala lorong di tempat ini, bahwa sebenarnya ada 6 (enam) buah nisan di Mushalla ini, namun 5 (lima) lainnya sudah hilang yang mungkin dibawa oleh air tsunami tahun 2004 lalu.

Jarak antara nisan D ke nisan E sekitar 170,28 meter dengan orientasi utara ke selatan, arah sudut 159 derajat. Lingkungan nisan E ini tanah datar, terbuat dari batu pasir, dikerjakan dengan pahat; ada 3 (tiga) bagian yang masih terlihat, yaitu puncak, badan dan panel kaki nisan yang sebagian masih terbenam di tanah. Bagian puncak nisan terdapat pahatan berbentuk kuncup bunga yang akan mekar. Puncak kuncup bunga ini sudah aus akibat dijadikan batu asah warga (di halaman mushalla dekat nisan ini sering dilakukan pencacahan daging kurban atau acara lainnya). Di bagian dalam kuncup bunga ini ada panel tanpa hiasan (polos). Bagian badan atas terdapat bahu yang bidang makin ke bawah makin kecil ukurannya berdiri di atas panel berbentuk persegi panjang. Pada bagian badan ada 3 (tiga) buah panel tanpa epitaf atau hiasan. Di bagian dasar badan, ada panel persegi empat panjang bersusun dua tanpa hiasan. Selanjutnya, kaki nisan tidak terlihat karena di tutupi ubin semen.

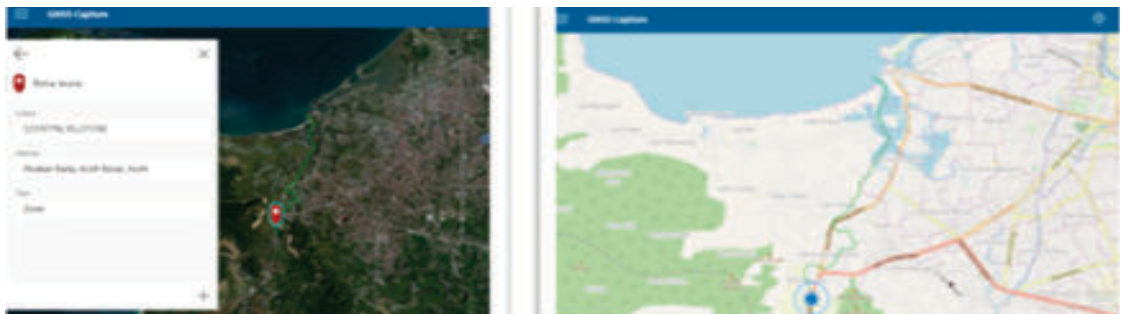
Tabel 5.
Identitas Nisan E

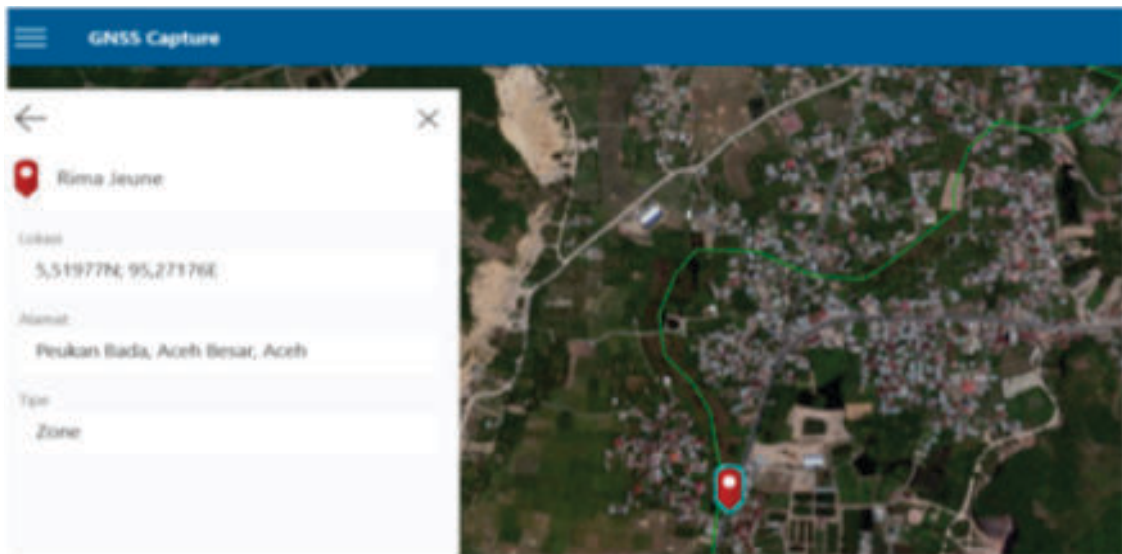
Tinggi	: 80 cm
Tebal	: 15 cm
Lebar	: 20 cm
- Puncak Badan	: ada
- Dasar Badan	: ada
- Kaki nisan	: terbenam
Tipe	: pipih
Teknologi	: pahat
Bahan	: batu Pasir
Epitaf	: ada
keletakan	: tidak insitu

Jejak Lingkungan Kuno

Lokasi penemuan objek arkeologis ini berada di sebelah barat dari alur (sungai) yang sudah lama tidak berfungsi (mati). Menurut Abdul Rahman (83), alur ini dahulunya merupakan alur aktif pelayaran, tetapi karena kuatnya sedimentasi dari hulunya, menyebabkan pendangkalan dan perlahan-lahan berubah menjadi lingkungan rawa. Sebelum Tsunami tahun 2004, vegetasi yang tumbuh di lingkungan alur tersebut penuh dengan pohon rumbia atau pohon sagu (*Metroxylon Sagu*). Warga Rima Jeune dahulu menggunakan daun rumbia sebagai bahan atap rumah. Pohon rumbia tersebut tumbuh di lahan alur yang basah dan berawa dengan kepadatan tinggi. Tetapi pasca Tsunami, tanaman ini ikut tersapu tsunami dan sama seklaai tidak ditemukan lagi desa ini.

Dalam ingatan narasumber bahwa alur ini adalah jenis sungai pasang surut, yang sumber airnya berasal dari laut, bermuara di Ulee Lheu dan Ujung Pancu. Berikut gambar skema pengamatan jalur alur pasang surut yang menghubungkan muara di Uleelhe dan di Ujung Pancu Skema garis koneksi jejak alur pasang surut yang menghubungkan muara di Ulee Lheu (Banda Aceh), Gampong Pie (Banda Aceh), Gampong Lam Hasan (Aceh Besar), Gampong Rima Keuneron (Aceh Besar) dan Gampong Rima Jeune berdasarkan pengamatan peta tangkapan GNSS Capture ArcGis:





Gambar 8.

Tampakan Alur (sungai) mati berada di sisi Selatan temuan arkeologis
(Sumber: GNSS Capture ArcGis 2019; dimodifikasi penulis, 2019)



Gambar 9.

Sebaran temuan arkeologis di sebelah Barat alur mati
(Sumber: Google Earth 2019; dimodifikasi penulis 2019)

Pada masa sebelum perang kolonial Belanda - Kerajaan Aceh (1873), di tepi gunung Rima Jeune, ada jalan utama penduduk yang menghubungkan Peukan Aceh (Banda Aceh) dengan Gampong Rima Jeune hingga ke Gampong Lamihong. Jalan utama juga menjadi lintasan pasukan Kolonial Belanda saat menyerang pasukan Kerajaan Aceh. Sementara itu, pada masa kolonial Jepang (1942-1945), jalan baru di buat tepat di tepi sisi sebelah timur sungai mati atau saat ini disebut sebagai jalan Banda Aceh-Meulaboh.

1. Wawancara

Wawancara terfokus dengan narasumber Abdul Rahman (83) pada tanggal 13 Juni 2019 lalu menceritakan bahwa sebelum ada Gampong Rima Jeune, wilayah ini bergabung dengan Gampong Rima Keunerun. Sekitar tahun 1960-an, penduduk Rima memisahkan diri membentuk pemerintahan gampongnya sendiri dengan nama Gampong Rima Jeune seperti yang kita kenal sekarang.



Gambar 10.

Wawancara dengan Abdul Rahman (83), tokoh masyarakat Gampong Rima Jeune
(Sumber: Penulis, 2019)

Dari sisi administrasi pemerintahan kemukiman, warga menyebutkan baik pada masa bergabung dengan Gampong Rima Keunerun hingga berdiri menjadi Gampong Rima Jeune, penduduknya disini tunduk dalam aturan administrasi Kemukiman Gurah. Gurah sendiri, salah satu lokasi toponim kuno terkait kehidupan seorang pejabat menteri Kerajaan Aceh Darussalam yang bertanggungjawab di bidang hasil laut dan perkebunan (BPCB Aceh, 2018). Pusat kemukiman Gurah berada sekitar 1,52 kilometer dari Meunasah Gampong Rima Jeune.



Gambar 11.

Koneksi jalur lama antara Gampong Rima Jeune dengan Kompleks Makam Maharaja Gurah,
Gampong Gurah, Kecamatan Peukan Bada, Aceh Besar
(Sumber: Google Eart, 2019; dimodifikasi penulis, 2019)

Khusus pada masa kolonial Belanda (sebelum kedatangan Kolonial Jepang Tahun 942), kehidupan ekonomi penduduk umumnya bertani dan kebun serta memelihara hewan ternak. Lahan sawah dijadikan sumber pangan (beras) dan kebun di tanami cabe, pepaya, ada juga 6 buah pohon cengkeh. Sebelum kejadian Tsunami (2004) rumah warga tidak begitu ramai. Abdul Rahman (83) menyebutkan, rumah warga ketika itu tidak lebih dari 30 buah rumah. Ukuran rumah umumnya besar, di huni 5 sampai 6 Kepala keluarga, berbentuk rumah panggung seperti model rumah Melayu saat ini. Untuk memenuhi kebutuhan air bersih, penduduk membuat sumur galian berbentuk bulat, dindingnya diberi susunan batu sebagai penahan tanah dengan kedalam 3-4 meter. Di perkampungan Rima Jeune ada beberapa sumur tua (di kenal dengan sebutan sumur batu “*mon batee*”), seperti di samping meunasah (sumur ini sudah di tutup), di halaman rumah warga tepat depan Meunasah (sudah tidak di fungsikan lagi) dan ada sumur di kebun warga. Semua sumur tersebut difungsikan atau digunakan sebagai sumber air bersih bersama, baik yang letaknya di perkampungan maupun sumur yang letaknya di lahan kebun.



Gambar 12.
Sumur Kuno di Kebun salah seorang warga Gampong Rima Jeune
(Sumber: koleksi pribadi 2019)

Penduduk Rima Jeune, lebih menyenangi menggunakan jalan yang dibuat masa kolonial Jepang (1942-1945) yang saat ini disebut sebagai jalan Banda Aceh-Meulaboh. Melalui jalan ini, warga ada yang berjalan kaki dan mengendarai sepeda angin menuju Peukan Aceh di sebelah barat Mesjid Raya Banda Aceh. Bagi warga yang berjalan kaki maupun yang naik sepeda membawa barang dagangan seperti sayuran dan buah buahan (mangga, pepaya, ubi dan sebagainya). Jika berjalan kaki, penduduk meninggalkan desa dari jam 3 dini hari ke arah utara dan tiba di peukan Aceh pada jam 7 pagi. Adapun yang bersepeda, berangkat pagi hari dan menjelang siang sudah tiba dengan menghabiskan waktu perjalanan sekitar 1,5 jam. Saat pulang dari Peukan Aceh, warga membawa belanjaan memenuhi kebutuhan rumah tangganya, seperti, kain, ikan, dan kebutuhan lain yang tidak tersedia di gampong.

2. Data Literatur

Data literatur tentang Gampong Rima Jeune, paling tertua merupakan



Gambar 13.

Peta Aceh Besar sejauh ditempati oleh pasukan Belanda pada bulan Oktober 1876. Tahun pembuatan 1876, Koninklijke Bibliotheek (Sumber: Koninklijke Bibliotheek, <https://www.geheugenvannederland.nl/nl>, 2019)



Gambar 14.

Peta Aceh Besar. Pembuat Inrigting Topografi, Den Haag. Penerbit: Top. Pendirian Tahun pembuatan 1876.

Legenda Skala 1: 50.000

(Sumber: <https://www.geheugenvannederland.nl/nl>, 2019)

Gambar 13 yang dibuat tahun 1876 menjelaskan bahwa telah ada penduduk di Gampong Rima Jeune. Jalan kuno desa berada di tepi bukit sekarang, pada masa lalu dipergunakan warga Aceh Besar dan juga lintasan pasukan Belanda menuju Lampisang, Lamlhong dan wilayah Barat-Selatan lainnya.



Gambar 15.

Lingkaran biru adalah lokasi Gampong Rima saat ini

Pada peta 14 yang juga dibuat kolonial Belanda Tahun 1976, memperlihatkan perkampungan Gampong Rima Jeune saat ini, menjadi lintasan pasukan kolonial Belanda menguasai jalan-jalan strategis pada saat perang dengan Kerajaan Aceh Darussalam.



Gambar 16.

Lingkar biru adalah lokasi
Gampong Rima Jeune saat ini

Dari kedua peta paling jelas memperlihatkan keberadaan perkampungan di Rima Jeune berada di bawah kendala administrasi Mukim XXV. Pusat mukim berada di Gurah yang pada era kerajaan salah satu lumbung padi dan penyangga ekonomi Kerajaan Aceh Darussalam.

Pembahasan

Hasil dari observasi lapangan, wawancara dan penelusuran dokumen menjelaskan 3 (tiga) hal, yaitu: (1) untuk sementara kita bisa melihat sejarah okupasi Gampong Rima Jeuneu, (2) dari sejarah okupasi yang membentuk pola pemukiman saat ini dapat dilihat motif yang menjadi latar belakangnya, dan (3) nilai penting situs Gampong Rima Jeune jika di lihat dari keletakan strategisnya di dekat pusat Kerajaan Aceh Darussalam.

1. Sejarah okupasi Gampong Rima Jeune

Data lapangan dari pengamatan lingkungan kuno diketahui tampakan situs Gampong Rima Jeune, Kecamatan Peukan Bada, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh adalah sebagai berikut:



Gambar 17.

Peta Situs dan sebaran tinggalan objek arkeologis di Gampong Rima Jeune

Pusat tinggalan arkeologis berada di tanah gundukan, sebelah utara perkampungan. Pada saat ini, lokasi tersebut merupakan areal kebun warga dan baru beberapa tahun ini telah di bangun beberapa rumah disekitarnya.

Dari sudut pandang elevasi, dipastikan keletakan objek arkeologis era Kerajaan Aceh Darussalam ini lebih tinggi dari tanah sekitarnya, mencakup areal sekitar +419 meter persegi. Lalu, pada perkembangan berikutnya, luas areal permukiman menjadi +1.290 meter persegi menjelang sebelum perang Kerajaan Belanda-Kerajaan Aceh Tahun 1873. Beberapa fitur arkeologis, bukti perluasan tersebut seperti keberadaan sumur-sumur di dekat meuansah Jeune saat ini.



Gambar 18.

Batang dari tanaman Jeune

Dari sudut pandang elevasi, dipastikan keletakan objek arkeologis era Kerajaan Aceh Darussalam ini lebih tinggi dari tanah sekitarnya, mencakup areal sekitar +419 meter persegi. Lalu, pada perkembangan berikutnya, luas areal permukiman menjadi +1.290 meter persegi menjelang sebelum perang Kerajaan Belanda-Kerajaan Aceh Tahun 1873. Beberapa fitur arkeologis, bukti perluasan tersebut seperti keberadaan sumur-sumur di dekat meunasah Jeune saat ini.

Sejarah okupasi situs ini asalnya dari digunakannya jalur sungai dari muara di Ujung Pancu dan Uleelhe sebagai pusat kerumunan manusia era awal kerajaan Aceh, adalah sumber tenaga manusia untuk membuka ladang-ladang lada dan memperkuat produksi beras yang sangat laku di pasaran dunia saat itu. Dengan maraknya permintaan lada dan besar di pasar internasional dan dukungan Sultan Aceh serta dukungan pemerintahan mukim memberikan kesempatan penduduk di hulu (Uleelheu dan Ujung Pancu) memasuki sungai-sungai mati, mencari jalan membuka membuka lahan baru perkebunan lada dan peraswahan. Dengan dukungan lingkungan ekosistem air payau dimana vegetasi sagu melimpah dan tanah yang subur baik di dataran dan pegunungan menjadikan Rima Jeune menjadi salah satu tempat migrasi penduduk tersebut. Sementara proses menanam lada dan membuka lahan persawahan dilakukan, kemungkinan mereka memanfaatkan sagu yang banyak itu sebagai asupan karbohidrat.

Ketika pembukaan hutan dilakukan, para migran ini memberikan nama kepada daerah ini dengan nama familiar sesuai kehidupan mereka yang sangat paham kehidupan pesisir. Dan, penamaan Gampong Rima Jeune (“rima” untuk rimba/hutan dan “jeune”) menegaskan populasi tumbuhan menjalar yang dinamakan Jeune sebagai tumbuhan yang gungsional untuk mendapatkan ikan secara cepat ketika itu. Jeune merupakan tumbuhan menjalar yang akarnya bisa digunakan sebagai racun ikan dengan cara mengambil akar jeune, mencucinya dengan air dengan komposisi tertentu dan menaburkan pada cakupan areal populasi ikan yang menjadi target. Tidak lama setelah air mengandung racun jeune di tabur, ikan-ikan di tempat tersebut kemudian mengambang dalam keadaan pingsan. Sebagai bahan racun ikan, opulasi tanaman Jeune ini cukup tinggi dan hidup di sekitar pegunungan Gampong Rima Jeune saat itu.

Temuan berbagai tinggalan arkeologis beserta konteksnya yang ada di Gampong Rima Jeune merupakan dasar memperjelas asal usul okupasi tempat ini. Meskipun bukti arkeologis yang sampai pada kita belum begitu banyak tetapi data-data tersebut cukup menjelaskan sejarah okupasi manusia di masa lampau.

Data menjelaskan bahwa dasar awal okupasi manusia ke Rima Jeuneu tidak lain dari meluasnya aktivitas manusia dalam memproduksi hasil perkebunan lada yang menjadi primadona pasar internasional ketika itu. Lada ketika itu merupakan tanaman yang menjadi alat tukar internasional pada era kemakmuran Kerajaan Aceh.

Disebutkan bahwa hasil tanaman lada yang dimonopoli Sultan dan merupakan alat tukar terpenting untuk memperoleh mata barang perdagangan berharga lain, yaitu, timah yang di gali di seberang Selat Malaka (Aboe Bakar, 2018: 12).

Berkat aliran sungai pasang surut yang muaranya di di Uleelheu dan Ujung Pancu, terhubung hingga ke Gampong Rima Jeune dan Gampong Lampisang menjadi pintu masuk para petani lada memasuki rimbanya yang juga kaya dengan tanaman-tanaman kayu saat itu. Sungai pasang surut menjadi medium lalu lintas dari muara ke hulu, menghubungkan kehidupan muara di Uleelheu (Gampong Pande dan sekitarnya) dan Ujung Pancu (Indra Purwa/Pansur) yang memang kaya dengan bukti-bukti sebelum kerajaan Aceh berdiri dengan lingkungan alamiah di sekitar Gurah, Rima Keunerun, Rima Jeune, dan Lampisang.

Pembentukan permukiman pun di mulai bersamaan di bawanya barang-barang pribadi para peladang tersebut seperti barang mahal keramik biru putih yang terkenal sebagai barang dagangan sejak abad 13-15 Masehi, dibawa bersama dengan keramik batuan dari Vietnam, Thailand dan barang-barang tembikar telah menjadi komoditi di pesisir. Barang-barang ini ditemukan di Gampong Rima Jeune walaupun persentasi masih sedikit. Namun, tinggalan arkeologis ini menjadi petunjuk yang sangat baik akan koneksi pesisir dan hulu saat itu.

Era kemakmuran penduduk di Gampong Rima Jeune dengan komoditas lada serta persawahannya yang produktif sekitar abad ke-16-17 Masehi, meningkatkan kemampuan membeli arang-barang berharga. Salah satu produk berharga tersebut adalah memesan nisan-nisan yang besar, terbat dari batu pasir yang diukri dan beberapa diantara di tulisi kaligrafi yang indah.

Nisan-nisan kuno yang berat mencapai 200 kilogram sampai 300 kilogram yang tentu sangat sulit dibawa dengan jalan darat; apalagi mengingat kondisi rawa dan hutan pegunungan yang masih rapat, jelas menjadi rintangan alamiah mengorganisir transportasinya. Namun dengan kemakmuran ekonomi, orang-orang kaya dapat memobilisasi tenaga manusia, sarana transportasi, dan berbagai kebutuhan lainnya untuk menghadirkan nisan-nisan tersebut ke tempatnya.

Problem jalur transportasi diselesaikan dengan pertolongan air pasang surut; sementara untuk angkutan nisan-nisan yang berat tersebut dituntaskan dengan membawa menggunakan perahu, mengikuti siklus air pasang surut yang sangat dipahami masyarakat saat itu. Proses inilah yang menyebabkan nisan-nisan yang beratnya antara 200-300 kilogram ini bisa dibawa orang-orang kaya yang pernah ada di Gampong Rima Jeune.

Gampong Rima Jeune memiliki potensi geografis yang strategis bagi Kerajaan Aceh Darussalam. Beberapa keunggulan geografis tersebut, antara lain: (1) jarak posisi antara Gampong Rima Jeune dengan pusat Kerajaan yang tidak jauh sekitar + 7 kilometer orientasi ke arah utara serta lahan yang subur dan memiliki media transportasi darat dan sungai yang baik, menjadikan Rima Jeune serta daerah sekitarnya seperti, Rima Keunerun, Lampisang sebagai tulang punggung perkebunan dan pertanian;

(2) keberadaan penduduk yang bermukim di areal ini mendapatkan perhatian dari kerajaan sehingga menempatkan pejabat menteri tinggal di Gurah, sebuah lokasi yang jaraknya tidak lebih 2 kilometer dari Gampong Rima Jeune. Penduduk sangat penting bagi sebuah kerajaan karena tidak hanya menjadi tulang punggung ekonomi, tetapi juga tulang punggung militer. Kemungkinan besar, penduduk areal di bawah kendali Maharaja Gurah ini, turut sebagai kekuatan militer kerajaan Aceh yang sewaktu-waktu bisa dipanggil. Dengan demikian, dapat disimpulkan ada 2 (dua) nilai penting yang menjadi strandar pemikiran pembentukan Gampong Rima Jeune bagi Kerajaan Aceh yakni sebagai tulang punggung ekonomi (lada dan padi) dan kebutuhan tenaga militer bagi kerajaan.

2. Nilai Penting Situs Gampong Rima Jeune

Keberadaan nisan-nisan kuno dengan tipe Aceh Darussalam ada di tempat ini. Dari segi bentuk, bahan dan gaya, dapat dipastikan penggunaan nisan terjadi pada abad ke-17 Masehi hingga abad ke-18 Masehi. Nisan abad ke-17 Masehi ini sejaman dengan gaya atau model nisan yang ada di Situs Kompleks Maharaja Gurah, Gampong Gurah, Kecamatan Peukan Badan, Kabupaten Aceh Besar yang berjarak sekitar 1,52 kilometer dari Gampong Rima Jeune.



Nisan Makan Maharaja Gurah



Nisan E di Gampong Rima Jeune

Gambar 19.

Membandingkan nisan Maharaja Gurah dengan Nisan E yang ada di Gampong Rima Jeune
(Sumber: Koleksi pribadi)

Tipe nisan ini sangat umum digunakan pada era kerajaan Aceh saat mencapai kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda (1607-1636 Masehi). Mengenai nisan E yang ada di Gampong Rima Jeune menjelaskan hubungan antara Gurah dan Rima Jeune di masa lalu. era tersebut adalah ketika perluasan kebun-kebun lada di galakkan untuk memasok kebutuhan lada dunia. Nisan yang lebih muda sekitar abad ke-18 sampai abad ke-19 Masehi dapat dilihat dari nisan A, B, C dan E. Nisan-nisan ini adalah nisan era pemerintahan Sultanah di Kerajaan Aceh sampai sebelum perang dengan Kolonial Belanda Tahun 1873 Masehi.

Data menarik datang dari temuan fragmen keramik, stoneware dan tembikar serta tradisi lisan masyarakat mengenai sungai pasang surut yang kini tidak berfungsi lagi. Menurut tuturan masyarakat sungai tersebut dahulu dijadikan salah satu sarana transportasi menuju muara yang ada di Uleelhe (Banda Aceh) dan muara di ujung Pancu (Peukan Bada, Aceh Besar). Berdasarkan pengamatan fragmen keramik dan hasil wawancara dengan warga diketahui bahwa temuan fragmen keramik biru putih cukup banyak dan selalu ditemukan jika warga menggali 0 sekitar 1 sampai 2 meter. Bahkan warga meyakini sebelum ada gampong ini, dahulunya bagian dari laut dan pernah ada bangkai kapal yang diabadikan namanya pada salah satu petak sawah di Gampong Rima Jeune. Dari berbagai data di atas, secara arkeologis keberadaan nisan-nisan kuno, fragmen tembikar, stoneware dan keramik serta sumur-sumur tua menunjukkan bahwa okupasi manusia di tempat ini sudah berlangsung sangat lama. Apalagi jika memasukkan referensi terkait cerita rakyat maka usia perkampungan ini lebih tua dari yang dibayangkan.

Tabel 6.
Riwayat okupasi penduduk di Gampong Rima Jeune
berdasarkan hasil wawancara lapangan

Fase	Tahun	Bukti arkeologis	Penjelasan
Masa Ujung Pancu (Lamuri/Fansur/Indrapurwa) atau sebelum kerajaan Aceh	Sebelum abad 16 Masehi	Lingkungan kuno, Fragmen keramik biru putih dan tradisi lisan	Sungai pasang surut jadi habitat sagu sebagai sarana lalu lintas yang menghubungkan peradaban di Ujung Pancu dan Uleelheu
Kerajaan Aceh	Antara abad 17-18 M	Nisan Kuno dan Keramik	Penghunian awal ini terkait dengan kegiatan Maharaja Gurah yang memperluas perkebunan lada di Mukim XXV
Kolonial Belanda	1874/1876-1942	Peta Tahun 1876, sejarah lisan	Kegiatan militer Kolonial Belanda
Jepang	1942-1945	Pembuatan dasar jalan Banda Aceh-Meulaboh, sejarah lisan	Saksi hidup
Modern	1945-sekarang		

Berdasarkan pemahaman kronologis di atas, kedudukan tinggalan arkeologis di Gampong Rima Jeune merupakan data yang sangat penting untuk menjelaskan kehidupan masyarakat sekitar Bandar Aceh Darussalam di masa lampau. Koneksitas antara pusat kerajaan dan tempat-tempat pinggirannya dan hubungan fungsionalnya, jelas menopang kehidupan ibukota kerajaan Aceh dalam jangka waktu yang lama.

Penutup

Data arkeologis dan historis yang diperoleh melalui wawancara tentang Gampong Rima Jeune, Kecamatan Peukan Bada, Kabupaten Aceh Besar, jelas membuktikan merupakan satu dari sekian banyak gampong-gampong kuno era Kerajaan Aceh Darussalam yang masih eksis sampai hari ini. Mempelajari kekunoannya, menjelaskan sejarah budaya, memahami asal migrasi penduduknya, akan sangat bisa memperkuat identitas diri. Demikian juga bahwa lokasi ini layak dijadikan sebagai bahan belajar lapangan untuk diketahui generasi dan situsnya layak untuk dilestarikan serta dikembangkan dan dimanfaatkan berbagai kepentingan.

- Ajis, Ambo Asse, 2017. Ramni–Ilamuridesam: Kerajaan Aceh Pra–Samudera Pasai. Berkala Arkeologi. Sangkhakal VOL. 20 NO. 2 / 2017. Medan: Balai Arkeologi
- , 2017. Kamper sebagai Cagar Budaya Dunia: Sebuah Pemikiran Awal. Majalah Kebudayaan Volume 12, Nomor 2, Desember 2017. Jakarta: Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan Dan Kebudayaan Balitbang Kemdikbud
- Bakar, Aboe, 2018. Kekayaan Aceh (De Rijkdom van Atjeh). Serin Informasi Aceh XXXXI Nomor 2, 2018, Cetakan ke-2. Banda Aceh: Pusat Dokumentasi dan Informasi Aceh
- Dasgupta, Arum K. 1962. Acheh in Indonesian Trade and Politics: 1600-1614 Masehi.
- Koenigswald (1953), "Das Neolithicum der umgebung von Bandung" TBG,75 Coedes, George. 2014. Kedatuan Sriwijaya. Edisi Kedua. Jakarta: Komunitas Bambu. -----, 2017. Asia Tenggara Masa Hindu-Budha. Edisi ke-2. Jakarta: Komunitas Bambu.
- Guilliot, dkk, 2017. Barus Seribu Tahun yang lalu. Edisi kedua. Kepustakaan Populer Jakarta: Gramedia
- Guillot, Claude. 1998. Lobu Tua: Sejarah Awal Barus. Jakarta: Yayasan Obor.
- Hall, D. G. E. 1950. Sejarah Asia Tenggara. Surabaya: Usaha Nasional.
- Hall, Kenneth, R. 2011. A History of Early Southeast Asia Maritime Trade and Societal Development, 100–1500. Rowan & Littlefield Publishers, Inc..
- Ibrahim, Husaini. 2016. Laporan Zonasi Kawasan Cagar Budaya Lamuri. Universitas Syiah Kuala: Laporan Penelitian. Tidak diterbitkan
- Keram, Kevonian, 2014. "Suatu Catatan Perjalanan di Laut Cina Dalam Bahasa Armenia." Dalam buku Lobu Tua: Sejarah Awal Barus, edited by Claude Guillot, translated by Daniel Perret, 37-126. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia bekerja sama dengan Ecole francaise d'Extreme-Orient dan Pusat Penelitian Arkeologi Nasional.
- Lombard, Denys. 2014. Kerajaan Aceh Zaman Sultan Iskandar Muda (1607-1636). Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia
- McKinnon, E. Edward. 1988. "Beyond Serandib: A Note on Lambri at the Northen Tip of Aceh." Indonesia
- Mohammad Said, 1984. Aceh Sepanjang Abad Jilid I. Medan: Waspada
- Moleong, Lj. 2005. Metodologi Penelitian Kualitatif. Edisi Revisi. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Anthony Reid. 1992. Asia Tenggara Dalam Kurun Niaga 1450-1680, Jilid I: Tanah Di Bawah Angin. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

-----, 1999. Dari Ekspansi Hingga Krisis II. Jaringan Perdagangan Global Asia Tenggara 1450-1680. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya

<http://kkn-unsyiah-rimajeneu-peukanbada.blogspot.com/2014/03/laporan-akhir-kkn-unsyiah-2014-gampong.html> pada tanggal 12 Juni 2019.

<https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpcbaseh/kompleks-makam-maharaja-gurah-yang-mewah-dan-kedudukan-historisnya-yang-istimewa>, diakses pada tanggal 13 Juni 2019

<https://www.geheugenvannederland.nl/nl>, diakses pada tanggal 14 Juni 2019

50 kiri 21 kananPemanfaatan dan Analisis Nilai Penting Terhadap Masjid Teungku Di Anjong Peulanggahan, Kota Banda Aceh

Oleh: Arisnawati
arisnawati750@gmail.com

ABSTRACT

This article is titled "Utilization and Analysis of Important Values for Teungku Di Anjong Mosque Peulanggahan, Banda Aceh City". This paper is to discuss the existence of a historic, mosque namely Teungku Di Anjong Mosque as one of the buildings of Islamic Archeology in Banda Aceh. The purpose of research for to find out the extent to which the community uses the Teungku Di Anjong mosque as one of the ancient mosques in Aceh, as well as any important values that can be used as the basis for conservation and utilization efforts. This study uses a qualitative research method with a CRM (Culture Resource Management) research model approach. Based on the results of the study indicate that the Teungku Mosque in Anjong is still being used and utilized by the local community to date. However, the utilization is still not optimal and has not received full attention from the parties concerned. Considering, this mosque has a number of important values both historical, educational, social, religious and architectural value with its distinctive shape, then the existence of the Teungku Di Anjong mosque should continue to be developed and preserved in order to realize maximum utilization.

Keywords: *Teungku Di Anjong Mosque, Utilization, Preservation, Important values, Islamic Archeology*

ABSTRAK

Tulisan ini berjudul "Pemanfaatan dan analisis nilai penting terhadap masjid Teungku Di Anjong Peulanggahan, Kota Banda Aceh". Tulisan ini untuk membahas mengenai keberadaan masjid bersejarah, yakni Masjid Teungku Di Anjong sebagai salah satu bangunan Arkeologi Islam di Banda Aceh. Tujuan penelitian untuk mengetahui sejauh mana masyarakat memanfaatkan masjid Teungku Di Anjong sebagai salah satu masjid kuno di Aceh, serta nilai penting apa saja yang dapat dijadikan sebagai dasar upaya pelestarian dan pemanfaatan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan model penelitian CRM (Culture Resource Management). Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Masjid Teungku Di Anjong hingga saat ini masih terus difungsikan dan dimanfaatkan oleh masyarakat setempat. Namun demikian, pemanfaatan tersebut masih belum optimal dan belum mendapatkan perhatian penuh oleh pihak-pihak terkait. Mengingat, masjid ini memiliki sejumlah nilai penting baik sejarah, pendidikan, sosial, religius dan nilai arsitektural dengan bentuknya yang khas, maka harusnya keberadaan masjid Teungku Di Anjong terus dikembangkan dan dilestarikan agar terwujudnya pemanfaatan secara maksimal.

Kata kunci: *Masjid Teungku Di Anjong, Pemanfaatan, Pelestarian, Nilai Penting, Arkeologi Islam*

Aceh merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki sejarah panjang dalam perjuangan melawan penjajahan yang unik dan heroik. Aceh dalam literasi-literasi terdahulu juga disebutkan memiliki beragam peninggalan yang merefleksikan jejak-jejak perjuangan yang dapat ditemukan dalam berbagai bentuk yang didominasi seperti, makam-makam para syuhada, benteng-benteng dan bangunan masjid-masjid. Dalam Islam masjid merupakan tempat yang penting tidak tergantung pada ukuran, lokasi, maupun pendirinya, masjid adalah simbol agama, di mana ada masjid maka terdapat umat muslim, bangunan masjid memiliki aspek keagamaan dan sosial, aspek agama sendiri terlihat dari fungsinya sebagai tempat ibadah, sedangkan aspek sosial terlihat dari fungsinya sebagai tempat musyawarah, tempat belajar, hingga perkembangan kebudayaan.

Secara bahasa masjid berasal dari bahasa Arab, kata pokoknya "*Sujuddan*" fi'il madhinya yang berarti awalan "*ma*" sehingga menjadi isim makan, kemudian menyebabkan perubahan bentuk *sa-ja-da* menjadi *masjidu* atau masjid. Masjid merupakan sarana ibadah yang penting bagi umat Islam, masjid memiliki kedudukan yang tinggi dalam kehidupan masyarakat untuk mendekatkan diri kepada Allah. Selain itu, pada masanya masjid juga berfungsi sebagai pusat pemerintahan dan benteng pertahanan seperti masjid-masjid kuno yang terdapat di Aceh.

Masjid-masjid kuno yang dijumpai di pesisir Aceh baik pantai timur maupun barat menjadi salah satu peninggalan arkeologi Islam, yang merupakan aset yang perlu diselamatkan dan dilestarikan sebagai bukti peradaban Islam di Aceh agar tidak punah. Masjid kuno yang dapat dijumpai saat ini di antaranya masih digunakan sesuai dengan fungsinya, seperti masjid Baiturrahman, masjid Baiturrahim, masjid Indrapuri, masjid Teungku Di Anjong dan lainnya, yang dapat memberikan informasi seputar perkembangan kebudayaan Islam di Aceh dan Nusantara.

Keberadaan masjid memang tidak terlepas dari aspek pendidikan umat Islam, sehingga melahirkan tokoh-tokoh besar dan berpengaruh terhadap perjuangan masyarakat Aceh dalam usaha melawan penjajahan. Masjid Teungku Di Anjong merupakan salah satu contoh pada masanya masjid mempunyai peranan penting untuk menyiapkan strategi dakwah sekaligus sebagai markas menggerakkan semangat melawan penjajah yang diawali dari masjid. Keberadaan masjid Teungku Di Anjong juga berkaitan erat dengan perjalanan seorang ulama pengembang ajaran Islam di Aceh yaitu Sayid Abu Bakar bin Hussain Bilfagih atau dikenal dengan Teungku Di Anjong.

A. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka yang menjadi rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana sejarah Masjid Teungku Di Anjong?
2. Bagaimana deskripsi bangunan Masjid Teungku Di Anjong?
3. Apa sajakah yang menjadi nilai penting Masjid Teungku Di Anjong?
4. Bagaimana pemanfaatan Masjid Teungku Di Anjong pada masa berdiri hingga kini?

Metode

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, dan memakai model penelitian CRM (*Culture Resource Management*). Namun demikian, peneliti lebih cenderung mengkaji sejarah dan nilai penting serta potensi pemanfaatan Masjid Teungku Di Anjong sebagai salah satu bangunan peninggalan Islam, maka penelitian CRM ini lebih tepat disebut penelitian yang bersifat terapan, yaitu suatu jenis penelitian yang lebih menekankan pada aspek manfaat untuk memenuhi kebutuhan praktis. Sumber data dalam penelitian ini berasal dari hasil observasi dan penelitian perpustakaan (*library research*), dan didukung dengan dokumentasi. Pemanfaatan bangunan peninggalan Islam yang bernilai historis arkeologis harusnya dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat. Hal ini di karenakan tempat peninggalan tersebut dapat dimanfaatkan seluas-luasnya untuk kepentingan masyarakat. Melalui penelitian CRM ini dirasa dapat menjawab terkait pemanfaatan Masjid Teungku Di Anjong pada masa awal berdiri dan saat ini.

A. Sejarah Mesjid Teungku Di Anjong

Masjid Teungku Di Anjong merupakan salah satu bangunan masjid kuno yang terletak di Kampung Peulanggahan, Kecamatan Kuta Raja, Kota Banda Aceh. Masjid ini dapat dikatakan cukup penting pada masa kerajaan Aceh, seperti yang telah disebutkan oleh Snock Hurgronje bahwa Masjid Teungku Di Anjong terletak dalam wilayah pemukiman Kampung Jawa, pada zaman sebelum perang Aceh kampung ini merupakan pusat dari sejumlah kampong-kampong yang kaya dan penting. Selanjutnya, Snock Hurgronje dan Kreemer mengemukakan bahwa hingga akhir abad ke 19 M sebelum perang Kolonial Belanda di Aceh (1873-1912) pusat kota Kerajaan Aceh Darussalam dan Sagi XXVI mukim, yaitu sebagai pusat pendidikan dan pengajaran pokok-pokok ajaran Islam yang penting di Nusantara.

Mesjid Teungku Di Anjong dibangun pada masa kerajaan Aceh tepatnya pada tahun 1718 M, pada abad ke-18 oleh seorang ulama yang berasal dari Arab Saudi bernama asli Al-Habib Sayyid Abu Bakar bin Husein Bilfagih, asal keturunan dari Tarim Hadramaut, Yaman. Masjid ini dibangun dengan tujuan untuk mengembangkan ajaran Islam pada masa Sultan Alaidin Mahmud Syah, yang sekaligus merupakan anak didik (murid) yang begitu terkenal dan pernah dinobatkan untuk menjadi Sultan Aceh oleh Maha Raja Lela Melayu. Sebagai rasa terima kasih kepada gurunya, ia banyak menghadihkan berupa sebidang tanah bahkan di banyak tempat di Aceh seperti; Peulanggahan, Lampeuneurut, Aceh Besar dan Peukan Pidie Kabupaten Pidie.

Dalam merealisasikan keinginan untuk mengembangkan ajaran Islam tersebut, maka beliau bersama masyarakat membangun rumah raya sebagai tempat pengajian sekaligus tempat mempelajari tentang agama Islam, bangunan rumah raya berada di halaman belakang kompleks tersebut. Selain rumah raya didirikan pula sebuah masjid atau disebut juga sebagai Dayah, pendirian masjid tersebut sebagai realisasi dari ajaran Islam untuk tempat melaksanakan ibadah. Di samping itu, juga berfungsi sebagai tempat diadakan pertemuan atau musyawarah dalam usaha melawan penjajah, bahkan pada zaman perjuangan kemerdekaan masjid ini pula pernah dijadikan markas perlawanan Belanda.

Sebelum mendirikan masjid, Teungku Di Anjong terlebih dahulu memanfaatkan rumahnya yang sangat sederhana sebagai tempat pengajian dan asrama bagi murid-muridnya yang ingin memperdalam agama Islam dan bermalam disana. Dengan perkembangannya semakin hari semakin pesat, rumahnya tidak dapat menampung murid-muridnya hingga kemudian dibangunlah masjid, yang dikenal dengan masjid Teungku Di Anjong sesuai dengan julukan yang diberikan masyarakat setempat yaitu Teungku Di Anjong (orang yang tinggi statusnya). Selain itu juga bermakna orang yang disanjung dan dimuliakan yang tinggi martabatnya dari segi agama dan adat.

Pemberian gelar tersebut merupakan tanda terima kasih masyarakat atas jasa-jasa yang telah dilakukannya untuk mengembangkan agama Islam. Teungku Dianjong wafat pada tahun 1782 dan dimakamkan disamping masjid atau pada sisi selatan bangunan masjid, berdampingan dengan makam istrinya, dan didirikan sebuah bangunan berbentuk kubah sebagai tanda penghormatan sehingga nama beliau diabadikan pada masjid tersebut. Teungku Di Anjong selain dikenal sebagai ulama tasawuf, juga sebagai ulama fikih dan telah membimbing manasik haji bagi calon-calon jamaah baik dari dalam wilayah kesultanan Aceh, Sumatera, Jawa, bahkan juga jamaah dari Semenanjung Malaya yang akan menunaikan ibadah haji melalui Aceh. Bisa dikatakan bahwa Aceh dikenal sebagai Serambi Mekah sangat erat kaitannya dengan peran Tengku Di Anjong dalam membimbing jamah haji dan mendapatkan dukungan kerajaan Aceh pada masa itu.

A. Deskripsi Bangunan Masjid Teungku Di Anjong

Masjid Teungku Di Anjong terletak di Desa Peulanggahan, Kecamatan Kuta Raja, Kota Banda Aceh. Masjid ini dibangun pada abad ke-18 oleh seorang ulama Arab yang bernama Sayid Abu Bakar Bin Husein Bilfaqih keturunan dari Tarim hadramaut, Yaman. Kompleks bangunannya terdiri dari masjid dan makam. Masjid Teungku Di Anjong tampil dengan bentuk sederhana dengan atap tumpang bersusun dua dengan berbentuk limas dan setiap tumpang adalah sebuah ruang yang memiliki ukuran yang berbeda-beda semakin keatas semakin kecil dan memiliki fungsinya masing-masing. Denah dasar masjid ini berbentuk persegi panjang berukuran $13,95 \text{ m} \times 9,28 \text{ m}$. Secara keseluruhan bangunan masjid ini bertingkat tiga yang setiap tingkatnya saling berhubungan.

Pada tingkat dasar terdapat ruang utama yang berdenah persegi empat berukuran $10 \text{ m} \times 9 \text{ m}$ dan terdapat serambi, di dalam ruang terdapat tiang-tiang 20 buah berbentuk persegi delapan. Terdapat Mihrab yang terbuat dari susunan batu bata Plaster bagian luar mihrab berbentuk persegi enam dan pada bagian atas terdapat pola geometris dengan bentuk segitiga meruncing. Pintu dan jendela pada lantai pertama bermodel belah dua yang berukuran 1 m. Pada bagian atas terdapat bilah-bilah kayu yang meruncing menyerupai tombak.

Pada tingkat kedua bangunan masjid, melalui sebuah tangga terbuat dari Kayu dan memiliki 13 anak tangga, memiliki ukuran $10 \times 8 \text{ m}$ ditopang dengan dua buah tiang keliling sebagai penguat struktur dinding. Ruang ini memiliki fungsi sebagai tempat pengajian baik anak-anak maupun dewasa. Pada tingkat ketiga berbentuk segi empat berukuran P; $4,75 \text{ m}$ dan L; $3,30 \text{ m}$, dinding ruang ini terbuat dari papan dan memiliki 8 buah jendela. Di tingkat ini terdapat 8 tiang berbentuk segi delapan yang merupakan bagian dari tiang segi delapan di ruang utama, atap masjid Teungku Dianjong bertingkat tiga berbentuk limas atau piramid. Bentuk ini mengikuti denah masjid yang persegi panjang.



Gambar 1.
Masjid Teungku Di Anjong Pada masa
awal berdiri.
Dok.aulia87.wordpress.com



Gambar 2.
Masjid Teungku Di Anjong tahun 2018
Dok.Penulis

Bangunan Masjid Teungku Di Anjong saat peristiwa tsunami melanda pada tahun 2004 lenyap tersapu ombak tsunami, dikarenakan masjid ini sendiri terletak di kelurahan Peulanggahan, kecamatan Kuta Alam, yang letaknya berdekatan dengan pesisir laut sehingga merasakan dampak kerusakan yang sangat dahsyat, dan hanya menyisakan makam Teungku Di Anjong dan istrinya Syarifah Fatimah Bin Sayyid Abdurrahman Al-Aidid. Beberapa tahun setelahnya masjid ini kembali dibangun pada tahun 2009 dengan konstruksi permanen dengan material beton. Dalam upaya pemugaran tersebut sempat terjadi konflik, yang terpecah menjadi dua kubu yakni adanya kubu pertama, yang menginginkan masjid dipugar dalam bentuk yang asli, sedangkan kubu kedua, menginginkan seandainya masjid tersebut dipugar dengan bentuk yang baru. Tentunya permasalahan ini menjadi sorotan karna mengancam nilai-nilai penting terutama historis dan arkelogis.

B. Nilai-nilai Penting Masjid Teungku Di Anjong Peulanggahan, Banda Aceh

Salah satu tahapan penting dalam pengelolaan sumber daya budaya adalah menetapkan nilai-nilai penting (*signifinace*) dari sumberdaya itu sendiri. Penetapan nilai-nilai penting itu sendiri menjadi sangat strategis karna hasilnya menjadi dasar menentukan langkah-langkah yang akan diambil. Berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat dideskripsikan bahwasanya Masjid Teungku Di Anjong memiliki beberapa nilai penting yang dapat dikelola dan dilestarikan keberadaannya, berikut ini analisis nilai-nilai penting yang terdapat pada Bangunan Masjid Teungku Di Ajong:

C. Nilai Penting Sejarah

Masjid ini memiliki peranan yang cukup penting sebagai sumber pengetahuan sejarah kepada generasi muda dalam rangka menanamkan rasa cinta dan bangga terhadap tokoh-tokoh besar seperti ulama. Masjid ini berkaitan erat dengan tokoh ulama yang datang ke Aceh pada abad 18 M tepatnya 1782. Tengku Di Anjong berperan dalam pengembang ajaran Islam di Aceh, dan juga sebagai ulama yang membimbing manasik bagi calon-calon jamaah Haji baik dari dalam wilayah kesultanan Aceh, Sumatera, Jawa, bahkan juga jamaah dari Semenanjung Malaya, yang akan menunaikan ibadah haji melalui Aceh.

Dalam membimbing jamaah manasik haji Tengku Di Anjong mendapatkan dukungan dari kerajaan Aceh, dan diperintah oleh Sultan Alaidin Mahmud Syah (1287-1290 H/1870-1874 M). Beliau merupakan raja yang arif dan alim terutama dalam hukum Islam dan menaruh minat terhadap pengembangan ajaran Islam pada masa itu, serta mendukung penuh dalam hal membangun masjid. Fungsi masjid bukan hanya sebagai tempat peribadatan dan juga pengajaran hukum Islam. Namun lebih dari itu, juga menjadi markas untuk melakukan musyawarah-musyawarah dalam melawan Kolonial pada masa mempertahankan kemerdekaan Indonesia.

D. Nilai Penting Ilmu Pengetahuan

Nilai penting ilmu pengetahuan karena potensinya yang dapat diteliti lebih lanjut terutama berkaitan dengan ilmu sejarah, antropologi, arkeologi, arsitektur, yang dapat mengarahkan beberapa penelitian. Berdasarkan nilai penting tersebut, maka layak dipertahankan dan dilestarikan dengan baik keberadaannya. Pemanfaatan Masjid Teungku Di Anjong dapat dilakukan seluas-luasnya terhadap pengembangan ilmu pengetahuan seperti yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang No.11 tahun 2010 tentang cagar budaya pada pemanfaatan pasal 85 ayat 1 bahwa Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan setiap orang dapat memanfaatkan cagar budaya untuk kepentingan agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata.

Bangunan masjid Teungku Di Anjong juga merupakan salah satu sumber ilmu pengetahuan sejarah yang dapat memberikan gambaran yang lebih kongkret kepada siswa/pelajar, para akademisi dan masyarakat umum terkait sumber informasi sejarah. Karena melalui situs bersejarah dianggap memiliki potensi sebagai media pembelajaran oleh sebab itu. Masjid ini memiliki peranan yang cukup penting sebagai sarana pendidikan kepada generasi muda dalam rangka menanamkan rasa cinta dan bangga terhadap tokoh-tokoh besar seperti ulama-ulama yang berperan penting pada masanya.

E. Nilai Penting Agama

Pada masjid ini terdapat nilai penting keagamaan terutama dalam perkembangan agama Islam di Aceh. Masjid ini digunakan sebagai pusat pengkajian ajaran Islam pada masanya. Dalam hal ini masjid Teungku Di Anjong juga masih digunakan oleh masyarakat setempat untuk kepentingan menjalankan peribadahan, kegiatan-kegiatan keagamaan, tempat pendidikan seperti dakwah atau pengajian oleh beberapa kelompok majelis, serta adanya ziarah kubur yang tidak dibatasi fungsi-fungsinya, dengan tetap menjaga kelestarian, keselamatan dan kebersihan masjid.

F. Nilai Penting Kebudayaan

Bangunan masjid Teungku Di Anjong sendiri merefleksikan kemegahan seni bangunan masjid-masjid kuno yang eksis pada masanya. Masjid sebagai sumber budaya memiliki unsur estetik atau unsur keindahan terkait dengan seni rupa, seni hias, seni bangunan maupun bentuk kesenian lainnya. Masjid Teungku Di Anjong juga dapat dimanfaatkan sebagai sumber inspirasi bagi para mahasiswa, seniman, sastrawan, penulis dan fotografer untuk dapat memanfaatkan kawasan cagar budaya sebagai obyek yang dapat membangkitkan kreativitas serta menghasilkan karya-karya budaya bernuasa religi baik di masa kini dan masa mendatang.

Hasil Penelitian

A. Pemanfaatan Mesjid Teungku Dianjong

Pemanfaatan adalah pendayagunaan suatu benda ataupun sebuah tempat untuk kepentingan individu, kelompok maupun bersama dengan tetap mempertahankan kelestariannya. Berbagai upaya pemanfaatan dan pelestarian peninggalan sejarah dan bangunan cagar budaya terus gencar dilaksanakan seperti di Mesjid Teungku Di Anjong, dikarenakan pelestarian adalah upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan cagar budaya dengan cara melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkannya. Dari definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan adanya pelestarian dan segala sesuatu yang berhubungan dengan warisan kebudayaan. Pelestarian dan pemanfaatan benda cagar budaya merupakan hal yang penting berdasarkan sifat-sifatnya, sesuai dengan amanat dari Undang-Undang.

Pada masa awal berdirinya Masjid Teungku Di Anjong dimanfaatkan sebagai tempat ibadah, pusat pendidikan, dan pengajaran pokok-pokok ajaran Islam, serta musyawarah yang langsung dipimpin oleh Sayid Abu Bakar bin Hussain Bilfagih. Selain itu, masjid ini juga difungsikan sebagai tempat pertemuan mobilisasi massa dalam usaha menggempur penjajah Belanda. Setelah Teungku Di Anjong meninggal dunia beliau dimakamkan disamping masjid tersebut dan sebagai penghormatan namanya diabadikan pada nama Masjid Teungku Di Anjong. Selanjutnya pada Abad ke 19 M hingga awal abad ke 20, masjid ini masih difungsikan dan banyak orang yang berziarah ke makamnya untuk menghormati Teungku Dianjong sebagai ulama atau untuk menunaikan nazar, sebagai ahli sufi Teungku Di Anjong dikenal memiliki karomah yang sangat banyak, beliau dianggap sebagai orang keramat atau dikeramatkan.

Kini setelah pembangunannya kembali seperti halnya masjid lain, masjid ini juga masih difungsikan di karnakan masih banyak aktivitas yang bisa dilakukan hingga saat ini, yaitu sebagai sarana tempat beribadah, pengajian, dan pengajaran agama islam yang rutin dilakukan oleh masyarakat setempat, serta adanya kegiatan sosial keagamaan masyarakat, dan tempat ziarah kubur yang terletak di halaman masjid. Selanjutnya adanya gerakan dakwah di masjid Teungku Di Anjong yang rutin dilakukan oleh majelis An-Nur Banda Aceh, asuhan Habib Haris bin Soleh Alaydrus, seperti adanya pembacaan Hadrah Basaudan pada Selasa sore, pembacaan Maulidurrsasul Addiyau Lami' dan Kajian Kitab Nailur Raja Syarah Safiatuunaja pada setiap malam jumat. Secara garis besar pemanfaatan Mesjid Teungku Di Anjong meliputi segi ilmu pengetahuan, penelitian, dan studi bernilai penting, sebagai contoh nyata bagi generasi muda Aceh, meskipun terdapat berbagai penambahan setelah pembangunan kembali yang disebabkan oleh peristiwa Tsunami yang melanda Aceh tahun 2004 lalu.



Gambar 3.
Pelaksanaan ziarah kubur di makam Teungku Di Anjong
Dok.Penulis



Gambar 4.
Pengajian rutin di masjid Teungku Di Anjong yang dipimpin oleh Habib Haris bin Soleh Alaydrus
Dok.Penulis

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan perlunya pemanfaatan Mesjid Teungku Di Anjong, agar dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya karena:

1. Masjid Teungku Di Anjong memberikan referensi informasi-informasi perkembangan sejarah Islam di Aceh, dan tokoh ulama besar pada masanya.
2. Representasi penguatan identitas budaya, jatidiri, belajar dan menghargai kejayaan bukti sejarah pada masa lalu.
3. Menyajikan nilai-nilai penting ilmu pengetahuan; sejarah dan kebudayaan.
4. Bentuk nyata dari penghormatan/penghargaan kita kepada pejuang-pejuang ulama dan menjadi tanggungjawab generasi masa kini untuk generasi masa depan agar turut menjaga dan melestarikan Masjid Teungku Di Anjong

Pentingnya pemanfaatan masjid Teungku Di Anjong dalam konteks pelestarian, ialah upaya untuk memberikan ruang, sekaligus peluang besar bagi masyarakat untuk terlibat aktif dalam upaya pelestarian yang tidak hanya sebatas untuk kepentingan akademik semata, tetapi harus meliputi kepentingan ideologi dan ekonomi agar masyarakat dapat merasakan manfaatnya. Salah satu potensinya dapat dilihat dari segi pariwisata, hal ini menjadi daya tarik bagi para wisatawan yang ingin melihat produk wisata religi unggulan yang memberikan pengalaman spiritual, dan berdampak pada perekonomian masyarakat setempat.

Potensi besar ini harus dikelola, baik lingkungannya ditata sedemikian rupa agar dapat menarik perhatian dan memberikan kenyamanan, menyediakan informasi dan promosi cagar budaya kepada masyarakat. Apalagi kalau memang berada pada lingkungan alam yang menarik dan eksotik akan mendukung berjalannya roda industri pariwisata di kota Banda Aceh.

Pemanfaatan masjid ini untuk kepentingan pariwisata juga dapat dikembangkan sebagai media rekreasi dan pariwisata yaitu pemanfaatan kawasan cagar budaya, untuk kepentingan sebagai obyek wisata Islami dalam pengembangan konteks wisata halal yang berlangsung di Aceh. Menjadi peluang yang perlu ditonjolkan dan memberi informasi kepada masyarakat berkaitan dengan sejarah Aceh berjudul “Serambi Mekkah”. Karena Aceh pernah menjadi pangkalan/pelabuhan haji menuju Mekkah dengan kapal laut, sebelum mengarungi Samudera Hindia, kampung-kampung sekitar Peulanggahanlah menjadi tempat persinggahan haji dulunya.

Untuk mewujudkan pelestarian dan pemanfaatan tersebut, maka upaya-upaya yang dapat dilakukan di antaranya, dapat mengidentifikasi dengan mengundang para stakeholder untuk menjadi mitra dengan adanya kalaborasi stakeholder, yaitu keterlibatan stakeholder dengan pendekatan partisipasi kolaboratif. Pendekatan ini digunakan dalam pembangunan yang melibatkan atau mengikutsertakan masyarakat dan stakeholder. Proses ini mencakup dari perencanaan awal, penyusunan konsep, dan implementasi sampai kepada pengelolaan terkait dengan pelestarian Mesjid Teungku Di Anjong.

Berkaitan dengan pelestarian dan pemanfaatan, maka diperlukan keterlibatan pihak-pihak terkait, yakni pada tingkat satu Pemerintah Daerah Provinsi Aceh, Pemerintah Kota Banda Aceh dalam hal ini dapat diwakili oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banda Aceh, Tingkat kedua Para Akademisi, LSM yang bergerak di bidang sejarah dan budaya, Balai Pelestarian Cagar Budaya Aceh, Balai Pelestarian Nilai Budaya Aceh, media, pengelola masjid, tokoh Agama. Kemudian, pada tingkat ketiga perangkat desa, organisasi kepemudaaan dan masyarakat setempat. Keterlibatan Pemerintah Daerah dalam pelestarian cagar budaya sebenarnya sudah diamanatkan dalam Undang-undang Cagar Budaya No. 11 Tahun 2010. Namun, berdasarkan penelitian menunjukkan bahwa lembaga-lembaga tersebut jarang menampilkan atau menyajikan nilai-nilai penting dari warisan budaya yang dikelola, demikian halnya dengan masjid dan situs makam Teungku Di Anjong yang masih minim menyajikan dan memberikan informasi tentang nilai penting dari keberadaan masjid dan makam-makam tersebut.

A. Kesimpulan

Memahami keberadaan tinggalan sejarah dan budaya serta kaidah-kaidah yang harus dipatuhi dalam pemanfaatannya, maka diharapkan pemanfaatan tetap dalam koridor pelestarian. Salah satu aspek dalam pengelolaan adalah legalitas, maka produk hukum baik yang berupa Undang-Undang maupun peraturan Pemerintah Daerah menjadi acuan utama. Pemanfaatan yang dimaksud merupakan pendayagunaan cagar budaya yang dilakukan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan tetap memperhatikan kelestariannya. Bangunan Masjid Teungku Di Anjong dalam kondisi terawat saat ini, masjid ini memiliki arti penting dari segi sejarah dan perjuangan pengembangan ajaran Islam di Aceh. Masjid ini memiliki andil yang besar dan sudah selayaknya dapat difungsikan sebagai objek penelitian, pembelajaran sejarah, agama, dan kebudayaan.

B. Saran

Masjid Teungku Di Anjong penting untuk terus dilestarikan. Berdasarkan hasil penelitian upaya-upaya pelestarian kawasan masjid ini dapat dikatakan telah berhasil. Namun, masih banyak aspek lainnya yang perlu diperhatikan khususnya kepada generasi muda yang belum mengetahui keberadaan masjid Teungku Di Anjong, maka dari itu dibutuhkan upaya promosi dan keterlibatan stakeholder. Dengan adanya keterlibatan pihak-pihak terkait diharapkan dapat potensi sumber daya budaya serta nilai-nilai pada masa lampau, masa kini, maupun mendatang dapat diapresiasi, agar berdampak positif kepada masyarakat luas.

Daftar Pustaka

- Direktorat Perlindungan dan Pembinaan, Masjid Kuno Indonesia, Proyek Pembinaan Peninggalan Sejarah dan Kepurbakalaan. Jakarta. 1998/1999.
- Ida Hasanah. Identifikasi Konflik Dalam Pemugaran Masjid Teungku Di Anjong di Kota Banda Aceh, Dalam Makalah Mata Kuliah Studi Kasus dalam Arkeologi Publik. Yogyakarta. 2009.
- Laila Abdul Jalil. Masjid-masjid Kuno di Aceh, Balai Pelestarian Cagar Budaya Banda Aceh. 2015.
- Mursyidah. Menelusuri Jejak Teungku Dianjong (Ulama pengembang ajaran Islam di Aceh), Dalam Buletin Arabesk No.1 Edisi XI. Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Banda Aceh. 2011
- Suaka Peninggalan Sejarah dan Purbakala Propinsi Daerah Istimewa Aceh dan Sumut. Laporan Penggambaran dan Pengumpulan Data Arkeologi Historis dan Teknis Bangunan Masjid Teungku Dianjong. Banda Aceh, 2002.
- Undang-Undang No.11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya
- , Laporan Pendataan Situs/bangunan Peninggalan Sejarah dan Purbakala di Kota Banda Aceh, Banda Aceh. 1991.
- Yudi Mulyadi. Merancang Model Pengelolaan Terpadu Dalam Pemanfaatan Situs-situs Makam Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Dalam Buletin Arabes Volume 02 No.1, Juni. 2018.
- Yudi Mulyadi. Mengelola konflik dalam pelestarian Cagar Budaya, dalam Buletin UMOLOLO, Volume IV No. 1: Balai Pelestarian Cagar Budaya Gorontalo. 2017

Internet

<https://bankdata.konservasiborobudur.org/wpcontent/uploads/2014/01/BEBERAPAPERMASALAHAN-PELESTARIAN.pdf>

LHOKNGA 1945-1949: MODAL PERJUANGAN DARI UJUNG BARAT SUMATERA

Oleh: Dede Semiawan
Seksi Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Balai Pelestarian
Cagar Budaya Aceh
Surel: verborheden@gmail.com

ABSTRACT

During the period of defending Indonesian independence, Lhoknga region appears as one area which able to withstand the onslaught of the Dutch aggression. The existence of Japanese war bases which had been taken over by Pesindo, had been able to withstand the Dutch dropping in from Sabang. Not only to defend the independence around the Lhoknga region, the assistance like soldiers, experts, bombs, and heavy weapons are sent from the war base to help the defending the demarcation line in the villages of Lalang, Binjai, Tanjung Pura, Gebang, and Pangkalan Brandan. This paper discusses how the war bases in Lhoknga were originally built by the Japanese to ward off allied attacks, then were taken over by the masses at the end of 1945 and were wholly carried out by the Pesindo people's army to defend Indonesian independence. In addition, the purpose of this paper is to explain how the role of this war base was carried out by the Pesindo people in maintaining Indonesian independence. During the first and second Dutch aggression, the Lhoknga war base became a battle area which was always bombarded and attacked by Dutch troops. Face to face with the Dutch war base in Sabang, causing the Lhoknga war base to be one of the first areas to be attacked because Dutch troops wishing to enter Aceh had to pass through the Lhoknga base. Under the leadership of Ali Hasjmy and Nyak 'Neh this war base had succeeded in holding Dutch troops from entering Aceh and at the same time the war base was sending bombs and artillery to prevent penetration of Dutch troops who wanted to enter Aceh through the eastern route of Sumatra.

Keywords: Lhoknga, Independence, Pesindo, War Base.

ABSTRAK

Tulisan ini berjudul “Pemanfaatan dan analisis nilai penting terhadap masjid Teungku Di Anjong Peulanggahan, Kota Banda Aceh”. Tulisan ini untuk membahas mengenai keberadaan masjid bersejarah, yakni Masjid Teungku Di Anjong sebagai salah satu bangunan Arkeologi Islam di Banda Aceh. Tujuan penelitian untuk mengetahui sejauh mana masyarakat memanfaatkan masjid Teungku Di Anjong sebagai salah satu masjid kuno di Aceh, serta nilai penting apa saja yang dapat dijadikan sebagai dasar upaya pelestarian dan pemanfaatan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan model penelitian CRM (Culture Resource Management). Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Masjid Teungku Di Anjong hingga saat ini masih terus difungsikan dan dimanfaatkan oleh masyarakat setempat. Namun demikian, pemanfaatan tersebut masih belum optimal dan belum mendapatkan perhatian penuh oleh pihak-pihak terkait. Mengingat, masjid ini memiliki sejumlah nilai penting baik sejarah, pendidikan, sosial, religius dan nilai arsitektural dengan bentuknya yang khas, maka harusnya keberadaan masjid Teungku Di Anjong terus dikembangkan dan dilestarikan agar terwujudnya pemanfaatan secara maksimal.

Kata kunci: Masjid Teungku Di Anjong, Pemanfaatan, Pelestarian, Nilai Penting, Arkeologi Islam

Lhoknga merupakan wilayah di Aceh yang berada paling barat dari pulau Sumatera, memiliki gugusan pantai yang indah. Lhoknga menjadi salah satu daerah pariwisata di Nanggroe Aceh Darussalam dengan pantai Lampuuk sebagai destinasi utama. Terletak tepat di ujung dari pulau Sumatera membuat daerah Lhoknga ini berhadapan langsung dengan samudera Hindia. Jauh sebelum terkenal pantai di Lhoknga. Pada masa pendudukan Jepang, Lhoknga dilirik sebagai tempat yang tepat untuk dibangunnya pangkalan perang disebabkan letak yang sangat strategis serta mudah dalam menghalau pihak sekutu jika mereka menyerang.

Jepang memulai ekspansinya ke daerah Aceh pada tanggal 12 Maret 1942 di tiga tempat yang berbeda yaitu Krueng Raba, Sabang, dan Peureulak. Pendaratan pertama mereka lakukan di wilayah Aceh Besar atau Krueng Raba, sekitar wilayah Uleelhee. Ketika mendarat di Aceh mereka disambut baik oleh rakyat Aceh¹. Penduduk yang telah mendengar kabar Jepang akan membebaskan mereka dari penjajahan Belanda ramai-ramai menyambut kedatangan Jepang yang disebut sebagai saudara tua. Golongan ulama merupakan salah satu golongan yang paling menyambut kedatangan Jepang, dikarenakan golongan ini yang paling membenci dan anti terhadap Belanda². Melalui organisasi Persatuan Ulama Seluruh Aceh (PUSA), maka sebelum pendaratan Jepang ke Aceh pihak PUSA dan uleebalang menghubungi Jepang yang berada di Malaya, antara bulan Januari dan Februari. Utusan dari PUSA ialah Teungku Syekh Abdul Hamid sedangkan dari golongan uleebalang ialah Teuku Muda dari Lhoksukon dan Teuku Ali Basyah dari Panton Labu³. Mereka datang menuju perwakilan Jepang untuk meminta bantuan agar mengusir keberadaan Belanda dari tanah Aceh.

Kekuatan yang dimiliki Jepang dan rakyat Aceh, membuat mereka dengan mudahnya berhasil mengusir Belanda dari wilayah Aceh⁴. Rakyat Aceh memberikan kepercayaannya kepada Jepang, dan dimanfaatkan Jepang untuk menyusun kekuatan mereka dengan merekrut pemuda-pemuda di Aceh untuk menjadi anggota militer Jepang, seperti *tokubetsu keisatsutai* (polisi khusus), *gyu gun* (tentara sukarela), *heiho* (serdadu pembantu)⁵.

¹T. Ibrahim Alfian, dkk., *Revolusi Kemerdekaan Indonesia Di Aceh (1945-1949)*, 1982, Aceh: Museum Negeri Aceh, hal. 9.

²A.J. Piekaar, *Aceh dan Peperangan dengan Jepang Bab 1* (terjemahan), dari Abu Bakar, 1977, Banda Aceh: Pusat Dokumentasi Dan Informasi Aceh, hal. 51.

³Nazaruddin Sjamsuddin, *Revolusi Di Serambi Mekah*, 1999, Jakarta: UI-press, hal. 42.

⁴Politik dua muka adalah politik yang dijalankan Jepang untuk memperdaya hulubalang dan Ulama lihat di A. Hasjmy, 50 tahun aceh membangun, 1995, Banda Aceh: Majelis Ulama Indonesia Daerah Istimewa Aceh, hal. 93.

⁵T. Ibrahim Alfian, dkk., *op.cit.* hal. 15.

Mereka semua merupakan pemuda pribumi yang dilatih Jepang secara serius agar nantinya matang apabila diperlukan sebagai tenaga bantuan untuk melawan sekutu. Tujuan Jepang ialah untuk kepentingannya dalam melawan sekutu, akan tetapi berkat pelatihan militer Jepang, orang-orang pribumi terutama di Aceh mulai dapat belajar bagaimana cara berorganisasi secara militer yang tidak didapatkan pada masa Belanda. Berbekal ilmu militer dari Jepang inilah nantinya ada beberapa orang pribumi yang akan memimpin peperangan dalam mempertahankan kemerdekaan di Aceh dan wilayah-wilayah lainnya.

Pada saat Jepang berkuasa di Aceh, Jepang memperkuat pertahanan militernya dengan membangun pangkalan angkatan perang di seluruh daerah Aceh terutama di tepi pantai. Dari keseluruhan pangkalan angkatan perang tersebut ada yang dibangun secara lengkap dan ada yang tidak lengkap. Kelengkapannya dapat dilihat dari keberagaman fasilitas yang berada di wilayah tersebut, ada yang hanya memiliki bunker, pos penjagaan, juga gudang senjata beserta amunisinya, dan ada juga wilayah yang memiliki lapangan terbang, pabrik senjata, bahan peledak, pos penjagaan dan gudang penyimpanan logistik. Tidak banyak tempat atau wilayah memiliki pangkalan angkatan perang yang dibangun oleh Jepang dengan sangat lengkap. Dalam membangun pangkalan angkatan perangnya Jepang telah membentuk suatu perkumpulan pekerja-pekerja untuk umum (*Aceh Syu*)⁶, perkumpulan pekerja inilah yang bertugas untuk membangun pangkalan angkatan perang di wilayah Aceh. Dalam urusan pertanahan Jepang menggunakan peraturan undang-undang yaitu *Aceh Syu Rei*⁷ (undang-undang Aceh) yang mengatur wilayah-wilayah yang akan digunakan Jepang selama mereka berada di Aceh.

Jepang banyak membangun pangkalan angkatan perang mereka di wilayah Aceh. Akan tetapi pangkalan angkatan perang yang berada di Lhoknga merupakan salah satu yang terkuat di wilayah Aceh, bahkan yang terkuat di belahan barat Indonesia⁸. Kekalahan Jepang dengan sekutu pada 14 agustus 1945 menghentikan kekuasaan Jepang di wilayah Aceh, Jepang hanya menunggu untuk menyerahkan wilayah Aceh kepada Sekutu. Tentara rekrutan Jepang di Aceh semuanya dirumahkan. Desas-desus kedatangan sekutu yang di dalamnya telah disusupi Belanda, membuat rakyat Aceh khawatir.

Mereka tidak ingin dijajah Belanda lagi maka dari itu banyak dari rakyat Aceh mulai menyusun kekuatan untuk melawan Belanda. Pada saat itu mata rakyat Aceh tertuju kepada Jepang, dimana mereka memiliki kekuatan yang cukup untuk menghadapi Belanda yang ingin kembali menjajah. Rakyat Aceh mulai merebut pangkalan angkatan perang Jepang, salah satu pangkalan angkatan perang yang jatuh ke tangan pejuang ialah pangkalan angkatan perang di Lhoknga.

⁶T. Ibrahim Alfian, *Sejarah Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh*, 1978, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, hal. 154.

⁷Rusdi Sufi, dkk. *Pola Penguasaan Pemilikan dan Penggunaan Tanah secara Tradisional Propinsi Daerah Istimewa Aceh*, 1985, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, hal. 29.

⁸T.A. Talsya, *Batu Karang Di Tengah Lautan (Perjuangan Kemerdekaan Di Aceh) 1945-1946*, 1990, Medan: prakarsa abadi press, hal. 152.

Pada tanggal 1 Desember 1945 fasilitas pangkalan perang itu jatuh ke tangan Republik. Perebutan tempat itu dilakukan oleh pejuang Aceh yang terdiri dari massa rakyat dari sekitar wilayah Lhoknga, yang dipimpin oleh Abdullah Masri, Pawang Leman, dan Nyak Neh⁹. Pejuang Aceh menjadikan pangkalan angkatan perang di Lhoknga sebagai modal dalam menghadapi Belanda jika mereka ingin memasuki Aceh dan wilayah sekitarnya.

Selain itu, peranan dan fungsi pangkalan perang ini dalam mempertahankan kemerdekaan merupakan alasan penulis untuk menuliskan pangkalan perang tersebut. Maka dari itu penulis memilih judul tulisan ini **“Lhoknga: Modal Perjuangan Dari Ujung Barat Sumatera 1945-1949”**. Dalam tulisan ini akan dijelaskan bagaimana situasi dan kondisi wilayah Lhoknga pada masa awal Kemerdekaan Indonesia antara tahun 1945 hingga 1949. Batasan awal tulisan ini dimulai pada tahun 1945 karena periode itu sebagai periode kemerdekaan Indonesia. Batasan akhir penulis memilih angka tahun 1949 karena pada masa ini berakhirnya perjuangan dengan senjata di Lhoknga.

Metode

Secara definisi metode sejarah ialah proses menguji dan memeriksa secara kritis rekaman dan peninggalan masa lampau¹⁰. Metode juga sebuah cara prosedural untuk membuat dan mengerjakan sesuatu dalam sebuah sistem yang teratur dan terencana¹¹. Berdasarkan hal tersebut penulisan sejarah sangat bertumpu pada empat kegiatan yaitu *heuristic*, kritik, interpretasi, dan *historiografi*.

Heuristik merupakan langkah pertama yang telah penulis gunakan dalam penulisan ini. Untuk mendapatkan bahan atau sumber tertulis, penulis telah melakukan studi pusaka.

Untuk memperoleh sumber melalui studi pustaka penulis berkunjung ke perpustakaan Ali Hasjmy, perpustakaan daerah Aceh, pusat dokumentasi dan informasi Aceh. Di samping itu peneliti juga melakukan studi arsip pada lembaga kearsipan yang ada di provinsi Aceh. Dan memperoleh arsip tentang tempat bersejarah di wilayah Lhoknga Leupung. sementara study lapangan dilakukan melalui teknik wawancara terhadap kedua narasumber yaitu; Harun Asyek dan Ibrahim Banta. Kritik merupakan teknik berikutnya yang akan penulis gunakan. Sumber yang telah didapatkan akan dikritik secara internal dan eksternal untuk mendapatkan sumber yang objektif.

⁹Tgk. A.k. Jakobi, Aceh Daerah Modal Long March ke Medan Area, Jakarta: P.T. Yudha Gama Corporation, 1992, hal. 317.

¹⁰Louis Gotschalk, Mengerti Sejarah, Penerjemah Nugroho Notosusanto, 1985, Jakarta: UI Press, hal. 32.

¹¹M. Dien Madjid dan Johan Wahyudi, Ilmu Sejarah: Sebuah Pengantar, 2014, Jakarta: Prenada Media Group, hal. 217.

Interpretasi yaitu tahap dimana penulis akan menuangkan semua ide yang telah di dapatkan melalui sumber-sumber yang telah diuji keabsahannya, untuk selanjutnya ditafsirkan sesuai dengan fakta yang ada.

Historiografi merupakan tahap akhir dalam metode yang akan digunakan untuk penulisan ini. Di tahap ini penulis akan menuliskan hasilnya secara deskripsi spasial yaitu deskripsi yang melukiskan ruang atau tempat yang pelukisannya dijelaskan dari berbagai segi tentang keadaan Lhoknga pada tahun 1945-1949 dari sudut pandang sejarah.

Pembahasan

A. Aceh Pada Masa Jepang

Secara astronomis Lhoknga terletak antara 52°48' sampai dengan 58°40' Lintang Utara dan 95°-13' dan 98°-17' Bujur Timur dengan ketinggian kurang lebih 5 meter dari permukaan laut¹², membuat wilayah Lhoknga ini berada persis pada bagian paling barat dari pulau Sumatera. Memiliki iklim tropis dan dua musim yakni musim barat dan musim timur. Lhoknga berhadapan langsung dengan Samudera Hindia membuat pantai-pantainya memiliki gelombang yang cukup tinggi. Sungai-sungai yang berada di kawasan Lhoknga ini tidak terlampau panjang, sungai terpanjang ialah Kreueng Raba. Secara topografi wilayah Lhoknga termasuk wilayah dengan tanah berbukit-bukit yang terdiri dari bebatuan *karts*. Bukit-bukit ini adalah bukit-bukit kapur. Bukit-bukit yang berada di tepi laut mengandung bebatuan *karts*¹³.

Adapun batas-batas wilayah Lhoknga ini adalah: (1) sebelah Utara berbatasan dengan wilayah Braden; (2) sebelah Timur berbatasan dengan wilayah Mata le; (3) sebelah Barat berbatasan dengan Samudera Hindia; (4) sebelah Selatan berbatasan dengan wilayah Pulot. Berdasarkan Google maps jarak antara Lhoknga dengan kota Banda Aceh ialah 14 km. Memiliki garis pantai sepanjang 23,03 km atau 14,31 mil, Lhoknga memiliki luas wilayah 81,61 km² atau 31,51 mil². Secara geografi luas daerah kecamatan Lhoknga ialah 9720 ha, dengan pembagian sebagai berikut luas tanah untuk persawahan 1000 ha, luas perladangan ialah 400 ha, dan sisanya adalah hutan dengan luas 8320 ha¹⁴. Jumlah penduduk Lhoknga sebelum kemerdekaan tidak diketahui tetapi pada tahun 1947 jumlah penduduk Lhoknga sekitar 3291 orang¹⁵.

¹²Nasruddin sulaiman, dkk., Peralatan Menangkap Ikan Tradisional Di Kabupaten Aceh Besar, 1992/1993, Banda Aceh; Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, hal. 5.

¹³Pengertian *karts* secara luas adalah bentuk bentang alam khas yang terjadi akibat proses pelarutan pada suatu kawasan batuan karbonat atau batuan mudah terlarut (umumnya formasi batu gamping) sehingga menghasilkan berbagai bentuk permukaan bumi yang unik dan menarik dengan ciri-ciri khas *exokarst* (di atas permukaan) dan *indokarst* (di bawah permukaan).

¹⁴Koleksi Badan Arsip dan Perpustakaan Aceh, Pandangan Keadaan Daerah Lhoknga, no panggil 103/4. Daftar penduduk dari surat tersebut menjelaskan luas wilayah Lhoknga pada tahun 1947 akan tetapi surat tersebut baru dikeluarkan atau dicetak pada tahun 1956. Untuk lebih jelasnya lihat pada lampiran II.

¹⁵Koleksi Badan Arsip dan Perpustakaan Aceh, Daftar Penduduk Lho'Nga Leupung Tahun 1948, nomor panggil 105/4. Untuk lebih jelasnya lihat pada lampiran III.

Ikut sertanya Jepang dalam perang dunia ke dua dapat dilihat dari beberapa kemungkinan, yakni keinginan Jepang untuk membentuk kekaisaran di wilayah Asia dengan Jepang sebagai pemimpin Asia. Hal ini ditandai dengan bergabungnya Jepang dengan aliansi Axis yang di dalamnya terdapat negara Jerman dan Itali. Kemungkinan berikutnya ialah kebijakan embargo minyak yang dilakukan Amerika kemudian diikuti oleh Inggris dan Belanda. Setelah penghentian perdagangan minyak terhadap Jepang, Amerika mulai menempatkan armadanya dalam jumlah besar di Pearl Harbor, dan Pearl Harbor ini berhadapan langsung dengan wilayah Jepang dan hanya dipisahkan oleh Samudera Pasifik.

Bagi Jepang hal ini merupakan tindakan ingin menyerang, Jepang mengantisipasi tindakan Amerika tersebut dengan menyerang terlebih dahulu ke Pearl Harbor pada awal bulan Desember 1941. Tindakan itu telah memicu perang dengan Amerika, Jepang dengan cepat menyerang dan menguasai wilayah-wilayah yang berada di kawasan Asia Tenggara. Wilayah yang dituju Jepang pertama kali adalah wilayah-wilayah yang memiliki sumber daya alamnya terutama sumber daya minyak buminya. Dalam menghadapi kekuatan sekutu dalam Perang Dunia ke II di wilayah Asia Tenggara Jepang membangun pangkalan perang di wilayah-wilayah yang mereka kuasai untuk menunjang kegiatan perang. Fasilitas pangkalan perang yang mereka bangun ada yang bersifat sebagai pertahanan saja karena hanya terdapat peralatan senjata untuk mempertahankan wilayah tertentu. Di dalam pangkalan perangnya ini terdapat pos yang dilengkapi oleh senjata otomatis atau meriam jarak menengah yang ditempatkan secara strategis.

Pusat dari pangkalan perang Jepang yang berada di wilayah Lhoknga ini berada di desa Lampuuk dengan luas $\pm 28.51 \text{ km}^2$ atau 2851 ha. Pada saat Jepang ingin membangun di daerah ini, Jepang memindahkan seluruh penduduk dari desa tersebut ke wilayah lain. Tempat tinggal baru penduduk desa Lampuuk yang baru dipindahkan oleh Jepang tersebut diberi nama Meunasah Baro, desa Lamkruet. Adapun jarak dari desa Lampuuk dengan desa Lamkruet ialah sekitar 3 km

B. Proklamasi di Aceh

Hirosima dan Nagasaki di bom atom oleh sekutu untuk melemahkan kekuatan Jepang dalam perang dunia ke dua. Amerika sebagai negara yang pertama kali menggunakan senjata pemusnah massal ini dalam perang. Kedua kota ini merupakan pusat perekonomian Jepang pada saat itu. Penyerangan kedua kota penting ini membuat Jepang harus menandatangani kekalahan mereka dari tangan sekutu. Penyerahan Jepang terhadap sekutu tentu membuat seluruh wilayah yang dikuasai Jepang selama perang mutlak, berpindah tangan ke pihak sekutu, tidak terkecuali Indonesia yang pada masa Jepang telah diberikan janji-janji kemerdekaan..

Kekosongan kekuasaan Jepang ini telah dimanfaatkan oleh pemuda Indonesia dengan sebaik-baiknya. Yakni dengan mempercepat proses pembacaan proklamasi dan menyatakan diri sebagai negara yang merdeka. Berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa pada tanggal 17 Agustus 1945 Sukarno dan Hatta memproklamkan kemerdekaan bangsa Indonesia di Jakarta. Kutaradja pertama kali mengetahui berita proklamasi ini pada tanggal 21 oktober 1945 melalui para pemuda yang bekerja di harian *Atjeh Simbun*.¹⁶ Setelah mendengar berita proklamasi ini maka di lakukanlah upacara penaikan bendera merah putih untuk pertama kalinya di Aceh. Penaikan bendera merah putih yang dilakukan di markas polisi Jepang di Kutaradja (saat ini berada di jalan S. A. Mahmudsyah) pada tanggal 24 Agustus 1945.

C. Pengambilalihan Pangkalan Perang Jepang

Setelah mendengar berita kekalahan Jepang dari pihak sekutu dan di saat yang hampir bersamaan mengetahui berita kemerdekaan Indonesia, maka secara sporadis rakyat menyerbu masuk kedalam wilayah-wilayah yang dijaga oleh tentara Jepang. Tindakan ini bertujuan untuk menguasai seluruh sumber logistik yang dimiliki oleh pihak Jepang agar dapat digunakan untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia.

Pada 1 desember 1945¹⁷ di wilayah Lhoknga terjadi pengambilalihan pangkalan perang Jepang. Pada saat subuh para penduduk dan laskar rakyat yang berada di sekitar Lhoknga telah berkumpul, dengan bersenjatakan rencong, parang, tombak, lembing dan bambu runcing, dengan tujuan untuk menggempur pangkalan perang Jepang. Setelah terlebih dahulu memutuskan kawat telepon, dan menempatkan barisan rakyat di antara satu pos pertahanan Jepang dengan pos lainnya. Maka tepat pada pukul 06:30 pagi berlangsunglah peristiwa penyerbuan oleh barisan rakyat terhadap pihak Jepang. Penyerbuan dilakukan ke tangsi AL Jepang yang terletak di tepi sungai Krueng Raba. Penyerbuan dilakukan dari jurusan Leupung di bawah pimpinan Pawang Leman dan Cut Lem Rahman¹⁸. Sementara itu Teungku Ahmad Padang dan Teuku Manyak¹⁹ memimpin massa dari arah Lampuuk-Lamlhom menyerbu tangsi AU Jepang yang terletak di lapangan terbang.

¹⁶T. Ibrahim Alfian, dkk, *Revolusi Kemerdekaan Indonesia Di Aceh (1945-1949)*, 1982, Aceh: Museum Negeri Aceh, hal. 32.

¹⁷Koleksi Badan Arsip dan Perpustakaan Aceh, *Riwayat Tempat-Tempat yang Bersejarah di Kecamatan Lho'Nga Leupung* tahun 1956, no panggil 217/23.

¹⁸Pawang Leman lahir di desa Meunasah Bak U, Leupung. Pada saat pengambil alihan pangkalan perang beliau memimpin penyerangan dari jurusan Leupung. Cut Lem Rahman berasal dari Leupung, beliau merupakan adik kandung dari Pawang Leman berperan sebagai wakil komando dari jurusan Leupung.

¹⁹Teungku Ahmad Padang lahir di Lampuuk, sebagai orang Lampuuk beliau memimpin penyerangan dari desanya tersebut. Teuku Manyak berasal dari Lamteuba peranannya merupakan pimpinan penyerangan dari Krueng Raya.

Kekuatan Lhoknga dan Keudebieng di bawah komando langsung Nyak Neh²⁰ menyerbu Jepang yang berada di tangsi AD dan AL yang terletak di Lhoknga. TKR di bawah pimpinan Said Usman dan Abdullah Masri turut serta memperkuat barisan Nyak Neh. Dalam hal ini para wanita dipimpin Ibu Razali (istri Nyak Neh) untuk mempersiapkan dapur umum dan menyediakan nasi bungkus untuk pasukan garis depan²¹.

Peristiwa penyerbuan ini menimbulkan pertumpahan darah dan korban jiwa di kedua belah pihak. Dari pihak barisan rakyat dapat dicatat yang gugur adalah 23 orang sedangkan di pihak Jepang adalah 80 orang. Setelah pertempuran berlangsung, pimpinan tingkat atas yang berada di Kutaraja mengadakan perundingan untuk menghentikan pertempuran tersebut. Perundingan dilakukan antara Chokan S. lino dengan Residen T. Nyak Arief. Pada jam 5 sore pihak Jepang menyetujui beberapa syarat-syarat sebagai berikut:

1. Pangkalan Lhoknga akan diserahkan dan mereka pindah ke pangkalan Biang Bintang.
2. Tiap opsir dan bawahan boleh membawa semua pakaian, tetapi hanya dibenarkan membawa satu senjata ringan, senapang ataupun pistol.
3. Residen Aceh bersama-sama pimpinan barisan-barisan rakyat menjamin keselamatan pasukan-pasukan Jepang.
4. Pangkalan Biang Bintang dijamin tidak akan diganggu oleh barisan rakyat²³.

Pemberitahuan perintah penghentian pertempuran dilakukan ke segenap sektor yang berada di wilayah Lhoknga. Hal ini dilakukan dengan berjalan mengelilingi wilayah Lhoknga. Dua orang Jepang bersama dua orang Indonesia yaitu Ali Hasjmy dan Said Ahmad Dahlan, berjalan mengelilingi wilayah Lhoknga. Mereka berdua meneriakkan perintah supaya pertempuran dihentikan dalam bahasa Jepang dan bahasa Aceh²⁴.

²⁰Mayor Nja'Neh merupakan putra asli Lhoknga yang lahir dan besar di Lhoknga. Kepiawaiannya dalam membaca situasi juga memiliki jiwa kepemimpinan yang membuatnya diangkat sebagai pemimpin dalam Divisi Rencong yang bermarkas di Lhoknga.

²¹Amram Zamzami, Jihat Akbar di Medan Area, 1990, Jakarta: Bulan Bintang, hal. 61.

²²Koleksi Badan Arsip dan Perpustakaan Aceh, Riwayat Tempat-Tempat yang Bersejarah di Kecamatan Lho'Nga Leupung tahun 1956, nomor panggil 217/23.

²³T.A. Talsya, Batu Karang Di Tengah Lautan (Perjuangan Kemerdekaan Di Aceh) 1945-1946, 1990, Medan: Prakarsa Abadi Press, hal. 155.

²⁴Ibid.

Keberhasilan massa rakyat dalam menguasai pangkalan perang Jepang beserta seluruh peralatan dan perlengkapannya merupakan MODAL untuk mempertahankan kemerdekaan. Akan tetapi keberhasilan itu akan sia-sia apabila tidak ada yang mengerti cara mengaktifkan kembali pangkalan perang tersebut secara optimal. Proses mengaktifkan kembali pangkalan perang tersebut tidak terlepas dari bantuan-bantuan para ahli yang datang ke Lhoknga. Diantaranya terdapat bekas para prajurit Jepang yang mendukung kemerdekaan Indonesia seperti, Tuan Korewa, Tuan Bunto, Tuan Simizu.

Ada tujuh pos Jepang yang tersebar di sepanjang pantai Lhoknga, yaitu: Pos penjagaan yang berada di Pulo Kapuk, Pos penjagaan yang berada di Kuala Cut, Pos penjagaan yang berada di Keubang kuda, Pos penjagaan yang berada di lapangan terbang Maimun Saleh, Pos penjagaan yang berada di Babah Dua, Pos penjagaan yang berada di Putro Ijo, Pos penjagaan yang berada di Lange.

Meriam pantai dan juga peralatan pendukungnya ini ditempatkan di atas gunung-gunung dan pantai yang berada di wilayah Lhoknga keenam glee²⁵ dan satu di pantai tersebut ialah: Glee Mongmong yang letaknya di ke mukiman Lampuuk, Glee Tjilee yang berada di Tanjung Lantjok, Glee Djameun yang letaknya di Koeueh, Glee Broek letaknya di Lhoknga, Glee Balee letaknya di Lhoknga, Glee Loebok di Koeeh, Ulee Kareueng (tepi pantai) di wilayah Lampuuk.

Pangkalan perang Jepang ini juga memiliki kurok-kurok²⁶ yang berguna untuk tempat persembunyian agar tidak diketahui oleh musuh. Selama berada di Lhoknga, Jepang membuat kurok-kurok ini siang dan malam dengan jumlah $\pm$ delapan kurok-kurok. Rata-rata kurok-kurok ini memiliki panjang $\pm$ 400 m, kini (2017) kurok-kurok yang dibangun pada masa Jepang, hanya tinggal empat kurok-kurok yang masih tersisa bagian pintu masuknya, yaitu;

1. Kurok-kurok yang berada di Meunasah Baro, memiliki lebar pintu 144 cm. Pintu masuk kurok-kurok ini telah di beton. Akan tetapi jalur di dalamnya masih berupa tanah.
2. Di Glee Bruk sendiri memiliki 3 kurok-kurok yang kesemuanya memiliki jalur pintu masuk masih berupa tanah. Kurok-kurok pertama lebar pintu masuknya 170 cm, kurok-kurok kedua lebar pintu masuknya 160 cm, dan kurok-kurok ketiga lebar pintu masuknya 110 cm.

²⁵Glee kata yang berasal dari bahasa Aceh yang artinya gunung.

²⁶Kurok-kurok adalah bahasa Aceh yang memiliki arti lubang yang digali, diambil dari kata kerja kuh yang berarti menggali. Terowongan Jepang yang berada di Lhoknga sendiri juga disebut oleh penduduk sekitar dengan kurok-kurok sebab pengerjaan nya dilakukan dengan cara menggali.

Selain tempat untuk pertahanan yang akan digunakan untuk menangkal serangan musuh yang ingin menjajah Indonesia, di wilayah Lhoknga juga terdapat:

1. Bengkel senjata yang berada di Uteun Duk di kepalai oleh tuan korewa. Dalam bengkel ini proses merakit bom dan amunisi meriam dilakukan.
2. Bengkel senjata yang berada di Kampung Baru, merakit alat-alat seperti meriam-meriam kodok, tomong, pedang, grendel senjata maupun meriam, kualo besi, cangkul. Bengkel senjata di Kampung Baru ini sudah mampu membuat alur dari laras meriam secara mandiri dan besi yang dipakai untuk membuat alur tersebut di bawa dari kilang minyak Pangkalan Brandan karena besi tersebut mampu menahan panas yang dihasilkan dari meriam ketika ditembakkan.
3. Dua generator listrik yang letaknya di Lampaya digunakan untuk keperluan bengkel senjata dan juga keperluan Umum.
4. Mesin ketam dan belah papan yang digunakan untuk memperbaiki bangunan asrama tentara juga serta pos-pos yang rusak²⁷.

Pada tanggal 5 November 1946 pangkalan perang Lhoknga yang berada dibawah Pesindo Aceh, untuk pertama kalinya menembakkan meriamnya ke salah satu kapal perang Belanda bernama Piet Hein²⁸. Ketika kapal perang Belanda itu sedang berpatroli di sekitar pantai Lhoknga, secara tiba-tiba pasukan Pesindo menembakkan meriam dan tepat mengenai haluan dari Kapal Piet Hein. Akibat kuatnya tembakan itu membuat Kapal Piet Hein itu oleng dan Belanda segera melarikan diri ke Sabang, karena Sabang merupakan markas dari pasukan sekutu²⁹.

Hal ini sesuai dengan laporan Laksamana Muda Belanda Pinke³⁰. Penyerangan pihak Belanda ke wilayah Lhoknga terus berlangsung sampai tanggal 15 November 1946. Pangkalan perang yang berada di Lhoknga telah menghabiskan amunisi sebanyak 2 Ton peluru pompom³¹ 25 mm, setengah ton peluru meriam 6 inci dan seperempat ton peluru senapan mesin 7,7 mm. Korban jiwa terkena serpihan bom sebanyak satu orang, dan akhirnya meninggal dalam perjalanan menuju rumah sakit.

²⁷Koleksi Badan Arsip dan Perpustakaan Aceh, Riwayat Tempat-Tempat yang Bersejarah di Kecamatan Lho'Nga Leupung Tahun 1956, no panggil 217/23

²⁸T.A. Talsya, Batu Karang Di Tengah Lautan (Perjuangan Kemerdekaan Di Aceh) 1945-1946, 1990, Medan: prakarsa abadi press, hal. 357.

²⁹Wawancara, dengan Ibrahim Banta di desa Weu Raya, Kec Lhoknga, Kab Aceh Besar tanggal 9 Oktober 2016.

³⁰Penyerangan yang dilakukan pihak Belanda ialah murni untuk membalaskan tindakan yang telah dilakukan kepada kapal Piet Hein mereka. Kapal tersebut ditembak oleh meriam Pesindo Lhoknga sampai tenggelam ketika hendak lari ke Sabang. Untuk informasi lebih lengkap lihat dalam buku T.A. Talsya, Batu Karang Di Tengah Lautan (Perjuangan Kemerdekaan Di Aceh) 1945-1946, 1990, Medan; prakarsa abadi press, hal. 357.

³¹Pompom merupakan sebutan untuk meriam penagkis udara dengan jenis 96 25 mm AT/AA gun. Lihat pada lampiran V.

D. Mempertahankan Kemerdekaan Dari Aceh

Indonesia yang baru saja menggapai kemerdekaan yang telah sangat lama diidam-idamkan oleh seluruh rakyatnya sudah harus menghadapi musuh yang ingin merongrong dan menjajah kembali. Gelagat ini mulai terlihat ketika pasukan sekutu datang ke Indonesia dengan tujuan untuk melucuti senjata dan mengembalikan pihak Jepang kembali ke negaranya. Penempatan pasukan Belanda di wilayah Indonesia, semula mendapat tantangan dari panglima sekutu Asia Tenggara, Laksamana Lord Louis Mountbatten³².

Pada tanggal 21 juli 1947 secara bersamaan tentara Belanda menyerang seluruh kubu-kubu pertahanan yang diduduki oleh pejuang, dan penyerangan ini dilakukan secara mendadak. Tindakan Belanda ini mengkhianati perjanjian Linggarjati, tetapi Belanda berdalih bahwa tindakan tersebut sebagai usaha polisionil³³. Tujuan dari aksi agresi ini ialah untuk menguasai seluruh sektor ekonomi yang berada di pulau Jawa dan Sumatera.

Pada tanggal 13 Agustus 1947 Pangkalan Brandan di bumi hanguskan seluruhnya oleh pejuang Republik. Penghancuran daerah kilang minyak ini dilakukan agar pihak Belanda tidak dapat menguasai objek vital. Penghancuran kilang minyak ini menggunakan bom yang didatangkan langsung dari Lhoknga. Perakitan bom untuk meledakkan kilang minyak tersebut dilakukan langsung oleh ahlinya yakni tuan Korewa. Beliau mampu merakit bom tersebut dan berhasil meledakkan kilang minyak Pangkalan Brandan³⁴. Tugas lain Divisi Rencong Lhoknga di bawah pimpinan mayor Nyak'Neh ialah membawa dan memindahkan peralatan yang ada agar dapat digunakan untuk kilang senjata di Lhoknga³⁵.

Besi-besi yang diambil dari kilang minyak Pangkalan Brandan ini memiliki kualitas sangat baik untuk dijadikan laras meriam karena ketahanan-nya dalam meredam panas. Apabila digunakan besi biasa maka akan mudah retak akibat panas dan tekanan amunisi ketika ditembakkan. Ketika Presiden Republik Indonesia berkunjung ke Aceh pada 16 Juni 1948 dan mendarat di lapangan terbang Lhoknga, warga Aceh menyambut kedatangan presiden tersebut dengan antusias.

³²Hal ini dikarenakan pihak Belanda tidak turut berperang langsung dalam pembebasan daerah ini dari tangan Jepang ketika perang dunia ke II. Hal ini dibantah oleh Letnan Jenderal H.J. Van Mook, menyatakan telah bertemu dan memperoleh izin dari Jenderal Mac Arthur yang merupakan pahlawan dalam penyerangan Sekutu terhadap Jepang, untuk mendaratkan pasukan Belanda di bekas Hindia Belanda lihat dalam buku tulisan Tgk. A.K. Jakobi, Aceh Daerah Modal Long March Ke Medan Area, 1992, Jakarta: P.T. Yudha Gama Corporation, hal. 136.

³³Polisionil ialah suatu tindakan yang diambil dengan mengatasnamakan keamanan. Tindakan ini dilakukan oleh kelompok yang mempunyai kekuatan untuk mengamankan sebuah wilayah tertentu, dan biasanya dilakukan dengan cara yang persuasif dikarenakan untuk meredam tindakan kejahatan di wilayah tersebut.

³⁴Tuan Korewa merupakan tentara Jepang yang mendukung kemerdekaan Indonesia Beliau yang memiliki keahlian dalam bidang bahan peledak di angkat menjadi kepala salah satu bengkel yang berada di Lhoknga untuk bidang bahan peledak. Tugas beliau ketika berada di pangkalan Brandan ialah untuk memasang bahan peledak untuk membunuh hanguskan kilang minyak tersebut. Lihat juga dalam B. Wiwoho, Pasukan Meriam Nukem Sanany Sebuah Pasak dari Rumah Gadang Indonesia Merdeka, 1985, Jakarta: P.T. Bulan Bintang, hal. 217.

³⁵Ibid., hal. 216

Kunjungan presiden pertama Indonesia ke Aceh adalah untuk melihat salah satu wilayah Indonesia yang paling barat. Dalam kunjungan-nya itu presiden juga memupuk semangat rakyat Aceh untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Dari beberapa pidatonya melahirkan istilah baru bagi Aceh yakni ACEH DAERAH MODAL, dan ini dikatakan langsung oleh presiden Sukarno dalam rapat samudera di lapangan Blang Padang dan Pada rapat raksasa yang diadakan di kota di Bireuen, pada 18 Juni 1948.

Kunjungan presiden tersebut juga menghimbau agar penduduk Aceh berbaik hati menyumbangkan hartanya untuk digunakan membeli sebuah pesawat terbang. Hal ini disampaikan presiden dalam pidato sambutan didepan Gabungan Saudagar Indonesia Daerah Aceh atau GASIDA. Presiden menganjurkan saudagar-saudagar bersama rakyat Aceh mengumpulkan dana untuk membeli kapal udara seperti pesawat Dakota yang harganya 25 kilo emas.

Pada Agresi kedua untuk kedua kalinya Belanda melakukan serangan secara serentak untuk melemahkan Republik Indonesia. Setelah sebelumnya Belanda membentuk RIS atau Republik Indonesia Serikat. RIS sendiri dibentuk Belanda untuk mengadu domba kekuatan Republik Indonesia dengan Republik Indonesia Serikat. Ternyata sebagian besar hasil dari bentukan RIS malah mendukung Republik Indonesia sebagai satu kesatuan. Hal ini diikuti oleh tindakan dewan Belanda yang secara sepihak tidak mengakui isi perjanjian Renville yang telah disetujui oleh kedua belah pihak pada tanggal 11 Desember 1948³⁶.

Pada saat yang sama, Kepala Staf Desa Tentara (KSDT) dibentuk di Lhoknga pada tanggal 14 Januari 1949. Pembentukan KSDT bertujuan untuk mempertahankan keamanan Aceh dari tingkat terkecil yaitu desa. Apabila terjadi penerobosan oleh pasukan musuh maka pasukan tentara yang berada di tingkat desa ini yang bergerak pertama kali untuk memukul musuh mundur, jadi musuh tidak dibiarkan sedikit pun membangun kekuatannya di wilayah Aceh. KSDT di wilayah Lhoknga dikepalai oleh Mukim Lho'Nga yaitu M. ALI beliau membawahi Bidang Pengatur Siasat, Bidang P.P.P.K, Bidang Perlengkapan, Bidang Perbekalan, Bidang Keuangan, Bidang Persenjataan, Bidang Pengangkutan dan Bidang Pertukangan³⁷.

³⁶Belanda secara terbuka mengajak pimpinan di daerah untuk mendirikan negara Republik Indonesia Serikat dengan Belanda sebagai pimpinan tertinggi dalam pemerintahan tersebut atau bisa juga disebut Negara Federal Indonesia, hal ini dilakukan Belanda untuk melemahkan kekuatan Republik dan membuat pimpinan Republik Sukarno melawan rekan dan rakyatnya sendiri. Negara Kalimantan Timur yang dibentuk Van Mook tanggal 12 Mei 1947 dan Negara Borneo Tenggara yang dibentuk 27 Mei 1947. Untuk penjelasan lebih lihat dalam buku. . Tgk. A.k. Jakobi, Aceh Daerah Modal Long March ke Medan Area, Jakarta: P.T. Yudha Gama Corporation, 1992, hal. 201.

³⁷Koleksi Badan Arsip dan Perpustakaan Aceh, Berkas PKDT LONDER Komando Distrik Tentara tahun 1949, nomor panggil 09/1.

Untuk menjaga wilayah Lhoknga, selain memiliki kepala staf desa tentara, juga terdapat satu pasukan tentara cadangan. Tentara cadangan ini dapat diaktifkan sewaktu keadaan sangat genting, seperti terjadi penyerangan oleh musuh di wilayahnya sementara pasukan tentara di sana tidak ada. Artinya untuk mengisi kekosongan tentara, maka tentara cadangan dapat diaktifkan. Jumlah tentara cadangan di seluruh Lhoknga 71 orang. Mereka ini berasal dari Desa Lampaya 20 orang, dari Desa Weu Raya 11 orang, dari Desa Mon Ikeun 20 orang, dari Desa Lamkroeet 20 orang ³⁸. Tentara cadangan yang berada di wilayah kewedanan Lhoknga yang selalu siap sedia apabila terjadi sesuatu yang genting menimpa bagian wilayah Lhoknga ini dan bisa di mobilisasi ke tempat lain apabila dalam keadaan darurat.

Berselang lima bulan, yaitu tanggal 2 Agustus 1949 dilakukan rapat Komando Divisi X TNI bertempat di markas Komando Divisi X Rapat tersebut membahas penghentian tembak menembak antara tentara Republik dengan Tentara Kerajaan Belanda. Di dalam rapat tersebut kolonel Hidayat memberikan penjelasan dan instruksi kepada Divisi X mengenai penghentian tembak menembak. Perintah instruksi pemberhentian tembak-menembak ialah:

- Pada tanggal 14-15 agustus 1949 harus menghentikan tembak menembak dan telah memberikan perintah kepada batalion.
- Berhubung dengan penghentian tembak menembak yang harus dilaksanakan pada tanggal 14-15 agustus 1949 tengah malam, harap dikerjakan oleh TNI dan seluruh rakyat Indonesia.
- Daerah-daerah yang sekarang adalah tetap daerah Indonesia.
- Jangan mundur dari tempat-tempat yang telah diduduki sampai adanya instruksi yang tetap.
- Daerah patroli TNI dengan Belanda itu akan ditetapkan nanti setelah mengadakan pembicaraan antara pemerintah Indonesia dengan Belanda.
- Janganlah orang-orang yang merintangi perintah dari atas.
- Jangan ada yang mengadakan provokasi dan menyerang³⁹.

Pemberhentian tembak menembak bertujuan untuk melancarkan kegiatan KMB. Apabila tetap terjadi tembak menembak dan hal ini diawali oleh tembakan dari pejuang, maka dengan mudah Belanda memberikan bukti bahwa segala kegiatan kekerasan mereka adalah tindakan untuk mempertahankan diri selama berada di Indonesia. KMB yang akan dilangsungkan di Den Haag Belanda menjadi titik balik perjuangan Indonesia sebagai negara yang berdaulat untuk menuntut agar diakui secara de jure dan de facto oleh negara di seluruh dunia termasuk Belanda.

³⁸ibid.

³⁹Koleksi Badan Arsip dan Perpustakaan Aceh, Rapat Komando Divisi X TNI Tgl 2-8-1949 Bertempat di Markas Komando Divisi 10 di Kutaraja, Acara Rapat Tentang Pemberhentian Tembak Menembak dan Tugas Intruksi Kepada Divisi 10, no panggil 141/5/

Untuk memenuhi kekosongan prajurit yang mampu menerbangkan pesawat, terutama yang bertugas dalam Angkatan Udara Republik Indonesia (AURI), maka pada tanggal 9 agustus 1949 dibuka seleksi kepada seluruh pemuda Aceh untuk menjadi penerbang dilakukan⁴⁰. Tertanggal 8 september 1949 di lapangan terbang Lhoknga⁴¹ telah terdaftar 14 calon atau kadet. Mereka telah lulus seleksi dan siap menjalani pelatihan untuk menjadi penerbang. Ke empat belas orang tersebut ialah; 1. Maimun Saleh, 2. Teuku Iskandar, 3. Abubakar, 4. Muchtar, 5. Teuku Zainal Abidin, 6. Sufi Usman, 7. Rusjdi Musa, 8. Mustafa, 9. Aiyub, 10. Zulkifli, 11. Saadan, 12. S. Chatib, 13. M. Dahlan Malay, 14. Agus Safar⁴².

Pelatihan terbang dilakukan langsung di lapangan terbang Lhoknga. Pesawat yang digunakan ialah pesawat bekas Jepang yang telah diperbaiki oleh teknisi dari AURI.

Tanggal 27 Desember 1949, kedaulatan diserahkan kepada Republik Indonesia Serikat (RIS). Pemerintahan sementara negara segera dipersiapkan. Soekarno dilantik menjadi Presidennya, dengan Hatta sebagai Perdana Menterinya. Indonesia Serikat dibentuk menyerupai republik federasi berdaulat terdiri dari 16 negara bagian. Keseluruhan bagiannya merupakan persekutuan dengan Kerajaan Belanda. Dengan diakuinya RIS oleh Belanda pada tanggal 27 Desember 1949 maka bersamaan dengan surat yang dikeluarkan di Kutaraja pada tanggal 5 desember 1949, ditandatangani langsung oleh bupati Aceh Besar Syeh Marhaban ⁴³.

⁴⁰Yang diterima pemuda-pemuda berijazah SMA, berumur kurang dari 22 tahun, berbadan sehat menurut pemeriksaan dokter dan tinggi badan 1.60 m. Lihat dalam buku T.A. Talsya, Sekali Republikein Tetap Republikein (Perjuangan Kemerdekaan Di Aceh) 1945-1946, 1990, Medan: prakarsa abadi press, hal. 195-196.

⁴¹Lapangan terbang Lhoknga merupakan salah satu bagian dari pangkalan perang. Pada masa mempertahankan kemerdekaan Indonesia, ada dua lapangan terbang yang berperan untuk mobilitas udara di Aceh. Yang pertama ialah lapangan terbang Lhoknga dan yang kedua ialah lapangan terbang Blang Bintang

⁴²Ibid., hal. 224

⁴³Koleksi Badan Arsip dan Perpustakaan Aceh, Pembentukan Panitia Penyerahan Kedaulatan Belanda Kepada RIS Pada Tanggal 27 Des 1949, no panggil 188/11.

Kecamatan Lhoknga yang masuk dalam Kabupaten Aceh Besar sungguh sangat strategis menurut ilmu kemiliteran. Letaknya yang berada di pintu masuk menuju Selat Malaka dan wilayahnya sendiri yang telah memiliki bukit-bukit tepat di pinggir pantainya seperti benteng alami yang dapat digunakan untuk peperangan. Timur, Utara, Selatan dipagari oleh bukit-bukit sedangkan bagian Barat terdapat Samudera Hindia.

Semenjak kerajaan Belanda, di wilayah ini telah dibangun sebuah lapangan terbang yaitu pada tahun 1935 bulan Juni. Dalam perang dunia ke II lapangan udara ini dan daerah sekitarnya front pertahanan dari tentara kerajaan Belanda. Untuk menjaga keselamatan penduduk dari bahaya peperangan maka penduduk yang berada di sekitar wilayah Lhoknga atas anjuran pemerintah Belanda kemauannya sendiri, mereka pindah ke kaki bukit. Penduduk Aceh secara terbuka menyambut kedatangan Jepang, terlebih lagi mereka berhasil mengusir Belanda. Sikap penduduk Aceh ini digunakan oleh Jepang untuk menghimpun dan membangun kekuatan mereka di wilayah Aceh. Kekuatan militer diutamakan Jepang dalam pembangunan di Aceh, salah satunya ialah membangun pangkalan perang di wilayah Lhoknga. Penduduk yang berada dalam wilayah pangkalan perang dipindahkan, dan dalam pembangunannya tidak sedikit tenaga penduduk Lhoknga yang digunakan dengan bayaran upah yang tidak sesuai.

Kekalahan perang Jepang dengan Amerika (sekutu) menyebabkan segala kepemilikan atas kuasa di tanah jajahannya hilang dan diambil oleh pihak pemenang perang. Pada waktu yang hampir bersamaan Indonesia telah memproklamkan kemerdekaannya dan berdiri sebagai sebuah negara yang merdeka. Melihat keadaan tersebut, Belanda yang pada saat itu tergabung dalam sekutu sebagai NICA mencoba untuk kembali menjajah Indonesia. Tidak ingin merasakan penjajahan kembali, seluruh element rakyat Indonesia dengan segala cara menghimpun kekuatan untuk mempertahankan kemerdekaan dari agresi Belanda.

Pangkalan perang Jepang di Lhoknga merupakan salah satu dari pangkalan perang di Aceh yang berhasil di ambil alih. Kelaskaran rakyat Pesindo yang mengambil alih dan menjalankan pangkalan perang ini. Pangkalan perang ini memiliki gudang amunisi serta bom, juga bengkel senjata yang dapat merakit senjata ringan dan berat. Jepang juga meninggalkan seluruh meriam pantai dan meriam penangkis serangan udara. Agar dapat digunakan kembali oleh pejuang Aceh, beberapa prajurit Jepang yang ikut mengabdikan dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia, mengajarkan petunjuk pengoperasian senjata yang berada di pangkalan perang tersebut. Pangkalan perang ini dapat diaktifkan kembali dibawah kuasa Indonesia.

Bengkel senjata yang berada di pangkalan perang Lhoknga ini telah berhasil memperbaiki dan merakit berbagai senjata diantaranya ialah; parang, kelewang, meriam dengan diameter 8 dan 12 inci, meriam penangkis serangan udara, dan meriam kodok. Bahan baku untuk membuat meriam tersebut yakni potongan pipa besi di bawa dari kilang minyak Pangkalan Brandan. Sedangkan untuk meriam yang diperbaiki bengkel ini menggunakan sistem kanibal, yakni dengan mengambil suku cadang dari meriam sejenis. Keseluruhan meriam yang akan dirakit atau diperbaiki akan disesuaikan dengan jenis amunisi yang terdapat di gudang, akan sia-sia apabila memperbaiki meriam tersebut akan tetapi amunisi yang tersisa tinggal sedikit.

Selama agresi pertama dan kedua Belanda pangkalan perang Lhoknga ini merupakan wilayah pertempuran yang selalu di bombardir dan diserang oleh pasukan Belanda. Berhadapan langsung dengan pangkalan perang Belanda yang berada di Sabang, menyebabkan pangkalan perang Lhoknga ini mendapat serangan pertama. Belanda yang ingin memasuki wilayah Aceh harus melewati pangkalan Lhoknga. Mereka ingin menghancurkan meriam pantai dan meriam penangkis serangan udara yang berada di pangkalan perang Lhoknga. Hal ini dilakukan untuk melemahkan kekuatan pejuang yang berada di Aceh.

Dibawah pimpinan Ali Hasjmy dan Nyak'Neh pangkalan perang ini telah berhasil menahan pasukan Belanda yang melalui jalur Sabang untuk menginjakkan kaki di wilayah Aceh. Sedangkan pada saat yang sama pangkalan perang ini mengirimkan bom dan artileri-nya untuk menahan penetrasi pasukan Belanda yang ingin masuk ke Aceh melalui jalur timur Sumatera.

A. Sumber Arsip

- Koleksi Badan Arsip Dan Perpustakaan Aceh, Tanah-Tanah yang Dibeli Jepang dijual kembali Kepada Penduduk Tahun 1946 no panggil 71/3.
- Koleksi Badan Arsip dan Perpustakaan Aceh, Daftar Penduduk Lho'Nga Leupung Tahun 1948, nomor panggil 105/4.
- Koleksi Badan Arsip dan Perpustakaan Aceh, Surat Salinan Penyambutan Presiden Republik Indonesia Tentang Tanda Mata Untuk Paduka Presiden NRI Tahun 1948, nomor panggil 119/4.
- Koleksi Badan Arsip Dan Perpustakaan Aceh, Pembentukan Komisariat Daerah Besar Sumatera Utara dan Pembubaran DPO Majelis Pesindo Aceh No 16/1 tanggal 08/03/1949, no panggil 121/4.
- Koleksi Badan Arsip Dan Perpustakaan Aceh, Berkas PKDT LONDER Komando Distrik Tentara tahun 1949, nomor panggil 09/1.
- Koleksi Badan Arsip dan Perpustakaan Aceh, Rapat Komando Divisi X TNI Tgl 2-8-1949 Bertempat di Markas Komando Divisi 10 di Kutaraja, Acara Rapat Tentang Pemberhentian Tembak Menembak dan Tugas Intruksi Kepada Divisi 10, no panggil 141/5.
- Koleksi Badan Arsip dan Perpustakaan Aceh, Pembentukan Panitia Penyerahan Kedaulatan Belanda Kepada RIS Pada Tanggal 27 Des 1949.
- Koleksi Badan Arsip Dan Perpustakaan Aceh, Riwayat Tempat-Tempat yang Bersejarah di Kecamatan Lho'Nga Leupung tahun 1956, nomor panggil 217/23.
- Koleksi Badan Arsip Dan Perpustakaan Aceh, Riwayat Tempat-Tempat yang Bersejarah di Kecamatan Lho'Nga Leupung tahun 1956, nomor panggil 217/23.
- Koleksi Badan Arsip Dan Perpustakaan Aceh, Riwayat Tempat-Tempat yang Bersejarah di Kecamatan Lho'Nga Leupung Tahun 1956, nomor panggil 217/23.
- Koleksi Badan Arsip Dan Perpustakaan Aceh, Riwayat Tempat-Tempat yang Bersejarah di Kecamatan Lho'Nga Leupung Tahun 1956, nomor panggil 217/23.
- Koleksi Badan Arsip Dan Perpustakaan Aceh, Pembentoekan Kamisariat Daerah Besar Soematera Oetara dan Pemboebaran D.P.O. Madjlis Pesindo Daerah Atjeh, no panggil 121/4.

B. Sumber Buku

- Abdurrahman, Dudung. 1999. *Metode Tulisan Sejarah*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Alfian, T. Ibrahim, dkk. 1982. *Revolusi Kemerdekaan Indonesia Di Aceh (1945-1949)*. Aceh: Museum Negeri Aceh.
- _____. dkk. 1978. *Sejarah Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Gottschalk, Louis. 1985. *Mengerti Sejarah*, (Terjemahan dari Nugroho Notosusanto). Jakarta: UI Press.
- Hardi. 1993. *Daerah istimewa Aceh Latar Belakang Politik dan Masa Depannya*. Jakarta: Cita Panca Serangkai.
- Hasjmy, A. 1995. *50 Tahun Aceh Membangun*. Banda Aceh: Majelis Ulama Indonesia Daerah Istimewa Aceh
- Hasjmy, Ali. 1985. *Semangat merdeka 70 Tahun Menempuh Jalan Pergolakan dan Perjuangan Kemerdekaan*, Jakarta: P.T. Bulan Bintang,
- Jakobi, Tgk. A.K. 1992. *Aceh Daerah Modal Long March Ke Medan Area*. Jakarta: P.T. Yudha Gama Corporation.
- Madjid, M. Dien dan Wahyudi, Johan. 2014. *Ilmu Sejarah: Sebuah Pengantar*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Piekaar, A. J. 1977. *Aceh dan Peperangan dengan Jepang Bab 1 (terjemahan)*. Dari Abu Bakar, Banda Aceh: Pusat Dokumentasi Dan Informasi Aceh.
- Said, Muhammad. 1981. *Aceh Sepanjang Abad*. Medan: Waspada.
- Sjamsuddin, Nazaruddin. 1999. *Revolusi Di Serambi Mekah*. Jakarta: UI-press.
- Sufi, Rusdi. dkk. 1984. *Pola Penguasaan Pemilikan dan Penggunaan Tanah secara Tradisional Propinsi Daerah Istimewa Aceh*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Sulaiman, Nasruddin, dkk., 1992/1993. *Peralatan Menangkap Ikan Tradisional Di Kabupaten Aceh Besar*. Banda Aceh: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Talsya, T.A. 1990. *Batu Karang Di Tengah Lautan (Perjuangan Kemerdekaan Di Aceh) 1945-1946*. Medan: Prakarsa Abadi Press.
- _____. 1990. *Sekali Republikein Tetap Republikein (Perjuangan Kemerdekaan Di Aceh) 1949*. Medan: Prakarsa Abadi Press.
- _____. 1990. *Modal Perjuangan Kemerdekaan (Perjuangan Kemerdekaan Di Aceh) 1947-1948*. Medan: Prakarsa Abadi Press.
- Talsya, T. Alibasjah. 1969. *Sepuluh Tahun Daerah Istimewa Aceh*. Banda Aceh: Pustaka Putroë Tjandèn.
- Wiwoho, B. 1985. *Pasukan Meriam Nukum Sanany sebuah pasak dari rumah gadang Indonesia*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Zamzami, Amram. 1990. *Jihat Akbar di Medan Area*. Jakarta: Bulan Bintang.

C. Sumber Internet

Maulidi, Achmad. Pengertian Karst dan Ciri-Ciri Kawasan Karst, <http://www.Kanal.Web.Id/2016/05/Pengertian-Karst-dan-Ciri-Ciri-kawasan-karst.html?M=1clipboard>; pada 5/9/2017, pukul 09:22 WIB.

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Straits_dollar; diakses pada 15 April 2017, pukul 14:30 WIB.

Sartini dan Saring Arianto. "Habis Gelap Terbitlah Terang", Jurnal Sosio e-Kons Vol.II, No.I Edisi February-April 2010. Diakses pada 4/4/2017, pukul 22:30.

Mansyur, Syahrudin. Tinggalan Perang Dunia II dan Konseptualisasi Museum di Morotai, Diakses dari laman Balai Arkeologi Ambon, pada 4/4/2017, pukul 22:30.

PELINDUNGAN SITUS BENTENG PUTRI HIJAU MELALUI PENGEMBANGAN STRATEGI KOMUNIKASI LINGKUNGAN

Oleh: Defri Elias Simatupang
Balai Arkeologi Sumatera Utara
Jl. Seroja Raya, Medan 20134 telp. (061) 8224365
defri.simatupang@kemdikbud.go.id

ABSTRACT

This paper examines how to protect from the objects of cultural advancement in the Benteng Putri Hijau Site Area through the development of environmental communication strategies. The purpose of this study is to understand the synergy between Law Number 5 of 2017 concerning the promotion of culture with Law Number 11 of 2010 through a case study at the Benteng Putri Hijau Site. To get a deep understanding, a descriptive analysis was carried out by providing a complete picture regarding the identification of cultural advancement objects in the Benteng Putri Hijau Site area. The data related to the objects of cultural advancement are included in the framework of the stages of protection: inventory, security, maintenance, rescue, and publication. Then the try out protection stages were analyzed based on environmental communication studies. The results of the study offer a model of the concept of protecting objects of cultural advancement in the Green Princess Fort Site Site which is environmentally friendly. The conclusion of this study explained that the protection of objects of cultural advancement in the Benteng Putri Hijau Site Area through the development of an environmental communication strategy is directly proportional, but with some notes that must be considered.

Keywords: protection, cultural advancement objects, environmental communication, benteng putri hijau sites

ABSTRAK

Tulisan ini mengkaji tentang perlindungan terhadap objek-objek pemajuan kebudayaan di Kawasan Cagar Budaya melalui pengembangan strategi komunikasi lingkungan. Latar belakang kajian ini, untuk memahami sinergi antara UU No. 5 Tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan dengan UU No. 11 Tahun 2010 melalui studi kasus pada Situs Benteng Putri Hijau. Untuk mendapatkan pemahaman mendalam, dilakukan identifikasi objek-objek pemajuan kebudayaan kawasan Situs Benteng Putri Hijau. Data-data terkait objek-objek pemajuan kebudayaan dimasukkan kedalam kerangka tahapan-tahapan perlindungan: inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan, dan publikasi. Selanjutnya pada tahapan perlindungan, dianalisis berdasarkan kajian komunikasi lingkungan. Hasil kajian menawarkan sebuah model konsep perlindungan objek pemajuan kebudayaan di Kawasan Situs Benteng Putri Hijau yang ramah lingkungan. Kesimpulan kajian ini menjelaskan bahwa perlindungan terhadap objek-objek pemajuan kebudayaan di Kawasan Situs Benteng Putri Hijau dapat bersinergi melalui pengembangan strategi komunikasi lingkungan, dengan beberapa catatan yang harus diperhatikan.

Kata kunci: perlindungan, objek pemajuan kebudayaan, komunikasi lingkungan, situs benteng putri hijau

Berawal dari penugasan Kepala Balai Arkeologi Sumatera Utara untuk masuk dalam tim Rezonasi Situs Benteng Putri Hijau Tahun 2019. Penulis sebagai seorang peneliti arkeologi (arkeolog) tertarik untuk melihat dari sudut pandang kajian pemanfaatan undang-undang (UU) terkait upaya perlindungan Kawasan Cagar Budaya Situs Benteng Putri Hijau. Secara administrasi situs ini berada di Desa Deli Tua Kampung, Kecamatan Namorambe, Kabupaten Deli Serdang. Saat ini sebagian Kawasan Situs Benteng Putri Hijau digunakan untuk pembangunan perumahan. Riwayat cerita situs ini biasanya dihubungkan dengan legenda Putri Hijau dan kejayaan Kerajaan Haru. Bagian yang mengagumkan dari kawasan situs ini ada pada pemanfaatan tebing – tebing sungai sebagai pagar benteng.

Tebing Sungai merupakan bagian terluar dari tepi sungai biasanya rentan mengalami erosi. Satu sisi hal ini menguntungkan sebagai pagar benteng. Untuk meminimalisir terjadinya erosi, tebing sungai situs ditanami tanaman keras yang juga sangat bermanfaat menghalangi ketika musuh hendak masuk ke dalam kawasan Situs Benteng Putri Hijau. Tebing sungai merupakan area aliran air di mana air bergerak cepat, memiliki tekanan tinggi, dan juga di bawahnya biasanya merupakan titik terdalam, sehingga menyebabkan area ini merupakan area yang berbahaya. Itu sebabnya ketika ide menjadikannya sebagai benteng seperti yang ditemukan pada Situs Benteng Putri Hijau, merupakan sebuah gagasan cerdas.

Sayangnya perkembangan dinamika kepentingan sosial ekonomi masyarakat terkait perluasan permukiman, sisa benteng yang tinggal dari pengamatan turun drastis dari luasan benteng awalnya. Maka upaya perlindungan pemerintah terhadap sisa benteng tanah yang tersisa harus maksimal. Adanya kabar gembira, aspek perlindungan kawasan cagar budaya yang selama ini menggunakan payung hukum UU No 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya, kini semakin dapat dimaksimalkan melalui sinergi dengan produk hukum terbaru yaitu UU RI Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Menarik mengangkat undang-undang ini dalam kaitan upaya perlindungan Situs Benteng Putri Hijau, karena lebih luas cakupannya dibandingkan UU RI Nomor 11 Tahun 2010.

UU Pemajuan Kebudayaan merupakan bagian usaha pemerintah dalam meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusinya di tengah peradaban dunia melalui : perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan. Sebagaimana definisi perlindungan (pasal 1 ayat 4). Pelindungan dalam UU Pemajuan Kebudayaan dimaknai sebagai upaya menjaga keberlanjutan kebudayaan. yang dilakukan dengan cara inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan, dan publikasi. UU Pemajuan Kebudayaan, bila ditarik kepada kajian publikasi berita penelitian arkeologi, masih lemah sinerginya dikaitkan UU Cagar Budaya. Idealnya institusi pemerintah di bidang kebudayaan berkewajiban membuat rencana strategis terkait pemajuan kebudayaan, termasuk para arkeolog peneliti dan pelestari (aparatur negara) yang tidak bisa lagi hanya mengandalkan metode ilmiah yang terkesan menjurus bahwa mereka saja yang paling berhak mengembangkan sumberdaya budaya (Handoko, 2008 : 33).

Sumber daya budaya melekat pada kawasan yang memiliki cagar budaya dan etnografi masyarakat yang ada di kawasan tersebut. Maka sumber daya budaya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan ideologi (identitas bangsa), kepentingan akademisi, dan kepentingan ekonomi. Kesemua kepentingan harus dilakukan upaya perlindungan. Menurut Atsar, perlindungan harus dilakukan dengan menginventarisasi keberadaan objek-objek pemajuan kebudayaan termasuk pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan, publikasi dan pengembangan (Atsar, 2017 : 297-298). Pada kawasan Situs Benteng Putri Hijau, seharusnya ketiga nilai penting tersebut didapatkan secara bersamaan, demi pemajuan tanpa ada tertinggal. Sudah menjadi tanggungjawab para arkeolog mengkomunikasikannya pada publik. Pemahaman lemah dari publik tidak seharusnya direspon arkeolog secara gelap mata, tanpa mengetahui publik yang mana yang diajak berkomunikasi. Karena hanya akan menghasilkan interpretasi yang tidak tepat sasaran (Merriman, 2004: 8).

Ketidaktepatan sasaran berkomunikasi harus dihindari demi suksesnya tahapan-tahapan perlindungan Situs Benteng Putri Hijau. Janganlah komunikasi “perlawananan” terhadap kegiatan pengembang perumahan rakyat justru akan direspon menjadi perlawanan publik kepada para arkeolog. Cibiran dari publik terhadap upaya perlindungan Situs Benteng Putri Hijau, bisa meningkat karena program pengembangan perumahan juga adalah kegiatan pemerintah. Maka dibutuhkan media komunikasi institusi pemerintah yang tepat agar respon publik perlindungan Situs Benteng Putri Hijau tepat sasaran harapan. Media massa (cetak, eletronik, dan internet) harus dapat dikelola lebih baik lagi agar dapat menerbitkan media publikasi yang berorientasi pada asas manfaat dan membangun maupun membesarkan institusi dengan maksimal dan efektif sesuai perannya.

Berbagai aktivitas kegiatan publikasi baik dari segi keterbukaan informasi maupun ketersediaan sarana pempublikasian, masih menjadi polemik bagi institusi pemerintah umumnya dan di bidang kebudayaan khususnya. Hal ini dilihat dari data tahun 2018, Komisi Informasi Pusat menganugerahkan Kategori pemerintah provinsi dan kementerian yang mendapatkan predikat informatif yaitu Jawa Tengah (96,95), DKI Jakarta (93,19), Kalimantan Barat (90,53), Jawa Barat (90,32), Kementerian Keuangan (96,90) dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (94,88) (Ninditya, 2018). Artinya kementrian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai induk dari institusi arkeologi berada diluar (begitu juga dengan tahun-tahun sebelumnya). Padahal keterbukaan informasi merupakan bagian dari cara perlindungan terhadap sumber daya budaya. Informasi sulit dipahami publik akan rentan menimbulkan kesalahan memahami pesan dari informasi tersebut. Maka dibutuhkan tambahan informasi yang lebih umum, misalnya mengangkat isu kerusakan lingkungan kawasan Situs Benteng Putri Hijau.

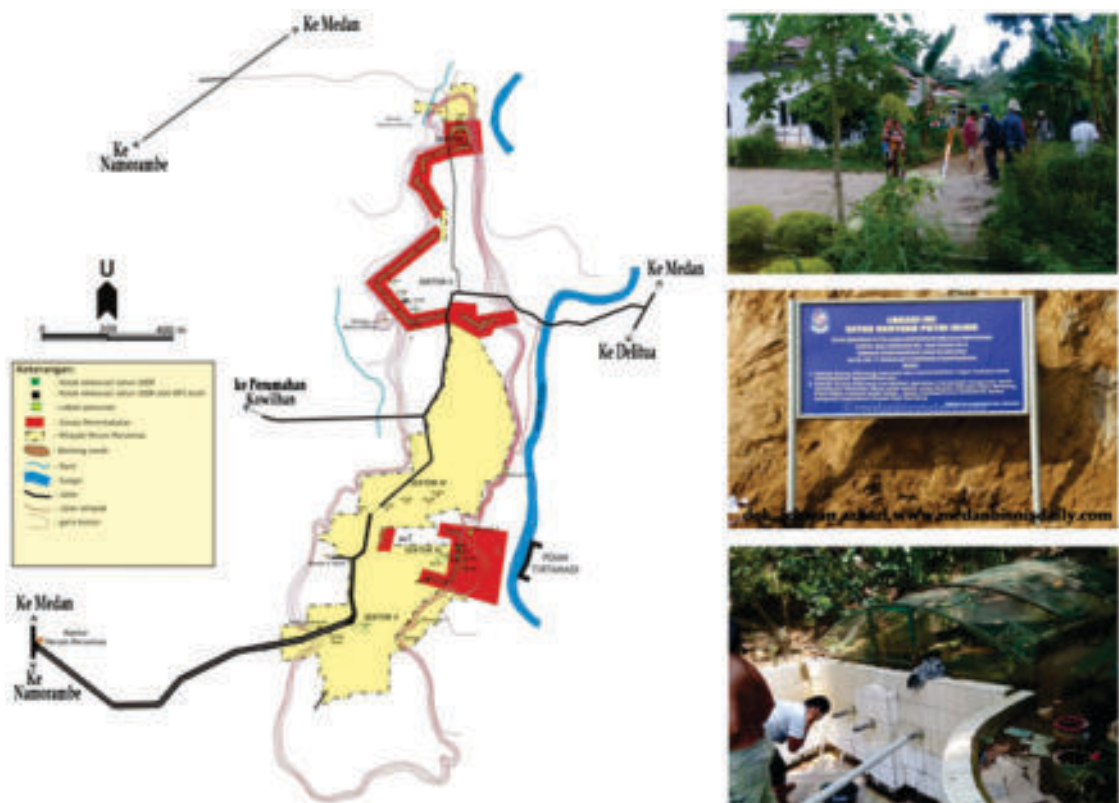
Komunikasi lingkungan dapat dipahami sebagai upaya menyadarkan publik untuk menjaga kelestarian lingkungan melalui berbagai saluran komunikasi. Herutomo dalam sebuah tulisannya tentang komunikasi lingkungan untuk hutan yang berkelanjutan, menyatakan peran berbagai media massa dan media sosial dengan pemberitaan yang investigatif dapat menumbuhkan kesadaran dan partisipasi publik dalam turut mengelola hutan berkelanjutan.

Disamping itu media berfungsi sebagai sarana pendidikan dan sekaligus sebagai kontrol sosial terhadap pengelolaan hutan berkelanjutan (Herutomo, 2013 : 47). Maka dalam upaya pelindungan Situs Benteng Putri Hijau, peran komunikasi lingkungan dibutuhkan untuk mensosialisasikan upaya pencegahan kerusakan lingkungan kawasan tersebut. Tantangannya publik bisa saja missskomunikasi, apalagi yang menyampaikan adalah para arkeolog. Sebagai contoh, kampanye bertajuk “save global warming”, publik belum banyak mengetahui pesan tersirat dari kampanye tersebut. Bahkan ada yang salah mempersepsikan, ketika yang diselamatkan adalah pemanasan globalnya (bukan penyelamatan Bumi).

Demikian juga terkait penyelamatan Kawasan Situs Benteng Putri Hijau, sangat dipengaruhi oleh indikator nilai penting hasil penelitian selama ini untuk bisa dikomunikasikan. Adapun aktivitas penelitian atas situs ini telah dimulai sejak tahun 1996 hingga masa terkini oleh Pusat Penelitian Arkeologi Nasional, Balai Arkeologi Sumatera Utara, Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Banda Aceh, Dinas Kebudayaan provinsi Sumatera Utara dan Kabupaten Deliserdang, kalangan akademisi, dan lain-lain. Hasil penelitian tahun 2009 oleh tim Pusat Penelitian Arkeologi Nasional, diketahui situs Benteng Puteri Hijau diduga pernah menjadi lokasi aktivitas kehidupan masyarakat yang dinamis dalam rentang waktu yang cukup panjang. Temuan artefak sumatralith (masa prasejarah), hingga temuan jenis artefak fragmen tembikar dan keramik diidentifikasi berasal dari rentang masa abad XIII – XVIII (masa hindu-Budha). Adapun masa Islam Kolonial : mata uang emas diduga berasal dari Aceh abad XVII, selongsong peluru berasal dari masa abad XX, kaliber 5,56 mm buatan Belgia; proyektil bulat berbahan logam timah hitam berasal dari masa abad XV – XX; serta peralatan perkebunan tembakau pada akhir abad XIX hingga awal XX (Purnawibowo, 2011). Kesemua institusi pemerintah idealnya mampu saling bekerjasama bahkan dengan instansi non pemerintah (lembaga swadaya masyarakat).

Institusi pemerintah di bidang kebudayaan idealnya aktif membuka diri bekerjasama mengangkat isu pelindungan kawasan cagar budaya yang berwawasan lingkungan. Namun penelitian arkeologi hendaknya tidak melulu merekomendasikan kawasan cagar budaya zona larangan tanpa ada tawar menawar kepentingan ekonomi, lingkungan dan sosial. Pemahaman akan penelitian terapan harus berkembang agar penelitian arkeologi dalam upaya mengenali genius kebudayaan Indonesia di sepanjang perjalanan sejarahnya, dapat memberikan sebuah pengetahuan lebih tentang nilai-nilai luhur yang ada pada masa lampau, dan kontekstual di masa kini (Restiyadi, 2009: 6). Situs Benteng Putri Hijau bisa saja dipandang pada masa kini sebagai kawasan pemukiman yang berkembang terus menerus. Disinilah dibutuhkan keterbukaan informasi agar hasil penelitian kalau tidak memuaskan (tidak ada temuan yang spektakuler) bisa dianggap sebagai faktor pendukung pertumbuhan ekonomi kawasan setempat.

Keterbukaan informasi institusi pemerintah terkait pengetahuan masa lampau yang kontekstual bagi publik, merupakan bagian dari perwujudan peningkatan fungsi pelayanan institusi pemerintah. Para arkeolog peneliti dan pelestari Situs Benteng Putri Hijau dapat menjadikan wacana isu kerusakan lingkungan menjadi semacam kesadaran mengevaluasi secara terukur terkait upaya pengelolaan kawasan cagar budaya dari konteks tinjauan masa kini untuk kepentingan masa depan. Melalui tulisan ini, isu penyelamatan lingkungan menjadi rumusan permasalahan yang dirumuskan dalam kalimat tanya : “Bagaimana konsep pelindungan Kawasan Situs Benteng Putri Hijau melalui pengembangan Strategi Komunikasi Lingkungan?”.



Gambar 1. Peta keletakan kawasan Situs Benteng Putri Hijau
(Sumber peta: Tim Peneliti 2009 dalam Purnawibowo, S. (2011: 166))

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian awal ini adalah metode penelitian dan pengembangan. Peneliti mencoba melakukan kajian proses pengembangan strategi komunikasi lingkungan, dengan mengangkat contoh kasus terkait upaya pelindungan Situs Benteng Putri Hijau. Analisis data deskriptif dilakukan terkait gambaran terkini Situs Benteng Putri Hijau. Pemahaman yang dalam didapatkan, setelah semua data masuk kedalam kerangka tahapan pelindungan (bagian upaya pemajuan kebudayaan). Kegiatan analisis pengembangan strategi komunikasi lingkungan dalam tulisan ini sangat bergantung kepada kedalaman pemahaman akan amanat UU Nomor 5 Tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan dan UU No. 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya melalui studi kasus pada Situs Benteng Putri Hijau. Kesemua tahapan digambarkan dalam sebuah permodelan yang memudahkan pemahaman / output penelitian ini.

Manfaat teoritis karya tulis ini untuk semakin mendalami kajian pengelolaan kawasan cagar budaya, dengan penambahan regulasi baru berupa UU RI Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan yang mengatur terkait objek pemajuan kebudayaan. Adapun manfaat praktis, untuk membantu pemerintah dan publik menawarkan sebuah solusi pelindungan Situs Benteng Putri Hijau melalui Pengembangan Strategi Komunikasi Lingkungan. Pendekatan kualitatif dilakukan, dimana data-data yang diperoleh, menekankan pada penggunaan diri si peneliti sebagai alat mengamati data-data primer (Moleong 2005, 9). Kajian ini juga membutuhkan data-data sekunder terkait berbagai teori yang relevan dalam pengembangan strategi komunikasi lingkungan dan hasil pengamatan partisipatoris dianalisis untuk mendukung benar tidaknya kedua produk hukum tersebut dapat bersinergi. Keseluruhan data dianalisis dengan kedalaman tingkat bahasan yang dalam hal ini dibuatkan semacam model / konsep kerangka berpikir awal agar memudahkan melihat apakah kedua undang-undang tersebut dapat bersinergi dalam upaya pelindungan Situs Benteng Putri Hijau.

Pembahasan

A. UU Pemajuan Kebudayaan dalam kaitan Pelindungan Situs Benteng Putri Hijau

UU RI Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan terdiri atas IX Bab, 61 pasal. Kesembilan bab tersebut : kebudayaan sebagai investasi, sistem pendataan kebudayaan terpadu, pokok pikiran kebudayaan daerah, strategi kebudayaan, rencana induk pemajuan kebudayaan, dana perwalian kebudayaan, pemanfaatan kebudayaan, penghargaan, dan sanksi (Seftiawan, 2018). Tampaknya melalui terbitnya UU ini, Pemerintah mencoba mengajak publik dalam upaya merawat dan memanfaatkan kebudayaannya masing-masing.

Begitu juga masyarakat etnis karo sebagai masyarakat yang mayoritas tinggal di kawasan Situs Benteng Putri Hijau turut mengembangkan kebudayaan mereka disamping turut melakukan perlindungan terhadap kawasan situs. Segala aset kebudayaan yang ada di kawasan situs dapat diinventarisasi kembali untuk turut dilakukan upaya perlindungan demi upaya memajukan objek-objek kebudayaan tersebut.

Dalam UU Pemajuan Kebudayaan, dicetuskan Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu sebagai database kebudayaan. Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu merupakan alat penangkal meminimalisir potensi klaimisasi pihak asing. Maka nantinya setelah menginventarisasi aset kebudayaan masyarakat etnis karo di kawasan Situs Benteng Putri Hijau, dibutuhkan langkah-langkah teknis untuk memajukannya. Direktur Jenderal Kebudayaan Hilmar Farid menyatakan, empat langkah strategis pemajuan kebudayaan (pelindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan), secara kongkrit akan dilakukan penyusunan kebijakan dari bawah, kabupaten/kota, lalu ke provinsi hingga nasional yang rencananya disusun dalam kongres kebudayaan yang dilaksanakan pada 2018 (Eppang, 2017). Kongres Kebudayaan Tahun 2018 merupakan puncak dari proses penyusunan dokumen perencanaan secara berjenjang yang diawali dengan penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) tingkat kabupaten/ kota dan provinsi. Pokok pikiran kebudayaan daerah menunjukkan kalau setiap pemerintahan daerah wajib merumuskan pokok pikiran kebudayaan daerah masing-masing. Dalam penyusunannya, para pegiat budaya dan pemangku kepentingan lain idealnya turut dilibatkan. Sebagai contoh : selain luas kawasan, kawasan Situs Benteng Putri Hijau harus jelas batasannya dalam menggiatkan siapa saja yang masuk kategori para penggiat budaya dari sepuluh objek pemajuan kebudayaan sesuai UU Pemajuan Kebudayaan. Setelah kawasan Situs Benteng Putri Hijau terdefinisi dengan baik, baru selanjutnya unsur pemajuan tersebut dapat dikaitkan kepada potensi ekonomi yang berpeluang untuk diraih.

Dalam Pasal 49 UU Pemajuan Kebudayaan, Pemerintah Pusat membentuk dana perwalian Kebudayaan, yang diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Bicara dana dalam proyek kebudayaan, publik sering merasam kebingungan melacak sumber dananya. Misalkan dari hasil wawancara dengan beberapa masyarakat sekitar situs Benteng Putri Hijau, ada kebingungan terkait sumber dana dan sasaran penyerapan dalam bentuk kegiatan perlindungan situs. Mereka hanya sampai tahu dan melihat ada kegiatan pemerintah dari kabupaten deli serdang, provinsi sumatera utara, dan dari pusat (Balai Arkeologi Sumatera Utara, Balai Pelestarian Cagar Budaya Aceh, dan dari Universitas). Idealnya ada sinergi penyediaan dana perlindungan kebudayaan dari pemerintah. Defenisi perlindungan pada UU Pemajuan Kebudayaan berbeda dibandingkan defenisi perlindungan pada UU Cagar Budaya. Pelindungan dalam UU Pemajuan Kebudayaan adalah upaya menjaga keberlanjutan Kebudayaan yang dilakukan dengan cara inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan, dan publikasi (Pasal 1 ayat 4). Dalam UU Cagar Budaya, pelindungan adalah upaya mencegah dan menanggulangi dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan dengan cara Penyelamatan, Pengamanan, Zonasi, Pemeliharaan, dan Pemugaran Cagar Budaya (Pasal 1 ayat 23).

UU No. 5 Tahun 2017 dan UU RI No. 11 Tahun 2010 adalah dua produk hukum kebudayaan yang menekankan pada perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan. Memang masih ada jarak antara studi analisis kebijakan dan pemanfaatan kedua UU tersebut dalam proses pengambilan kebijakan. Evaluasi berdasarkan studi kasus idealnya akan selalu dimunculkan. Situs Benteng Putri Hijau setelah dilakukan tahapan-tahapan penelitian, perlu melakukan kajian dana pembebasan lahan atau dana objek-objek pemajuan kebudayaan. Kalau kajian itu tidak dilakukan masyarakat akan semakin acuh tak acuh. Dalam sebuah wawancara dengan masyarakat, mereka mulai tidak yakin akan adanya dana pembebasan lahan karena dari tahun ke tahun hanya pengukuran-pengukuran saja. Tidak jelas setelah diukur, berapa dan kapan dibayar yang mau dibebaskan tersebut. Wajar saja pemikiran mereka hanya seputar ganti untung lahan yang diduga sebagai bagian dari Situs Benteng Putri Hijau. Padahal kompensasi yang diterima tidak selamanya berupa imbalan uang, namun pemerintah berusaha memberikan keringanan pajak, berupa bantuan tenaga dan/atau bantuan bahan sebagai penggantian biaya perlindungan lahan kepada pemilik, pengguna dan/atau pengelola cagar budaya (Surbakti, 2017: 149).

Defenisi perlindungan pada UU Pemajuan Kebudayaan, dibandingkan defenisi perlindungan pada UU Cagar Budaya agak sedikit berbeda. Pelindungan dalam UU Pemajuan Kebudayaan adalah upaya menjaga keberlanjutan kebudayaan yang dilakukan dengan cara inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan, dan publikasi (Pasal 1 ayat 4). Adapun dalam UU cagar budaya, pelindungan adalah upaya mencegah dan menanggulangi dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan dengan cara Penyelamatan, Pengamanan, Zonasi, Pemeliharaan, dan Pemugaran Cagar Budaya (Pasal 1 ayat 23). Tampaknya kedua UU ini memiliki kesamaan, dimana upaya pelindungan dapat dilakukan oleh siapa saja, namun pada UU Pemajuan Kebudayaan aspek publikasi masuk dalam upaya pelindungan. Sedangkan aspek publikasi pada UU Cagar Budaya, tidak secara jelas termuat, karena pada pasal 85 ayat 4 hanya berbicara terkait pemanfaatan cagar budaya melalui promosi. Memang ada termuat pada pasal 79 ayat 5 terkait publikasi, namun hanya untuk publikasi hasil penelitian saja.

B. Nilai Penting objek-objek Pemajuan Kebudayaan Situs Benteng Putri Hijau

Situs Benteng Putri Hijau merupakan situs arkeologis yang terletak di sebuah dataran yang berada di bagian atas lembah Sungai/Lau Tani, bagian atas Sungai Deli yang berhulu di daerah Sibolangit dan bermuara di Selat Malaka. Situs ini terletak di antara N 3° 28' hingga N 3° 29' dan E 98°40', memanjang utara-selatan di tebing barat Lau Tani, yang mengalir ke arah selatan. Secara administrasi situs ini berada di Desa Deli Tua Kampung, Kecamatan Namorambe, Kabupaten Deli Serdang. Saat ini sebagian areal Benteng Putri Hijau digunakan untuk pembangunan perumahan Perum Perumnas Regional I Sumbagut.

Situs ini umumnya dihubungkan dengan legenda Putri Hijau dan kejayaan Kerajaan Haru. Adapun bagian yang mengagumkan dari kawasan situs ini, terletak pada pemanfaatan tebing sungai sebagai pagar benteng (Koestoro, 2010: 120). Pemanfaatan tebing sungai sebagai pagar benteng di Situs Benteng Putri Hijau memiliki keuntungan sebagai sebuah pertahanan militer tanpa harus banyak mengubah atau menambah parit, lubang, atau tembok. Inilah yang menjadi nilai penting keunggulan Situs Benteng Putri Hijau sebagai situs benteng pertahanan yang seharusnya diungkap secara jelas melalui peningkatan publikasi.

Publikasi berita penelitian arkeologi, merupakan tanggungjawab / fungsi instansi Pusat Penelitian Arkeologi Nasional sebagai beserta sepuluh Unit Pelaksana teknis (Balai Arkeologi). Perkembangan media dan jaringan publikasi yang cepat harus diimbangi institusi pemerintah demi kemudahan dikenal publik. Adapun berbagai macam media sudah ada dari yang gratis atau yang berbayar. Berita hasil penelitian arkeologi bisa lebih dikenal publik, dengan memanfaatkan media secara optimal, untuk menghubungkan institusi dengan publik secara lebih erat. Namun dirasakan kalau berita hasil penelitian arkeologi tidak banyak “viral”. Kata “viral” digunakan untuk menyebut sesuatu yang menyebar secara massif dengan cepat di internet. Maka bisa saja upaya perlindungan terhadap objek-objek pemajuan kebudayaan di Kawasan Situs Benteng Putri Hijau viral ketika strategi publikasinya ada dan gencar. Upaya strategis tersebut idealnya dipandang sebagai investasi pembangunan peradaban bangsa, maka perlu mendapat jaminan / komitmen pemerintah kepada publik melalui turunan dari peraturan perundang-undangan (Zulkifli & Azhari, 2018 : 67 - 68). Adanya apresiasi kepada masyarakat penggiat budaya, akan semakin memudahkan dalam menciptakan strategi kebudayaan terhadap kawasan cagar budaya Situs Benteng Putri Hijau. Dari data yang ditemukan, paling tidak dari sepuluh objek pemajuan kebudayaan, ada beberapa objek yang teridentifikasi seperti dalam tabel dibawah ini :

Identifikasi sepuluh objek pemajuan kebudayaan (berdasarkan UU RI No. 5 Tahun 2017) pada masyarakat sekitar kawasan Situs Benteng Putri Hijau, yang dapat dilakukan perlindungan melalui pengembangan strategi Komunikasi Lingkungan

1

Tradisi Lisan : dipahami sebagai kesaksian yang diwariskan dari generasi ke generasi, antara lain, sejarah lisan, dongeng, rapalan, pantun, dan cerita rakyat. Pada masyarakat sekitar kawasan Situs Benteng Putri Hijau, berdasarkan pengamatan pada saat mengikuti sebuah kegiatan pada masyarakat, teridentifikasi ada, yang paling utama cerita tentang legenda putri hijau. Pada lokasi pemandian putri hijau kerap juru kunci atau masyarakat setempat meriwayatkan secara lisan legenda tersebut.

2

Manuskrip : dipahami sebagai naskah tulisan tangan beserta segala informasi yang terkandung di dalamnya, yang memiliki nilai sejarah dan budaya, antara lain, serat, babad, hikayat, dan kitab. Pada masyarakat di sekitar kawasan Situs Benteng Putri Hijau, objek manuskrip tidak teridentifikasi. Namun bila dikaitkan dengan Situs Benteng Putri Hijau tentu yang harus diinventarisasi terkait catatan-catatan sejarah terkait Kerajaan Aru dari para penulis lama.

3

Adat istiadat : dipahami sebagai kebiasaan yang didasarkan pada nilai tertentu dan dilakukan oleh kelompok masyarakat terus-menerus dan diwariskan dari generasi ke generasi. Pada masyarakat di sekitar kawasan Situs Benteng Putri Hijau teridentifikasi didominasi etnis karo. Meskipun daerah asal mereka dari Kabupaten Tanah Karo, tentu ada banyak variasi adat istiadat yang sudah muncul, karena mereka sudah beberapa generasi bermukim di kawasan situs. Dari beberapa kali diwawancara, mereka bisa memahami dan melaksanakan adat istiadat orang karo. Perlu pendalaman tersendiri untuk identifikasi objek ini.

4

Ritus : dipahami sebagai tata cara pelaksanaan upacara yang didasarkan pada nilai tertentu dan dilakukan secara terus – menerus dari generasi ke generasi, misalnya : perayaan peringatan kelahiran, upacara perkawinan, upacara kematian beserta perlengkapannya. Pada masyarakat yang berada di sekitar kawasan Situs Benteng Putri Hijau, berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan teridentifikasi objek ritus masih terjumpai pada lokasi pemandian putri hijau (daerah Pancur Gading) yang dilakukan para pengunjung dengan berbagai motivasi religi pribadi.

5

Pengetahuan tradisional : dipahami sebagai seluruh ide dan gagasan yang mengandung nilai-nilai lokal hasil pengalaman nyata dalam berinteraksi dengan lingkungan, dikembangkan terus-menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya. Pada masyarakat yang berada di sekitar kawasan Situs Benteng Putri Hijau, berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan objek pengetahuan tradisional teridentifikasi ada, namun belum teramati dengan baik.

6	Teknologi tradisional : dipahami sebagai keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang atau cara yang diperlukan bagi kelangsungan atau kenyamanan hidup manusia dalam bentuk produk, kemahiran, dan keterampilan masyarakat sebagai hasil pengalaman nyata dalam berinteraksi dengan lingkungan, dikembangkan secara terus-menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya. Pada masyarakat yang berada di sekitar kawasan Situs Benteng Putri Hijau, objek ini tidak teridentifikasi. Perlu pendalaman tersendiri untuk kajian objek ini.
7	Seni : dipahami sebagai ekspresi artistik individu, kolektif, atau komunal, berbasis warisan budaya maupun berbasis kreativitas penciptaan baru, terwujud dalam berbagai bentuk kegiatan. Seni antara lain seni pertunjukan, seni rupa, seni sastra, film, seni musik, dan seni media. Pada masyarakat di sekitar kawasan Situs Benteng Putri Hijau, berdasarkan pengamatan, objek seni teridentifikasi dalam bentuk tarian tradisional di balai desa delitua, biasanya saat pesta adat pernikahan, dsb. Perlu pendalaman tersendiri untuk kajian objek ini.
8	Bahasa : dipahami sebagai sarana komunikasi, baik berbentuk lisan, tulisan, maupun isyarat, antara lain, bahasa Indonesia dan bahasa daerah. Pada masyarakat yang berada di sekitar kawasan Situs Benteng Putri Hijau, teridentifikasi objek bahasa karo masih fasih digunakan, meskipun masyarakat sudah mulai heterogen secara kesukuan, ketika para pendatang membeli perumahan yang sudah ditawarkan para pengembang di Deli Tua.
9	Permainan rakyat : dipahami sebagai berbagai permainan yang didasarkan pada nilai tertentu (menghibur diri / penonton), dilakukan secara terus menerus dan diwariskan ke generasi berikutnya. Pada masyarakat yang berada di sekitar kawasan Situs Benteng Putri Hijau, berdasarkan pengamatan yang dilakukan belum berhasil mengidentifikasi permainan rakyat yang ada. Perlu pendalaman tersendiri untuk kajian objek ini.
10	Olahraga tradisional : dipahami sebagai berbagai aktivitas fisik dan/ atau mental yang bertujuan untuk menyehatkan diri, peningkatan daya tahan tubuh, didasarkan pada nilai tertentu, dilakukan oleh kelompok masyarakat secara terus-menerus, dan 'diwariskan pada generasi berikutnya. Pada masyarakat yang berada di sekitar kawasan Situs Benteng Putri Hijau, berdasarkan pengamatan yang dilakukan belum berhasil mengidentifikasi objek olah raga tradisional. Perlu pendalaman tersendiri untuk kajian objek ini.

Kesepuluh objek pemajuan kebudayaan yang diobservasi pada masyarakat sekitar kawasan Situs Benteng Putri Hijau, tentunya masih butuh kajian yang lebih mendalam lagi agar terbuka identitas budaya yang selama ini mungkin tertutupi. Semakin banyak data yang menunjukkan bentuk baku dari kebudayaan setempat, maka akan semakin tinggi daya jelajah merekonstruksi peradaban sebuah kawasan. Ketika hasil-hasil penggalian di Situs Benteng Putri Hijau mampu berbicara banyak, akan semakin meningkatkan nilai penting kawasan di wilayah tersebut. Maka ide terkait pengembangan Strategi Komunikasi Lingkungan pada dasarnya merupakan sebuah bagian dari upaya mewujudkan harapan tersebut. Mengkomunikasikan pentingnya merawat lingkungan, dengan melihat fenomena sisa benteng yang semakin diratakan demi nilai penting ekonomi sesaat.

Nilai penting ekonomi Situs Benteng Putri Hijau terletak di daerah pengembangan kawasan permukiman dan industri Medan dan sekitarnya. Sedangkan nilai penting lingkungan baik disadari maupun tidak, isu lingkungan dapat dijadikan mitra yang baik dalam melindungi situs. Lingkungan yang selalu dipengaruhi oleh kondisi air pasang naik dan pasang surut air laut berhubungan dengan kualitas air bersih dan abrasi air laut masuk ke air tanah yang dikonsumsi warga masyarakat. Bila daerah ini terpelihara maka amanlah konsumsi air tawar dan serangan abrasi air laut bagi warga Medan dan sekitarnya (Purnawibowo, S. 2013). Dari sudut pandang ekonomi, masalah kerusakan lingkungan timbul, karena biaya lingkungan tidak dimasukkan ke dalam biaya belanja modal, sehingga ketika terjadi kerusakan menyebabkan kerugian perekonomian itu sendiri. Hal ini kerap diabaikan karena nilai penting lingkungan menghambat nilai penting ekonomi dan dampak kerusakan lingkungan masih lama terjadi. Maka masyarakat dapat saling melempar tanggungjawab bila berbicara isu dampak kerusakan lingkungan.

C. Pengembangan strategi Komunikasi Lingkungan Situs Benteng Putri Hijau

Strategi komunikasi lingkungan berarti komunikasi yang direncanakan secara strategis. Perbedaan besar antara komunikasi yang direncanakan secara strategis dan yang tidak, terletak pada tingkat pencapaian harapan. Bila tidak ada strategi maka target audiens, isi pesan, dan pemilihan media akan dilakukan secara sembarangan. Isi pesan akan hasil penelitian arkeologi dan potensi objek-objek pemajuan kebudayaan di Kawasan Situs Benteng Putri Hijau akan diklarifikasi dahulu melalui media terpilih agar respon publik muncul. Setiap institusi pemerintah sewajarnya memberikan wadah untuk publik dapat memberi masukan (termasuk Balai Arkeologi Sumatera Utara dalam mempublikasikan hasil penelitiannya). Sebagai contoh, ketika dalam beberapa wawancara, masyarakat masih kebingungan bagaimana bentuk pengembangan kawasan Situs Benteng Putri Hijau kedepannya. Mereka beranggapan lebih menguntungkan meratakan benteng tanah kepunyaan mereka untuk dijadikan lahan permukiman. Kalaupun pemerintah membebaskan lahan terkait zonasi yang sudah dirancang, bagaimana kalau masyarakat menolak karena tidak ada kepastian kapan, berapa harga luasan yang akan dibayar, dan siapa yang akan deluan diprioritaskan?

Perlu langkah strategis untuk membuat masyarakat mudah memahami terkait zonasi. Menurut Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseum, penentuan zonasi berdasarkan Zona Inti, Zona Pendukung, dan Zona Penyangga. Zona mutlak untuk mempertahankan keaslian cagar budaya, maka tidak boleh segala hal yang bersifat mengganggu, apalagi sampai merusak. Zona Pendukung diperbolehkan untuk tempat fasilitas umum dan fasilitas pendukung/ untuk kepentingan komersil dengan mempertahankan nilai lingkungan budaya. Zona Penyangga diperbolehkan untuk kegiatan komersial dan rekreasi umum, dengan memperhatikan luasannya (Hafizah, 2018). Strategi yang tepat agar zonasi yang sudah ditetapkan pemerintah, dapat diterima masyarakat salah satunya melalui pendidikan untuk pelajar di sekitar kawasan Situs Benteng Putri Hijau sebagai muatan lokal bagi mereka. Menurut Ririmase (Ririmasse, 2014 : 21), ada lima aspek model yang dapat dikembangkan agar pelajar mendapatkan pengetahuan cukup terkait arkeologi sebagai muatan lokal, meliputi : pengembangan tema konten, inisiasi model sosialisasi yang lebih interaktif, pembaharuan materi, peningkatan frekuensi, dan pembinaan tenaga guru. Kelima aspek dapat diperluas sesuai kebutuhan asalkan menjadi landasan bagi minat generasi muda melestarikan warisan budaya nasional.

Maka generasi muda pada masyarakat sekitar Situs Benteng Putri Hijau dapat dianggap sebagai faktor utama dalam upaya perlindungan Situs Benteng Putri Hijau. Mereka dalam keluarganya masing-masing merupakan unit terkecil yang sudah memiliki pengaruh membentuk pranata sosial pertama dan terutama. Bakti (dkk), dalam penelitian komunikasi lingkungannya mengatakan kalau peran pranata sosial dapat dimanfaatkan oleh penggiat lingkungan sebagai akses/jalan masuk dalam menyampaikan pesan-pesan komunikasi lingkungan. Individu-individu yang tergabung dalam pranata sosial diharapkan sudah saling kenal dengan penggiat lingkungan, sehingga mudah diajak kerjasama memperluas jaringan (Bakti, 2017 : 106). Dari hasil wawancara dengan masyarakat di sekitar kawasan Situs Benteng Putri Hijau, pranata sosial generasi muda di wilayah mereka ada dan sangat terbuka untuk dilibatkan demi perlindungan situs. Tampaknya secara umum dirasakan kalau publik semakin kritis mendalami persoalan sejarah dan budayanya.

Para peneliti Situs Benteng Putri Hijau sebagai komunikator dalam strategi komunikasi lingkungan, tak bisa lagi arogan berpikir kalau hanya para arkeolog yang paling berhak meneliti sumberdaya budaya. Dengan mengangkat isu kerusakan lingkungan, mereka telah bersinergi dengan komunikator lain untuk permasalahan yang lebih kompleks (kerusakan lingkungan). Selanjutnya dengan melakukan strategi kolaborasi sesama peneliti lintas ilmu, menghasilkan pesan yang lebih kuat terkait perlindungan Situs Benteng Putri Hijau. Namun fenomena yang ada, para peneliti dalam kementerian masih bekerja dalam bidangnya masing-masing. Berbeda dengan jurnalis yang lebih mudah mengangkat isu apapun dari para peneliti dan mengemas beritanya agar mudah dipahami publik. Jurnalis mampu menyajikan berita secara cepat dengan frekuensi pemberitaan yang tinggi.

Melihat fenomena demikian, Merriman menyarankan agar para arkeolog lebih bersikap seperti jurnalis ketimbang akademisi dengan cara menjadi pelayan untuk komunitas yang mereka bayangkan. Namun pemahaman yang lemah dari publik tidak seharusnya direspon, tanpa mengetahui publik mana yang diajak berkomunikasi (Merriman, 2004 : 8). penelitian dan pengembangan Situs Benteng Putri Hijau bila tanpa dikembangkan dalam sebuah strategi komunikasi lingkungan.

Strategi komunikasi merupakan langkah awal penentu berhasil tidaknya komunikasi lingkungan dijalankan. Strategi komunikasi harus dilakukan oleh komunikator yang tepat. Penggunaan berbagai media dalam suatu komunikasi dapat saja terjadi, namun kelebihan dan kekurangan tiap media perlu diperhitungkan agar sesuai dengan situasi dan kondisi komunikasi dalam mempraktekkan social marketing dan mobilisasi dengan konsep kampanye komunikasi lingkungan hidup, termasuk penggunaan komunikasi interpersonal, edukasi, dan konseling (Wahyudin, 2017: 133). Ward (1995) dalam Kurnia, mengatakan kalau keberadaan media dan proses 'informatisasi' selama ini masih belum banyak disentuh. Padahal beragam jenis media baru yang bisa dijadikan sumber informasi dari yang sangat massif hingga yang sangat personal melibatkan proses 'informatisasi' yang relatif berbeda dengan penerimaan audiens yang berbeda pula. Di samping itu, kecepatan perkembangan media baru yang didukung teknologi komunikasi yang semakin lama semakin maju menunjukkan bahwa media komunikasi tidak bersifat tetap setiap saat (Kurnia, 2005: 294-295).

Pengembangan media komunikasi lingkungan akan berefek pada optimalisasi pelindungan objek-objek pemajuan kebudayaan di Kawasan Situs Benteng Putri Hijau. Efek yang ditimbulkan dari pemberitaan media massa, dapat ditangkap berbeda berdasarkan faktor individu dan faktor sosial. Faktor individu mencakup karakteristik profil pribadi lepas pribadi dari masyarakat yang menangkap pesan pemberitaan tersebut. Dengan kata lain, perbedaan dari tiap manusia turut menentukan daya tangkap terhadap makna isi pesan dari pemberitaan. Adapun faktor sosial maksudnya untuk menjelaskan bagaimana keadaan setiap masing-masing individu, pada saat menangkap pemberitaan tersebut (Nurudin 2007: 195--199). Bisa saja mayoritas masyarakat sekitar kawasan Situs Benteng Putri Hijau, tidak merasa prihatin ketika satu persatu benteng tanah diratakan disebabkan kondisi keuangan yang sulit dan harus menjual tanah mereka. Bahkan bisa saja justru merasa senang, sebab tentunya harga tanah yang datar, lebih tinggi nilai investasinya dibanding tanah yang berbukit (rawan longsor). Berdasarkan perbandingan peta tahun 2009 dan 2010 di situs Benteng Puteri Hijau dapat dikatakan situs ini dalam kurun waktu dua tahun telah mengalami suatu perubahan, yaitu hilangnya sebagian data gundukan tanah di bagian sektor II. Hal ini dikarenakan, areal sektor II dijadikan lokasi perluasan pengembangan kawasan permukiman perumahan (Purnawibowo, S. 2013).

Strategi menggabungkan isu kerusakan lingkungan di Kawasan Situs Benteng Putri Hijau menjadi sebuah tawaran solusi menggugah faktor sosial publik untuk menyeimbangkannya dengan faktor ekonomi. Benang merah strategi komunikasi lingkungan dalam menarik perhatian publik terhadap hasil penelitian,

terletak pada identifikasi objek-objek pemajuan kebudayaan kawasan Situs Benteng Putri Hijau. Semakin banyak objek-objek pemajuan kebudayaan yang ditemukan, maka semakin berpeluang untuk disinergikan dalam pembuatan rencana pembangunan jangka panjang / menengah. Dalam beberapa kali wawancara dengan masyarakat sekitar, pengembangan kawasan permukiman bukan suatu yang utama, karena menjual tanah ke pihak pengembang merupakan tindakan yang ada bersifat keterpaksaan, karena tidak menemukan prospek lain selain membuat kawasan permukiman. Mereka sangat menginginkan pengembangan kawasan tidak hanya sampai pengukuran kembali pada tahun 2019 tanpa ada kepastian waktu pembebasan lahan dan sosialisasi arah pengembangannya.

Keinginan publik tentu hasilnya lebih nyata berbeda bila dikawal oleh komunitas yang mensuarakannya. Handoko dalam tulisannya mengatakan, gagasan arkeologi komunitas merupakan konsep yang berbeda dengan arkeologi publik yang fokusnya pada pelibatan masyarakat tanpa batas ruang sosial yang jelas. Gagasan arkeologi komunitas menjadi jalan yang paling moderat mempertemukan (peneliti) arkeologi dengan masyarakat atas pengetahuan sejarah budayanya. Arkeologi komunitas secara inklusif melibatkan partisipasi komunitas, mulai tahap penelitian hingga perencanaan dan pengelolaan sumberdaya. Hal ini mengingat, terkadang justru komunitas itu sendiri yang menjadi korban pertama dari pembangunan yang top down (Handoko, 2008 : 33-34). Maka komunitas tidak seharusnya menjadi lawan pemerintah, justru menjadi rekanan dalam upaya perlindungan Situs Benteng Putri Hijau.

D. Model Pelindungan Situs Benteng Putri Hijau melalui pengembangan strategi Komunikasi Lingkungan

Tahapan pelindungan sebagai bagian dari upaya pemajuan kebudayaan, dilakukan dengan tahapan: inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan, dan publikasi. Tahap publikasi menjadi tahapan yang mampu merangkul tahapan-tahapan sebelumnya, meskipun tahapan-tahapan sebelumnya masih berjalan, atau ada yang sudah selesai dikerjakan. Supaya tahapan publikasi bisa mensinergikan pekerjaannya dengan tahapan lainnya, maka dibuatkan sebuah strategi pengembangan yang dalam hal ini memilih isu kerusakan lingkungan. Didalam strategi ini lah segala aksi yang tentunya harus memiliki anggaran terlebih dahulu, dapat bergerak kesemua pemangku kepentingan baik yang bergerak pada objek pemajuan kebudayaan, situs cagar budaya, dan isu kerusakan lingkungan. Semua pemangku kepentingan harus masuk menjadi bagian pengembangan startegi komunikasi lingkungan. Semuanya demi menjaga terhindarnya konflik dan konsisten terhadap upaya pelestarian lingkungan kawasan Situ Benteng Putri Hijau.

Hapsari mengatakan upaya pelestarian lingkungan hidup bersifat holistik dan membutuhkan dukungan dari semua pihak. Harus ada jaringan komunikasi untuk menggalang kekuatan lintas stageholder untuk mendorong suatu gerakan sosial yang efektif.

Jaringan komunikasi dapat memfasilitasi analisis peran dalam kelompok advokasi, kelompok kepentingan publik, dan organisasi gerakan sosial dalam jaringan kebijakan, termasuk dalam upaya pelestarian lingkungan hidup. Jaringan komunikasi menjadi modal sosial sekaligus sebagai suatu strategi untuk mencapai keseimbangan lingkungan (hapsari, 2016: 35). Dalam sebuah diskusi dengan beberapa masyarakat sekitar Situs Benteng Putri Hijau, pernah muncul penolakan masyarakat ketika wilayah mereka hendak dijadikan situs cagar budaya. Dengan semakin banyak berdirinya perumahan warga, gagasan penyelamatan Situs Benteng Putri Hijau menjadi sebuah hambatan dipikiran mereka karena hanya akan menjadi faktor penghambat bagi percepatan perekonomian masyarakat. Maka disinilah dibutuhkan gerakan sosial yang dapat meluruskan situasi missskomunikasi.

Idealnya sebuah gerakan sosial harus memiliki kemampuan untuk memperbesar dan memperluas gerakannya, sehingga jaringan berperan sebagai saluran untuk menularkan sikap dan perilaku untuk menjaga keberlanjutan generasi yang akan datang. Jaringan komunikasi berperan untuk menghubungkan orang-orang, kelompok, dan organisasi untuk bertukar informasi, pesan, sikap dan perilaku orang lain mengenai pentingnya pelestarian lingkungan hidup yang akhirnya mendorong adanya tindakan nyata dalam bentuk gerakan sosial. (Hapsari, 2016: 35). Gerakakan sosial dalam kaitan isu pelindungan Situs Benteng Putri Hijau, dapat dilakukan dengan membentuk kelompok informal yang berfokus pada aksi mengkampanyekan kepada publik. Aksi untuk melakukan perubahan cara pandang publik agar mampu memahami posisi kemanfaatan bagi masyarakat dari aspek sosial budaya, ekonomi, dan lingkungan pada kawasan Situs Benteng Putri Hijau. Memang bukan pekerjaan yang mudah ataupun susah membuat sebuah gerakan sosial. Ini juga menjadi masalah pada peneliti ketika tidak bisa mendayagunakan hasil penelitiannya kepada publik secara optimal.

Masalah pada peneliti tersebut juga ditemukan pada publik / komunitas yang nantinya akan menerima informasi tersebut dan meresponnya. Perlu solusi nyata dari pemerintah untuk kedua masalah tersebut. Ririmase dalam tulisannya, mengatakan kalau sebagai fasilitator pemerintah, institusi arkeologi harus mampu berperan sebagai mediator untuk menjawab tantangan tersebut, dengan mengembangkan strategi kreatif mengakomodasikan aspek sosial dalam pemanfaatan sumber daya budaya (Ririmase, 2008: 41). Misalkan dalam sebuah diskusi dengan masyarakat sekitar Situs Benteng Putri Hijau, dimana ada aspirasi untuk dibuatkan sebuah zona fasilitas umum pemerintah yang dapat dijadikan sebagai pintu gerbang masuknya publik mengunjungi situs. Selama ini publik hanya mendengar keberadaan situs di daerah Namorambe, Kabupaten Deli Serdang. Namun tidak jelas ketika tidak ada satupun arah penunjuk jalan menuju lokasi situs. Kalaupun ada tetap dikelola oleh secara individu. Hal ini sangat berpotensi menimbulkan salah pengertian yang berujung konflik kepentingan.

Konflik kepentingan akan membentuk satu pola perilaku tertentu untuk menghadapi lawannya. Pola perilaku orang-orang dalam menghadapi situasi konflik disebut sebagai gaya manajemen konflik (Wirawan 2010, 134). Maka perlu memiliki manajemen konflik dengan stakeholder pemerintah yang mengurus bidang keuangan negara. Bisa juga muncul konflik penyiapan database pokok pikiran pemajuan kebudayaan kawasan cagar budaya Situs Benteng Putri Hijau yang akan menjadi cikal bakal terbentuknya Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu. Terpadu karena melibatkan isu kerusakan lingkungan pada kawasan Situs yang juga belum terzonasi secara baik dan legal. Kesepuluh objek pemajuan kebudayaan seperti yang tertera pada UU RI Nomor 5 Tahun 2017, sejauh ini sudah cukup mewakili unsur-unsur intelektual, emosional, dan spiritual suatu kelompok sosial. Maka gaya manajemen konflik wajar saja asalkan muaranya pada percepatan pembangunan yang berkelanjutan.

UU Pemajuan Kebudayaan pula mengatur industri besar dan/atau pihak asing yang akan memanfaatkan objek pemajuan kebudayaan bagi kepentingan komersial. Karena itu, wajib memiliki izin dengan memenuhi persyaratan berdasarkan regulasi turunan UU pemajuan kebudayaan. Yang terutama memiliki persetujuan atas dasar informasi awal, adanya pembagian manfaat, dan pencantuman asal-usul objek - objek pemajuan kebudayaan. Tinggal bagaimana melakukan upaya pelindungannya. Menurut Ramly dalam tulisannya mengatakan: peran dinas kebudayaan harus sebanding dengan semangat para budayawan dan seniman rakyat lainnya yang terus hadir menghidupkan dan mengembangkannya sejak lama tanpa kehadiran negara. Dinas kebudayaan berkewajiban membuat rencana strategis pemajuan kebudayaan yang memperkuat akar kebudayaan berbasis temuan-temuan potensi, dan permasalahan kesenian dan kebudayaan di masyarakat setempat (Ramly, 2017).

Pasca berlakunya UU pemajuan kebudayaan, dalam strategi kebudayaan idealnya semakin meningkatkan peran lembaga masyarakat setempat. Institusi pemerintah lebih berperan sebagai fasilitator. Dalam sebuah wawancara dengan masyarakat sekitar kawasan Situs Benteng Putri Hijau, peran kelembagaan yang ada pada mereka sulit berbuat banyak, karena terkesan kurang diakui (legalitas belum ada). Ada kekhawatiran, pemerintah bisa saja menunjuk lembaga perpanjangan tangan bukan berasal dari mereka. Azansyah mengatakan, ada empat hal yang dapat dijadikan panduan membangun lembaga masyarakat yang efektif. Pertama melengkapi lembaga yang ada. Kedua melakukan inovasi memilih lembaga mana yang paling cocok untuk kondisi masyarakat tertentu. Ketiga menghubungkannya melalui penyaluran informasi yang terbuka kepada pengguna lembaga tersebut. Keempat, mendorong persaingan antar lembaga maju demi menciptakan permintaan untuk lembaga tersebut (Azansyah, 2013: 277-278). Adapun upaya mengotimalkan peran lembaga lokal dapat dilakukan melalui tahapan - tahapan: (1) penguatan kelembagaan, (2) penumbuhan kepercayaan publik, (3) pengembangan kegiatan, (4) penumbuhan jejaring sosial, dan (5) kemandirian. (Sulili.dkk, 2013: 88-89).

Pemerintah seharusnya bisa menggandeng komunitas dalam upaya perlindungan objek-objek pemajuan kebudayaan di Kawasan Situs Benteng Putri Hijau. Andriyani dalam tulisannya mengatakan, untuk memahami berlangsungnya proses pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan desa wisata dan implikasinya terhadap ketahanan sosial budaya wilayah berlangsung dalam tiga tahap yaitu tahap penyadaran, pengkapasitasan dan pemberian daya. Kegiatan penyadaran publik mengenai pentingnya menjaga budaya dan adat istiadat dengan adanya pariwisata harus terus-menerus dilakukan oleh tokoh-tokoh masyarakat. Kegiatan pengkapasitasan dalam hal ini melalui bimbingan teknis pemberdayaan dalam hal ini kegiatan promosi, bekerjasama dengan pelaku pasar kepariwisataaan baik dalam maupun luar negeri (Andriyani dkk, 2017: 16). Bentuk pemberdayaan ekonomi masyarakat misalnya melalui museum terbuka meliputi: penataan kawasan zona pengembang atau penyangga pada Situs Benteng Putri Hijau.

Rahardjo dalam bukunya mengatakan sudah sejak lama fungsi museum berubah, karena konteks sosial berubah. Banyak pengunjung museum bukan satu-satunya indikator keberhasilan, bahkan bukan indikator utama. Keberhasilan museum ditentukan oleh tercapainya visi dan misi yang dirancangnya (Rahardjo, 2011: 182-183). Visi dan misi dalam hal ini pastinya terkait upaya perlindungan objek-objek pemajuan kebudayaan di Situs Benteng Putri Hijau. Misalkan dalam sebuah wawancara kepada masyarakat, dikatakan kalau mereka memahami kalau benteng yang tersisa bisa dibuatkan jalan setapak untuk bisa pengunjung datang langsung mengitari langsung (dengan sepeda) sistem pertahanan benteng-benteng tanah tersebut. Sepanjang spot-spot yang dibuat dapat sekaligus memamerkan pernak-pernik objek-objek pemajuan kebudayaan dalam berbagai media yang sekaligus media kampanye pelestarian lingkungan Situs Benteng Putri Hijau.

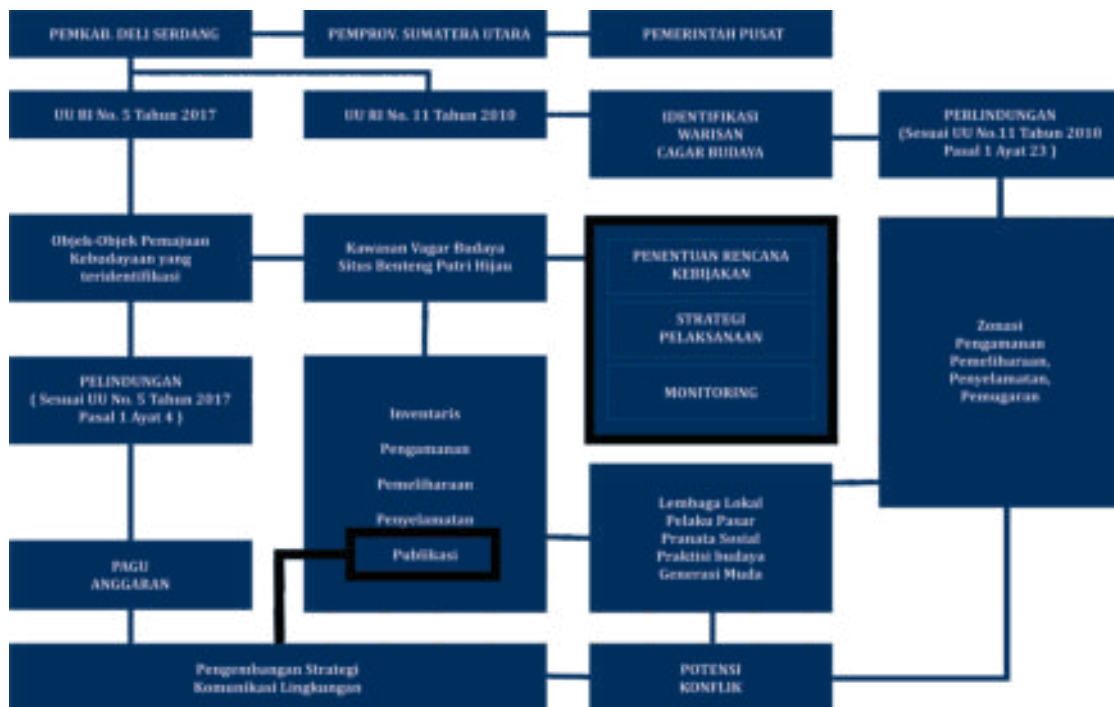
Deliniasi Situs Benteng Putri Hijau penting dilakukan untuk menjamin perlindungan terhadap fungsi kawasan, agar tidak terganggu dengan adanya kegiatan ekonomi lain yang terdapat di sekitarnya. Deliniasi dalam hal ini dipahami sebagai upaya penarikan garis batas sementara atau permanen agar terbentuk peta 'final' Situs Benteng Putri Hijau, yang tidak boleh diganggu setelah dibeli oleh pemerintah. Dengan adanya pendeliniasian pada kawasan cagar budaya, maka dapat diarahkan untuk mencapai nilai manfaat, dalam hal ini ditujukan untuk pemanfaatan cagar budaya pada saat ini, baik untuk ilmu pengetahuan, sejarah, agama, jatidiri, kebudayaan, maupun ekonomi melalui pariwisata yang keuntungannya dapat dirasakan langsung oleh generasi saat ini (Rohananda & Suprihardjo, 2013).

Menciptakan generasi muda yang memiliki kepedulian tinggi lingkungan merupakan salah satu program pengembangan startegi komunikasi lingkungan perlindungan kawasan Situs Benteng Putri Hijau. Sejak dini mereka dapat diajarkan misalnya untuk melakukan konservasi penanaman pohon pisang pada benteng tanah yang tersisa.

Purnawibowo dalam tulisannya mengatakan konservasi material dengan menggunakan pohon pisang barangan yang ditanam secara tumpang sari dengan ilalang dan rumputan pada struktur benteng tanah Situs Benteng Putri Hijau merupakan aktivitas konservasi material berbasis kearifan lokal. Penanaman pohon pisang barangan yang dipilih oleh masyarakat dianggap memiliki keunggulan pada kekuatan dan ketebalan daun serta luasan penampang daun dibandingkan dengan jenis tanaman pisang lainnya. Upaya tersebut, selain secara teknis melindungi tanah dari erosi, menjaga ketersediaan air jernih, serta bentuk penghormatan kepada tokoh legenda Putri Hijau (Purnawibowo, 2014). Contoh program kegiatan seperti ini yang merupakan output pengembangan strategi komunikasi lingkungan dalam upaya perlindungan Situs Benteng Putri Hijau. Tentunya harus dibuatkan terlebih dahulu alur / tahapan umum yang dapat dijadikan konsep model pelindungannya.

Pembuatan model perlindungan Situs Benteng Putri Hijau melalui pengembangan strategi Komunikasi Lingkungan merupakan sebuah alternatif tawaran dalam menjawab fokus permasalahan tulisan ini. Dari pemaparan yang sudah dijelaskan, konsep perlindungan Kawasan Situs Benteng Putri Hijau melalui pengembangan Strategi Komunikasi Lingkungan, harus dimulai dari sinergitas pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten. Namun institusi pemerintah hanya akan sebagai fasilitator untuk secara intensif mempublikasikan demi menangkap respon dari publik. Dengan penggabungan tiga isu besar (kawasan cagar budaya, objek-objek pemajuan kebudayaan dan fenomena potensi kerusakan lingkungan), diyakini mampu menekan anggaran pemerintah dalam memfasilitasi upaya / tahapan-tahapan perlindungan Kawasan Cagar Budaya Situs Benteng Putri Hijau. Maka pembuatan sebuah strategi pengembangan komunikasi lingkungan yang matang dan dipahami bersama oleh antar institusi pemerintah, akan mampu meminimalisir potensi-potensi konflik yang dapat terjadi.

Bila sudah ada publik merespon untuk terlibat dalam program perlindungan Situs Benteng Putri Hijau, tinggal di fasilitasi untuk bekerja sesuai kesepakatan antar pemangku kepentingan tersebut (ini masuk tahapan penentuan rencana kebijakan dan strategi pelaksanaan, lihat gambar 2). Zonasi situs akan ada yang mengerjakannya, begitu juga dengan objek-objek pemajuan kebudayaan yang sudah teridentifikasi dengan baik. Semuanya berawal dari respon penerimaan publik akan bahaya kerusakan lingkungan pada kawasan tersebut. Kalau tanpa ada isu kerusakan lingkungan yang dikomunikasikan oleh pemerintah, dikhawatirkan akan bekerja sendiri-sendiri tanpa ada sinergitas. Sinergitas pemerintah tinggal melakukan monitoring, apakah program dari masing-masing dikerjakan dengan baik atau tidak sesuai amanat dari UU. UU RI Nomor 5 Tahun 2017 yang berisi sepuluh Objek Pemajuan Kebudayaan masih dianggap rancu ketika objek - objek pemajuan kebudayaan yang berhubungan dengan peralatan (artefaktual), yaitu : manuskrip, dan segala peralatan yang berhubungan adat istiadat, ritus, pengetahuan tradisional, teknologi tradisional, seni, permainan rakyat, dan olahraga tradisional. Maka disarankan untuk menghasilkan turunan payung hukum yang dapat bersinergi dengan upaya perlindungan situs / kawasan cagar budaya sesuai UU RI Nomor 11 tahun 2010.



Gambar 2. Konsep model pengembangan strategi komunikasi lingkungan dalam upaya perlindungan Situs Benteng Putri Hijau

UU RI Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan merupakan sebuah momentum untuk semakin dapat mengelola kawasan cagar budaya Situs Benteng Putri Hijau menuju pemajuan nilai-nilai kebudayaan yang melekat pada kawasannya, dengan bersinergi dengan UU RI Nomor 11 Tahun 2010. Dengan mengangkat isu kerusakan lingkungan pada kawasan cagar budaya, diyakini konsep model seperti pada gambar 1 dapat dimatangkan lagi. Disarankan agar membentuk tim yang dapat merumuskan model tersebut. Pengembangan kajian komunikasi lingkungan pada tahapan perlindungan (sub bagian publikasi), diyakini akan sangat membantu dalam upaya pemajuan kebudayaan. Stageholder akan terarah untuk ambil bagian sejak dari tahapan ini. Kesimpulan kajian ini adalah bahwa perlindungan terhadap objek-objek pemajuan kebudayaan di Kawasan Situs Benteng Putri Hijau dapat dilakukan melalui pengembangan strategi komunikasi lingkungan, dengan catatan semua stageholder mau berkomitmen terlibat dalam tahapan perlindungan tersebut.

- Atsar. (2017). Perlindungan Hukum Terhadap Pengetahuan Dan Ekspresi Budaya Tradisional Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Ditinjau Dari UU No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan Dan UU No.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Jurnal Law Reform Volume 13 (2) : 284-299. Program Studi Magister Ilmu Hukum. Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- Andriyani dkk. (2017). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Desa Wisata Dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Sosial Budaya Wilayah (Studi Di Desa Wisata Penglipuran Bali). Jurnal Ketahanan Nasional. Vol. 23 (1) : 1-16. UGM : Yogyakarta.
- Bakti Iriana,dkk.Pemberdayaan Pranata Sosial Melalui Komunikasi Lingkungan : Menakar Pelibatan Peran Perempuan Dalam Mitigasi Banjir Citarum. Jurnal Kawistara, Vol. 7, No. 1, 22 April 2017: 94-107.
- Eppang, (2017). Kemendikbud fokus 10 objek pemajuan kebudayaan. Retrieved June 21 th 2018 , from <http://www.netralnews.com/news/pendidikan/read/83238/kemendikbud.fokus.10.objek.pemajuan.kebudayaan>.
- Hafizhah, T Mira. Kajian Zonasi Kawasan Cagar Budaya Di Kecamatan Siak Kabupaten Siak. Jurnal PLANO MADANI VOL. 7 No. 1 APRIL 2018. Hal. 46-58.
- Handoko, Wuri. (2008). ARKEOLOGI KOMUNITAS : Pengelolaan Informasi dan Pengembangan Penelitian Arkeologi di Indonesia (Sebuah Pendekatan untuk Wilayah Penelitian di Maluku). Kapata Arkeologi Vol. 4. (7) : 23 – 36.
- Hapsari R.D. (2016). Peran Jaringan Komunikasi Dalam Gerakan Sosial Untuk Pelestarian Lingkungan Hidup. Jurnal Komunikasi ISKI. (01): 25-36.
- Herutomo,2013. Komunikasi Lingkungan Dalam Mengembangkan Hutan Berkelanjutan.Jurnal Acta diurnA. Vol 9 No. 2.Hal. 37-48.
- Koestoro, Lucas P. 2010. “Benteng dan Kearifan Lokal”, dalam Seri warisan Sumatera Bagian Utara No.0510. Medan: Balai Arkeologi Medan.
- Kurnia, Novi. Perkembangan Teknologi Komunikasi dan Media Baru: Implikasi terhadap Teori Komunikasi. Jurnal MEDIATOR, Vol. 6 No.2 Desember 2005. Terakreditasi Dirjen Dikti SK No. 56/DIKTI/Kep/2005. Hal. 291 - 296
- Merriman, Nick. (2004). Introduction : Diversity and Dissonance in Public Archaeology. In Nick Merriman (ed.). Public Archaeology. 1-18. London: Routledge.
- Moleong, L. J. (2005). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Nurudin, 2007. Pengantar Komunikasi Massa. Jakarta: Grafindo.

- Ninditya, F. (2018). Komisi Informasi serahkan penghargaan Keterbukaan Informasi Publik 2018. Accessed 6th Mei 2019, from : <https://www.antaranews.com/berita/765254/komisi-informasi-serahkan-penghargaan-keterbukaan-informasi-publik-2018>.
- Purnawibowo, S. Konservasi Berbasis Kearifan Lokal di Situs Benteng Puteri Hijau, Deli Serdang, Sumatera Utara. *Jurnal Konservasi Cagar Budaya Borobudur*, Volume 8, Nomor 2, Desember 2014, Hal 32-41.
- Purnawibowo, S. Situs Benteng Puteri Hijau Dan Situs Kotacina Dalam Perspektif Perlindungan Sumberdaya Arkeologi. *jurnal "ARABESK" Nomor 2 Edisi XIII Tahun 2013 periode bulan Januari-Juni. BPCB Aceh*. Hal. 29 – 43.
- Purnawibowo, S. Cultural Transform di Situs Benteng Putri Hijau. *Jurnal Sangkhakala*. Vol 14, No 27 (2011). Hal. 165-178.
- Rahardjo, Supratikno. (2011). *Pengelolaan Warisan Budaya di Indonesia*. Bandung : Lubuk Agung.
- Ramly, Nadjamuddin. (2017). Pemajuan Kebudayaan Berkemajuan. Opini. *Harian Kompas*. 17 Februari 2017.
- Restiyadi, Andri. (2009). Identitas Budaya, kreativitas dan Kajian Arkeologi Publik. *Berkala Arkeologi Sangkhakala Vol XII No.23*: 1 – 7.
- Ririmasse, Marlon. (2008). Siklus Informasi Arkeologi : Menuju Pemasyarakatan Hasil Penelitian yang Terintegrasi di Balai Arkeologi Ambon. *Kapata Arkeologi Vol.4 (7)* : 37 – 51.
- Rohananda & Suprihardjo. Penentuan Deliniasi Kawasan Cagar Budaya di Kabupaten Ngawi. *Jurnal Teknik Pomits Vol 2*. (2013). Hal 1-6.
- Seftiawan. (2018). Setelah Menunggu 35 Tahun, RUU Kebudayaan Disahkan DPR. Retrieved June 1st 2018, from <http://www.pikiran-rakyat.com/pendidikan/2017/04/28/setelah-menunggu-35-tahun-ruu-kebudayaan-disahkan-dpr-400048>.
- Sulili dkk. (2013). Peran Kelembagaan Lokal Dalam Meningkatkan Keberdayaan Masyarakat Studi Kasus Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) di Kota Makassar. *Jurnal Sosiologi SOCIUS Departemen Sosiologi FISIP UNHAS Volume 12*. (1) : 72-89.
- Surbakti, K. (2017). Kebijakan Pengelolaan Warisan Budaya Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 (Perihal Pemberian Insentif dan Kompensasi)". *Kapata Arkeologi Vol. 13 (2)* : 141 – 150.
- Wahyudin, Uud. 2017. Strategi Komunikasi Lingkungan Dalam Membangun Kepedulian masyarakat terhadap lingkungan. *Jurnal Common Vol.1 Nomor 2*. Desember 2017. Hal.130-134.
- Wirawan. (2010). *Konflik dan Manajemen Konflik: Teori, Aplikasi, dan Penelitian*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Zulkifli & Azhari. 2018. Perlindungan Objek Pemajuan Kebudayaan menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 2017. *Doktrina: Journal of Law*, 1 (1) April 2018. Hal. 56-58.

PERATURAN PERATURAN

UU RI No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan

UU RI No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya

Sejarah Teuku Po Miruk Abdul Wahid Pada Masa Pemerintahan Sultan Alaidin Mansyursyah di Pulau Weh/Sabang

Oleh: Masnauli Butarbutar
Staf Balai Pelestarian Cagar Budaya Aceh
Jalan. Banda Aceh-Meulaboh Km.7.5, Gpg. Rima Jeune,
Kec. Peukan Bada, Aceh Besar,
Provinsi Aceh
masnauli_bp3@yahoo.com

ABSTRACT

This article discusses the role of Teuku Po Miruk Abdul Wahid, a commander and at the same time building the island of Weh or what is now called the City of Sabang. The history of the origin that built the island of Weh Bay Balohan is a warlord from the kingdom of Aceh named Teuku Po Miruk Abdul Wahid. Then was given the title of Commander of Weh Bay Balohan Island. Which was appointed or appointed by Sultan Alaidin Mansyursyah who ruled the kingdom of Aceh in 1841 AD. Teuku Po Mirak Abdul Wahid The Commander of Weh Island, was appointed by Sultan Alaidin Mansyursyah to be the representative of the Sultan of Aceh to govern the country and take the pepper yield that came out of Pulau Weh by obtaining a decree letter of appointment of nine Lightning signed by Sultan Alaidin Mansursyah.

ABSTRAK

Artikel ini membahas peran Teuku Po Miruk Abdul Wahid seorang panglima sekaligus membangun negeri pulau weh atau yang sekarang disebut Kota Sabang. Sejarah asal mula yang membangun negeri pulau Weh teluk Balohan adalah seorang panglima perang dari kerajaan Aceh yang bernama Teuku Po Miruk Abdul Wahid. Kemudian diberi gelar Panglima Pulau Weh Teluk Balohan. Yang diangkat atau yang dilantik oleh Sultan Alaidin Mansyursyah yang memerintah kerajaan Aceh tahun 1841 Masehi. Teuku Po Mirak Abdul Wahid Panglima Pulau Weh ini, dilantik oleh Sultan Alaidin Mansyursyah untuk menjadi wakil Sultan Aceh untuk memerintah negeri dan mengambil hasil lada yang keluar dari pulau Weh dengan mendapat SK (Surat Keputusan) surat pengangkatan bercap sembilan Halilintar yang ditanda tangani oleh Sultan Alaidin Mansursyah

Kata Kunci: panglima negeri pulau weh teluk balohan, sejarah, pulau weh, sabang,

Tidak banyak literatur yang bisa diperoleh untuk menjelaskan asal-usul Kota Sabang. Legenda yang beredar di masyarakat Sabang, yang terletak di Pulau Weh, pulau itu dulunya bersatu dengan daratan Sumatera. Namun, akibat gempa bumi, ribuan bahkan belasan ribu tahun lampau, pulau ini terpisah dengan daratan. Begitu juga dengan pulau-pulau di sekitarnya, Seperti Pulau Rondo, Pulau Rubiah, Pulau Seulako dan Pulau Klah. Berbicara mengenai sejarah, nama Sabang berasal dari bahasa Arab, Shabag yang artinya gunung meletus. Mengapa gunung meletus? Mungkin dahulu kala masih banyak gunung berapi yang masih aktif di Sabang, hal ini masih bisa kita lihat gunung berapi di Jaboi dan gunung berapi di dalam laut Pria Laot. (BPCB:2017:7)

A. Tinjauan Geologis

Volkanisma di Pulau Weh, yang gejalanya dapat diamati di wilayah pesisir dan dasar laut, merupakan aktivitas kegiatan gunungapi dari sabuk vulkanik Indonesia yang berada di ujung barat Wilayah NKRI. Aktivitas kegunungapian pada sistem penunjaman Parit Sunda tersebut, ternyata berlanjut lagi di Kepulauan Andaman – sekitar 1000 km ke arah barat laut Sabang. Tinjauan data geologi dan geofisika menunjukkan bahwa Pulau Sabang dilalui oleh segmen aktif dari Sesar Sumatera. Segmen ini diberi nama Seulemium oleh Sieh dan Natawidjaja (2000), yang dibedakan dari segmen Banda Aceh yang sudah tidak aktif. Ke arah Laut Andaman, terjadi perubahan pola penunjaman antara kerak Samudera Hindia terhadap kerak Benua Eurasia; yaitu dari arah timur laut menjadi arah selatan – tenggara. Beberapa peneliti (contoh: Gasparon, 2005) berpendapat bahwa volkanisma di Aceh berhubungan dengan subduksi berarah selatan – tenggara ini. Perubahan pola penunjaman ini termanifestasi dalam bentuk ‘back arc spreading’ yang dapat diamati dalam rekaman seismik berupa lembah dalam (sekitar 1000 m dari dasar laut) dan sempit serta berbentuk huruf V. Di Perairan Pulau Weh, data seismik Puslitbang Geologi Kelautan menunjukkan bahwa sesar aktif ini sangat mempengaruhi aktivitas volkanisma dasar laut dan pantai, dengan berhasil dipetakannya titik-titik semburan fumarola dan solfatara pada 33 titik dasar laut; berdasarkan analisis data seismik tersebut. Titik-titik semburan terindikasi keluar dari sesar normal yang bersifat bukaan dan berarah utara-selatan, yang bidang sesarnya dapat diamati oleh Tim Diving. Sesar normal ini berada pada zona regangan/tensional serta berordo lebih rendah dari Sesar Sumatera yang berarah barat laut – tenggara yang berada dalam zona tegasan/kompresional. (Hananto Kurnio dkk:2014)

Wilayah Kota Sabang dikelilingi oleh Selat Malaka di Utara, Samudera Hindia di Selatan, Selat Malaka di Timur dan Samudera Hindia di Barat. Kota Sabang terdiri atas 5 (lima) buah pulau yaitu Pulau Weh (121 km²), Pulau Rubiah (0,357 km²), Pulau Seulako (0,055 km²), Pulau Klah (0,186 km²), dan Pulau Rondo (0,650 km²). Di Pulau Weh terdapat sebuah danau air tawar bernama Aneuk Laot. Keadaan topografi Kota Sabang pada umumnya bergelombang, berbukit-bukit sedang sampai curam dan di sepanjang pantai penuh dengan batu-batuan. Topografis wilayah secara umum terbagi menjadi 3% dataran rendah, 10% dataran bergelombang, 35% berbukit, dan 52% berbukit sampai bergunung Pulau Weh merupakan sebuah pulau vulkanik, sebuah pulau atol (pulau karang) yang proses terjadinya mengalami pengangkatan dari permukaan laut. Proses terjadinya dalam tiga tahapan, terbukti dari adanya tiga teras yang terletak pada ketinggian yang berbeda. Umumnya Pulau Weh terdiri atas dua jenis batuan, yaitu tuf marina dan batuan inti. Tuf marina dijumpai hampir sepanjang pantai sampai pada ketinggian 40 sampai 50 meter. Lapisan tuf yang terlebar didapat di sekitar kota Sabang, di bagian pantai berlapis sempit. Batuan sempit adalah batuan vulkanik yang bersifat *andesitik*. (Nanobaru:2007)



Gambar 1.
Peta Kota Sabang
Sumber : <https://lh3.googleusercontent.com/->

Pulau Weh berasal dari kata dalam bahasa Aceh, “Weh” yang artinya pindah, menurut sejarah yang beredar Pulau Weh pada mulanya merupakan satu kesatuan dengan Pulau Sumatra, karena sesuatu hal akhirnya Pulau Weh, me-weh-kan diri ke posisinya yang sekarang. Makanya pulau ini diberi nama Pulau Weh. Berdasarkan sejarah penuturan dari warga di Gampong Pie Ulee Lheueh, Pulau Weh sebelumnya bersambung dengan Ulee Lheue. Ulee Lheue di Banda Aceh sebenarnya adalah Ulee Lheueh (yang terlepas). Beredar kabar juga gunung berapi yang meletus dan menyebabkan kawasan ini terpisah. Seperti halnya Pulau Jawa dan Sumatera dulu. Pulau Weh terkenal dengan pulau We tanpa H, ada yang beranggapan kalau pulau weh diberi nama pulau we karena bentuknya seperti huruf W. Sejarah Pulau Weh adalah sejak adanya pelabuhan di Kota Sabang. Sekitar tahun 1900, Sabang adalah sebuah desa nelayan dengan pelabuhan dan iklim yang baik. (BPCB:2017:8)

Sejarah asal mula yang membangun negeri pulau Weh teluk Balohan adalah seorang panglima perang dari kerajaan Aceh yang bernama **Teuku Po Miruk Abdul Wahid** Panglima Pulau Weh Teluk Balohan. Yang diangkat atau yang dilantik oleh Sultan Alaidin Mansyursyah yang memerintah kerajaan Aceh tahun 1841 Masehi. Teuku Po Mirak Abdul Wahid Panglima Pulau Weh ini, dilantik oleh Sultan Alaidin Mansyursyah untuk menjadi wakil Sultan Aceh untuk memerintah negeri dan mengambil hasil lada yang keluar dari pulau Weh dengan mendapat SK (Surat Keputusan terlampir) surat pengangkatan bercap sembilan Halilintar yang ditandatangani oleh Sultan Alaidin Mansyursyah karena mengingat akan jasa jasanya yang telah dapat menumpas dan memadamkan pemberontakan di negeri Trumon (T. Sulaiman:1997:12).

B. Tujuan

Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk mengangkat nama tokoh yang bernama Teuku Po Miruk Abdul Wahid yang telah berjuang melawan Belanda sekaligus yang membangun Pulau Weh/Sabang.

C. Permasalahan

Permasalahan yang akan dikaji dalam artikel ini adalah bagaimanakah perjuangan Teuku Po Miruk Abdul Wahid dalam membangun negeri Pulau Weh pada masa pemerintahan Sultan Alaidin Mansyursyah?

Metode

Metode penulisan yang digunakan adalah sebagai berikut: Pada tahap awal penulis melakukan pengumpulan sumber primer dan sekunder, lisan maupun tulisan. Sumber primer meliputi buku sejarah, buku laporan Teknis, tulisan dan wawancara dengan ahli waris. tulisan yang disusun Teuku Sulaiman sebagai ahli waris. Tulisan tersebut disusun pada tahun 1993 berjudul "Sejarah Teuku Muhammad Daod Panglima Muda Seutia Hulubalang Negeri Pulau Weh Balohan". Kemudian disusun tahun 1997 yang berjudul "Sejarah Asal Mulanya Tempat Pemakaman Keluarga dari (Pulau Weh) dan Sejarah yang membangun dan memerintah Negeri Pulau Weh pada Masa Pemerintahan Kerajaan Aceh Sampai Pada Masa Pemerintahan Belanda Hingga Sekarang Menjadi Sebuah Kotamadya Daerah Tingkat II Sabang". Tulisan tersebut diambil dari cerita nenek Cut Nyak Meusse istri kedua dari Teuku Muhammad Daud Panglima Muda Seutia, Hulubalang Pulau Weh pada tahun 1998 kemudian cerita ayahnya teuku Djohan dan lain lain.

A. Sejarah Asal Usul Teuku Po Miruk Abdul Wahid

Teuku Po Miruk Abdul Wahid merupakan keturunan dari Teuku Bentara Giging Lambada yang berkuasa memerintah di Kuala Giging Lambada dan yang mengambil wasel (Bea) dari barang barang yang dibawa masuk oleh kapal kapal dari luar daerah dan luar negeri yang masuk ke Aceh dan sebaliknya mengambil wasel (Bea) dari barang barang yang akan dikirimkan keluar daerah dan keluar negeri. Karena pada waktu itu pelabuhan besar kerajaan Aceh di Kuala Giging Lambada. (T. Sulaiman:1993:12) Teuku Po Miruk Abdul Wahid yang pada mulanya menjadi panglima di Kuala Giging Lambada beserta pasukannya kira kira tahun 1840 Masehi. Teuku Po Miruk Abdul Wahid pernah ditawan oleh Sultan Alaidin Mansyursyah, karena ia bersalah menembak kapal raja dengan meriam dari banteng Kuala Giging. Raja baru pulang patrol dari Aceh Timur dan Pulau Kampai, karena kapal tersebut tidak mengibarkan bendera kerajaan Aceh sewaktu hendak masuk pelabuhan Kuala Giging Lambada. Atas kesalahannya itu ia ditawan di Kuta Dalam, tidak boleh keluar dari Kuta Dalam. Pekerjaan sewaktu dalam tawanan pada malam hari menutup pintu gerbang istana dan pada pagi hari membukanya. Sultan Alaidin Mansyursyah melihat Teuku Po Miruk Abdul Wahid gagah perkasa, tampan, berani, cerdik dan memeriksa asal usul keturunannya. (T. Sulaiman:1993:12) Teuku Po Miruk Abdul Wahid merupakan keturunan dari Teuku Bentara Giging Lambada, Teuku Bentara Giging merupakan keturunan dari Tengku Tujuh, Tengku Tujuh adalah anak dari sultan Saidil Mukamil dari istri diluar istana. Sultan Saidil Mukamil memerintah pada tahun 1588 s/d 1604 masehi. (Ibid.hal 13)

Sebelum Teuku Po Miruk Abdul Wahid diangkat menjadi panglima pulau Weh, beliau sudah diangkat menjadi kepala pengawal pasukan istana kerajaan Aceh di Kuta Dalam (keraton). Sultan Alaidin Mansyursyah dengan kemenakannya atau anak abang Sultan Alaidin Muhammad Daudsyah I atau kakak kandung dari sultan Alaidin Sulaiman Ali Iskandarsyah. Sultan Alaidin Sulaiman Iskandarsyah yang memerintah kerajaan Aceh sebelum Sultan Alaidin Mansyursyah menjadi sultan. Kemenakan sultan Alaidin Mansyursyah yang dinikahkan dengan Teuku Po Miruk Abdul Wahid bernama Tengku Meurah Ganti. Dari hasil pernikahan ini maka lahirlah keturunan keturunan hingga sampai anak cucu sampai sekarang ini enam generasi (generasi ke-6). (T.Sulaiman:1997:13)

Sewaktu Teuku Po Miruk Abdul Wahid memimpin pasukan kerajaan Aceh untuk menyerang negeri Trumon, yang diduduki oleh VOC (Belanda) atas perintah Sultan Aceh dan oleh Sultan Aceh telah terlebih dahulu memilih 7 (tujuh) orang panglima sultan yang handalan dan pasukan pasukan tentara kerajaan Aceh yang pilihan, dipimpin oleh Teuku Po Miruk Abdul Wahid.

Setelah diadakan upacara pelepasan oleh Sultan di Kuta Dalam lalu berangkatlah pasukan pasukan kerajaan Aceh ini dengan tujuh panglima handalan serta pasukan pasukan kerajaan Aceh yang pilihan, yang dipimpin oleh Teuku Po Miruk Abdul Wahid. Pasukan pasukan tentara kerajaan ini sampai di Negeri Trumon lalu menyerang tentara VOC (Belanda) yang telah menduduki negeri Trumon. Dalam pertempuran tersebut dengan sangat dahsyat dan hebatnya pasukan tentara VOC (Belanda) mempertahankan Negeri Trumon dengan mati matian melawan pasukan tentara kerajaan Aceh yang menyerangnya. (*Ibid.*)

Pada akhirnya negeri Trumon kalah dan menyerah kepada tentara kerajaan Aceh dan tentara VOC (Belanda) mundur dan lari meninggalkan negeri Trumon dan kembali ke Padang. Setelah negeri Trumon kalah dan tentara VOC (Belanda) telah dapat diusir (dihalau) dari negeri Trumon, Teuku Po Miruk Abdul Wahid mengambil upeti (pajak) dari hasil yang telah dikutip Teuku Panglima Trumon. Setelah mengambil upeti dari negeri Trumon lalu pasukan pasukan tentara kerajaan Aceh beserta tujuh orang panglimanya yang dipimpin oleh Teuku Po Miruk Abdul Wahid pulang ke Aceh (tiba di Kuta Dalam) dan membawa upeti yang telah diambil. Sultan Aceh mengadakan upacara penyambutan. Kemudian mengangkat Teuku Po Miruk Abdul Wahid menjadi panglima pulau Weh teluk Balohan untuk memerintah dan mengambil hasil lada dari negeri pulau Weh. (*Ibid.*)

Mengingat akan jasa jasa Teuku Po Miruk Abdul Wahid yang telah dapat menumpas dan memadamkan pemberontakan di negeri Trumon, Sultan Alaidin Mansyursyah mengangkat dan melantik Teuku Panglima Pulau Weh Teluk Balohan untuk memerintah dan mengambil hasil lada dari pulau Weh. Sultan Aceh juga memberikan SK surat pengangkatan bercap sembilan halilintar. Pada waktu itu, panglima Trumon yang mewakili sultan Aceh memerintah di negeri Trumon telah bekerja sama dengan VOC (Belanda), dan telah menduduki Trumon setelah Sumatera Barat (Padang) dibawah pemerintahan kerajaan Aceh telah diambil oleh VOC (Belanda) (*Ibid.hal.14*)

Setelah Teuku Po Miruk Abdul Wahid menjadi panglima Pulau Weh Teluk Balohan untuk negeri Pulau Weh sebagai wakil sultan Aceh diketahui oleh pasukan pasukan tentara VOC (Belanda) di Padang yang kalah dalam peperangan di Trumon sewaktu pasukan pasukan kerajaan Aceh menyerang negri Trumon yang dipimpin oleh Teuku Po Miruk ini, lalu pasukan tentara VOC (Belanda) yang kalah berperang tadi datang menyerang pulau Weh teluk Balohan tahun 1861 Masehi, untuk membalas dendamnya atas kekalahannya sewaktu berperang di Negri Trumon 1859 Masehi. Setelah mendarat pasukan pasukan VOC (Belanda) di pantai Teluk Balohan kemudian terjadilah peperangan dengan pasukan-pasukan tentara dari Teuku Po Miruk Abdul Wahid. Dalam peperangan yang sangat hebat dahsyatnya tersebut Teuku Po Miruk Abdul Wahid Panglima Pulau Weh Teluk Balohan bertempur dengan mati matian untuk mempertahankan Negri Pulau Weh Balohan jangan sampai direbut oleh pasukan pasukan tentara VOC (Belanda). Dalam pertempuran yang hebat dan dahsyat tersebut, pasukan pasukan tentara VOC (Belanda) kalah dan lari meninggalkan Negeri Pulau Weh menuju ke Pulau Beras.

Dalam pertempuran tersebut banyak pasukan pasukan dari panglima pulau Weh yang tewas, diantaranya seorang panglima dari keluarga Teuku Panglima Pulau Weh. Kemudian pasukan pasukan tentara dari Teuku Po Miruk Abdul Wahid menyusul pasukan pasukan VOC (Belanda) yang telah menduduki pulau Beras. Setelah sampai dipulau Beras Teuku Po Miruk Abdul Wahid memimpin pasukannya untuk menyerang pasukan tentara VOC (Belanda). Dalam pertempuran tersebut pasukan tentara VOC (Belanda) kalah dan lari meninggalkan Pulau Beras kembali ke Padang. Teuku Po Miruk Abdul Wahid dan pasukan pasukan tentaranya meninggalkan pulau beras kembali ke Balohan. (Ibid. hal.15)

Setelah Teuku Po Miruk Abdul Wahid memegang pemerintahan di Balohan Pulau Weh, lalu diadakan kegiatan menanam lada. Sultan Alaidin Mansursyah menyuruh orang orang membuka perkebunan lada di Pulau Weh dan Sultan juga memberikan modalnya. Untuk itu Teuku Po Miruk Abdul Wahid Panglima Pulau Weh mendatangkan orang orang dari daratan Aceh, terutama dari kaum keluarganya dan orang orang dari daerah 26 mukim Aceh yaitu Lambada Giging, Miruk Kling, Lam Cabeung, Lamnga, Cadek, Tungkop Sim, dan daerah lain. Setelah sabang menjadi penghasil lada, dan hasilnya dibawa keluar, maka orang orang pun ramai penduduknya. Orang orang berdatangan dari Aceh Besar, Pidie, Passai dan daerah lain untuk menanam lada di Pulau Weh/Sabang. Pada awalnya dari seunebok-seunebok kemudian menjadi perkampungan serta menjadi sebuah negeri (Bandar) yang makmur. (T.Sulaiman:1993:14).

Teuku Po Miruk Abdul Wahid Panglima Pulau Weh mengangkat penatua penatua seunebok lada dan memberi modal (pangkai). Teuku Po Miruk Abdul Wahid Panglima Pulau Weh membentuk pemerintahan dengan mengangkat panglima panglima beserta pasukan pasukan tentaranya. Mereka membuat benteng pertahanan dan meletakkan meriam pada benteng tersebut. Senapan senapan juga diberikan kepada pasukan untuk menjaga keamanan dan pertahanan negeri pulau Weh Teluk Balohan dari serangan musuh. Disamping itu didatangkan juga ulama ulama dari daratan Aceh untuk mengajar ilmu agama dan pengajian bagi rakyat di dalam negeri Pulau Weh. Setelah seneubok seneubok lada berbuah dan mengeluarkan hasilnya, kemudian bertambah ramai orang orang yang datang dari daratan Aceh. Dari daerah Pidie, Pasai, Aceh Barat, dan Aceh Selatan yang ingin ikut serta menanam lada di Pulau Weh. Orang orang yang hendak menanam lada terlebih dahulu menghadap Teuku Po Miruk Abdul Wahid Panglima Pulau Weh dan diberikan modal untuk menanam lada tersebut.

Orang yang baru datang dari daratan Aceh tersebut diserahkan kepada *peutua seneubok* dari daerah kampung asalnya. Apabila orang yang baru datang tersebut dari Aceh Besar maka diserahkan kepada *peutua seunebok* yang dipimpin oleh Aceh Besar. Demikian juga yang berasal dari Pidie, Pasai, Aceh Barat, dan Aceh Selatan, supaya adat istiadatnya serupa, dengan kampung tempat asal orang yang baru datang dari daratan Aceh itu, dan bertanggung jawab atas pemberian modal (*pangkai*) tersebut kepada *peutua Seunebok* Lada tersebut.

Kemudian Teuku Po Miruk Abdul Wahid Panglima Pulau Weh membangun mesjid dan *meunasah* ditiap tiap *seunebok lada*. Orang-orang yang telah datang dari daratan Aceh ke pulau weh membuka perkebunan perkebunan lada. Dari Aceh Besar, Pidie, Pasai, Aceh Barat, dan Aceh Selatan yang majemuk orang-orangnya lalu membaur menjadi satu dengan perantara perkawinan perkawinan dan kemudian menjadi penduduk Pulau Weh ini. Dari keturunan ini yang disebut juga orang Aceh Pulau Weh dan juga adat istiadatnya menjadi satu di pulau Weh ini, yaitu adatnya yang dipakai adat Aceh Besar karena Panglima pulau Weh ini serta rakyatnya yang pertama membangun negeri dan *seunebok seunebok* perkebunan lada ini berasal dari Aceh Besar dan Hulubalangnnya Teuku Po Miruk Abdul Wahid Panglima Pulau Weh langsung tunduk dibawah Sultan Aceh. Teuku Panglima Pulau Weh ini Hulubalang Sultan Aceh di daratan Aceh. Ada beberapa Hulubalang Sultan Aceh yaitu : 1. Hulubalang Meuraksa, 2. Hulubalang Pagar Air, 3. Hulubalang Lueng Bata, 4. Hulubalang Pulau Weh Balohan. (T.Sulaiman:1997:12)

Teuku Po Miruk Abdul Wahid membangun negeri Pulau Weh Dalam bidang agama: adalah membangun masjid, *meunasah*-*Meunasah* tiap tiap perkampungan (*seunebok*) dan Balai Pengajian, Ulama didatangkan dari daratan Aceh untuk mengajar agama dan pengajian. Di Bidang pemerintahan : pada waktu itu telah teratur, pertahanan negeripun telah teratur, dengan mengangkat panglima panglima untuk menjaga keamanan negeri beserta pasukannya dan dibuat banteng pertahanan. Mengenai adat istiadat di Pulau Weh: pada waktu itu disamakan dengan adat Aceh Besar karena umumnya penduduknya berasal dari daerah 26 Mukim Aceh Besar yaitu Lam Cabeung Lamnga, Kling, Miruk, Cadek, Tungkop, Sim, Baet dekat Krung Cut dan Lampu'uk Darussalam. Mengenai perhubungan lalu lintas: perhubungan lalu lintas barang dan orang yaitu dari Balohan dengan sampan Besar memakai layar ke Kuala Giging Lambada, karena pada waktu itu pelabuhan besar kerajaan Aceh di Kuala Giging Lambada, dan ada juga ke Kuala Aceh yang berlabuh di Kampung Jawa. Mengenai kebudayaan dan kesenian: di Balohan Pulau Weh pada waktu itu sering diadakan keramaian kesenian, seperti Rapa I, Dabus, Seudati, Serunai Kale, serta membaca Hikayat-hikayat dan Nasib. Diadakan juga pertandingan membaca Al Qur'an antara kampung kampung dengan *seunebok-seunebok* dalam Negeri Balohan Pulau Weh. (T.Sulaiman:1993:14)

Teuku Po Miruk Abdul Wahid menikah dengan Tengku Meurah Ganti. Tengku Meurah Ganti merupakan anak abang Sultan Alaidin Mansyur Syah yang bernama Sultan Alaidin Muhammad Daud Syah I. Sultan Alaidin Mansyur Syah menikahkan kemenakannya dengan Teuku Po Miruk Abdul Wahid dan sultan juga mengangkatnya sebagai Kepala Pasukan Pengawal Istana (Keraton) sebelum diangkat menjadi panglima di Pulau Weh. Teuku Po Miruk Abdul Wahid mempunyai empat (4) orang yang terdiri dari tiga orang laki-laki dan satu orang puteri. Yaitu: anak pertama bernama **Teuku Nyak Hamzah**, anak kedua bernama **Teuku Muhammad Daud**, anak nomor tiga yaitu putri yang bernama CutNyak Barein, dan anak nomor empat bernama **Teuku Muhammad Amin**.(T. Sulaiman :1993:13)

B. Berahirnya Masa Kepemimpinan Teuku Po Miruk Abdul Wahid dan Sultan Alaidin Mansyursyah

Teuku Po Miruk Abdul Wahid dipanggil oleh Sultan Aceh (Sultan Alaidin Mansyursyah) untuk menghadap sultan. Setelah sampai di istana Kuta Dalam menemui sultan Aceh dan sultan menceritakan keadaan situasi kerajaan Aceh yang mana pasukan tentara VOC (Belanda) hendak menyerang kerajaan Aceh kembali karena kapal kapal luar negeri yang membawa barang barang dagangan ke aceh dan sebaliknya kapal kapal yang mengangkut barang barang dagangan dari aceh ke luar negeri sering diganggu dan dicegat di tengah lautan dan dirampok isi muatan kapal tersebut. Sumatera Barat (Padang) dan Sumatera Timur (Medan) telah diambil oleh VOC (Belanda). Sultan menanyakan Teuku Po Miruk Abdul Wahid bagaimana pertahanan pulau Weh, karena keadaan situasi sudah sangat gawat. Setelah selesai pembicaraan sultan aceh dengan Teuku Po Miruk Abdul Wahid, kemudian meninggalkan istana Kuta Dalam (Keraton) hendak pulang ke Balohan Pulau Weh. Sebelum pulang ke Balohan Teuku Po Miruk Abdul Wahid pergi ke Lambada Giging dan disana terkena penyakit kolera (untuk sekarang disebut muntah mencret) dan mangkat di Kuala Giging Lambada kemudian dimakamkan di **Kampung Miruk Lambada Giging** dan makamnya sampai sekarang masih berada di Miruk Lambada Giging. Pada waktu itu Aceh sedang berjangkit/mewabah penyakit kolera tersebut. Berselang tidak begitu lama Sultan Alaidin Mansyur Syah pun terkena serangan penyakit kolera dan mangkat. Sebagai ganti sultan diangkatlah Sultan Alaidin Mahmudsyah anak dari sultan Alaidin Sulaiman Ali Iskandarsyah. (T.Sulaiman:1993:15)

Setelah Alaidin Sulaiman Ali Iskandarsyah menjadi sultan, lalu diangkatlah anak sulung Teuku Po Miruk Abdul Wahid Panglima Pulau Weh untuk menjadi hulubalang. Untuk memerintah dan mengambil hasil laut, dan darat di dalam negeri Pulau Weh sebagai wakil sultan Aceh, dengan mendapat SK (surat keputusan) surat pengangkatan bercap Sembilan Halilintar dari sultan Aceh pada Tahun 1870 Masehi, dengan menyerahkan pedang pelantikan milik dari Teuku Po Miruk Abdul Wahid Panglima Pulau Weh, turun kepada Teuku Nyak Hamzah. Setelah Teuku Nyak Hamzah memerintah pulau Weh tidak berapa lama, lalu Teuku Nyak Hamzah beserta adiknya Teuku Muhammad Daud berangkat ke daratan Aceh untuk menghadap sultan aceh di istana Kuta Dalam. Teuku Nyak Hamzah menceritakan maksud kedatangannya untuk menyerahkan pemerintahan kepada adiknya Teuku Muhammad Daud sebagai penggantinya untuk memerintah negeri. Teuku Nyak Hamzah orangnya sangat alim, tidak suka berperang, bunuh membunuh musuh dan benci melihat orang orang VOC (Belanda) karena dianggap kafir.

Sultan menyetujui permintaan penggantian dan diadakan serah terima jabatan dihadapan sultan Alaidin Mahmudsyah dengan menyerahkan surat keputusan surat pengangkatan bercap sembilan halilintar dari Teuku Nyak Hamzah kepada Teuku Muhammad Daud serta menyerahkan pedang pelantikan yang berkepala gagang pedang terbuat dari emas.

Pedang tersebut merupakan pedang milik Teuku Po Miruk Abdul Wahid Panglima Pulau Weh. Setelah Teuku Muhammad Daud menjadi hulubalang Pulau Weh sebagai wakil Sultan Alaidin Mahmudsyah, membuka perkebunan perkebunan lada (seunebok-seunebok lada) hampir seluruh Pulau Weh dan orang dari daratan Aceh terus berdatangan untuk menanam lada. Daerah yang dibuka antara lain, Cot Bak Geutoom, Gunong – Anoi raya, Data Pane, Data Cot Abeuk, Lampoh Taloo, Cot Tanoh Mirah, Lhok Bong, Cot Parang Siekureung Jaboi, Gle Cut Jaboi, Beurawang, Keunekai, Paya, Alue Perimpi ng, Alue Jaba, Cot Lemik Mentah, Lhok Pria Laot, Aneuk Laot, Krueng Raya, Teupin Panah, Teupin Pu'uk, Lhok Lam Kroong, le Muele, Kebun Merica dan lain lain tempat di Pulau Weh. Tong Takaran lada dan timbangan pikul lada telah disumbangkan untuk Taman Mini Indonesia Indah Jakarta atas permintaan bapak gubernur Aceh melalui melalui walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Sabang, karena Aceh jaman dahulu megah penghasil lada terbesar di dunia, tong takaran lada dan timbangan pikul lada di daratan aceh sudah tidak ada lagi karena telah terbakar sewaktu perang aceh. Kedua benda peninggalan sejarah ini diletakkan di rumah adat Aceh di Taman Mini Indonesia Indah Jakarta sebagai koleksi. Sesudah Belanda menduduki Pulau Weh di Paya sudah ada Hulubalangnya yaitu Teuku Panglima Paduka Serinara Nyak Harun Hoofd Van Het Distrik Paya Poeloe We, beliau tidak membuka perkebunan lada di daerah distriknya karena tidak memiliki modal untuk membuka perkebunan lada. (T.Sulaiman:1997)



Gambar 2.

Makam Teuku Muhammad Daud Putra dari Teuku Po Miruk Abdul Wahid

Dok. BPCB Aceh tahun 2016

A. Kesimpulan

Demikianlah sejarah Teuku Po Miruk Abdul Wahid Panglima Pulau Weh dalam membangun negeri Pulau Weh pada masanya. Pulau weh yang dikenal pada masa sekarang adalah Kota Sabang. Atas kerja keras para pahlawan Sabang hingga pulau ini menjadi kotamadya. Teuku Po Miruk Abdul Wahid ikut berjuang dan perang melawan Belanda serta membangun pulau Weh ini. Menjadi sorotan penulis akan keberadaan makam Panglima Pulau Weh di Kampung Miruk Lambada Giging. Apakah masih ada atau sudah terkena dampak Tsunami. Karena wilayah tersebut di dekat pantai. Begitu juga dengan sejarah makam tersebut selama ini tidak pernah ada cerita dan makam tersebut tidak ada juru peliharanya.

Setelah diuraikan Teuku Po Miruk Abdul Wahid seorang tokoh pejuang dan membangun dalam segala bidang. Bidang agama: Teuku Po Miruk Abdul Wahid membangun Masjid, Meunasah-Meunasah tiap tiap perkampungan (seunebok) dan Balai Pengajian, Ulama didatangkan dari daratan Aceh untuk mengajar agama dan pengajian. Di Bidang pemerintahan: pada waktu itu telah teratur, pertahanan negeripun telah teratur, dengan mengangkat panglima – panglima untuk menjaga keamanan negeri beserta pasukannya dan membuat benteng pertahanan. Dalam bidang adat istiadat di Pulau Weh: pada waktu itu disamakan dengan adat Aceh Besar karena umumnya penduduknya berasal dari daerah 26 Mukim Aceh Besar yaitu Lam Cabeung Lamnga, Kling, Miruk, Cadek, Tungkop, Sim, Baet dekat Krung Cut dan Lampu'uk Darussalam. Dalam bidang perhubungan lalu lintas: perhubungan lalu lintas barang dan orang yaitu dari Balohan dengan sampan Besar memakai layar ke Kuala Giging Lambada, karena pada waktu itu pelabuhan besar kerajaan Aceh di Kuala Giging Lambada, dan ada juga ke Kuala Aceh yang berlabuh di Kampung Jawa. Dalam bidang kebudayaan dan kesenian: di Balohan Pulau Weh pada waktu itu sering diadakan keramaian kesenian, seperti Rapa I, Dabus, Seudati, Serunai Kale, serta membaca Hikayat-hikayat dan Nasib. Diadakan juga pertandingan membaca Al Qur'an antara kampung kampung dengan seunebok-seunebok dalam Negeri Balohan Pulau Weh.

B. Saran

1. Nama tokoh pejuang dan yang membangun negeri pulau Weh yang dikenal sekarang Kota Sabang yaitu yaitu Teuku Po Miruk Abdul Wahid belum populer. Perlu penambahan pelajaran sejarah disekolah khususnya SD atau SMP dan juga kunjungan terhadap makam makam bersejarah yang ada di Kota Sabang.
2. Kepada Pemko Sabang disarankan untuk membuat tugu atau latar sejarah yaitu Teuku Po Miruk Abdul Wahid untuk mengenang sejarah perjuangan Po Miruk Abdul Wahid dalam melawan Belanda dan membangun negeri Pulau Weh. (Pemkot Kota Sabang Melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata)
3. Mencari jejak makam Panglima Pulau Weh di Kampung Miruk Lambada. (Arah Kroeng Raya, Aceh Besar)
4. Saran dari ahli waris: untuk pelabuhan terminal Balohan diberi nama Pelabuhan Teuku Po Miruk Abdul Wahid. Untuk nama nama jalan diberi nama nama pahlawan yang telah membangun negeri pulau Weh ini. Seperti nama jalan Teuku Muhammad Daud, jalan Teuku Nyak Hamzah, jalan Cut Nyak Meusse dan lain lain'.

- Teuku Sulaiman, 1993 "Sejarah Teuku Muhammad Daod Panglima Muda Seutia Hulubalang Negeri Pulau Weh Balohan".
- , 1997 "Sejarah Asal Mulanya Tempat Pemakaman Keluarga dari (Pulau Weh) dan Sejarah yang membangun dan memerintah Negeri Pulau Weh pada Masa Pemerintahan Kerajaan Aceh Sampai Pada Masa Pemerintahan Belanda Hingga Sekarang Menjadi Sebuah Kotamadya Daerah Tingkat II Sabang"
- BPCB, 2016 "Pemetaan Cagar Budaya di Kota Sabang Tahap I"
- BPCB, 2017 "Pemetaan Cagar Budaya di Kota Sabang Tahap II"
- <https://lh3.googleusercontent.com/->
- Hananto Kurnio1), Adjat Sudradjat2), Ildrem Syafri2) & Mega Fatimah Rosiana2
- Seminar Nasional Fakultas Teknik Geologi, Bandung 24 Mei 2014 Geologi Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Diunduh pukul 15,00 wib hari Rabu, tanggal 20 Feberuari 2019
- Puslitbang Geologi Kelautan1) FTG UNPAD2)Volkanisma Dasar Laut Sabang-Pulau Weh Aceh, Terminasi Aktivitas Akibat Perubahan Pola Subduksi Kerak Samudra Hindia Terhadap Kerak Benua Eurasia? Diunduh pukul 15,10 wib hari Rabu, tanggal 20 Feberuari 2019
- Nanobaru, "Sabang-Geografis, Kondisi Fisik, Topografi, Geologi dan Iklim" Diunduh pukul 15,20 wib hari Rabu, tanggal 20 Feberuari 2019



Akhmad Supandi

Peran Masyarakat Dalam Melestarikan Bangunan Cagar Budaya di Kawasan Kesawan Medan 1992-2015

Lahir di Medan pada 23 Juli 1994. Menyelesaikan pendidikan Sarjana tahun 2019 pada Program Studi Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Sumatera Utara. Pengalaman organisasi diantaranya: Anggota HIMIS (Himpunan Mahasiswa Ilmu Sejarah) 2013-2019. Anggota GEMAPRODEM (Gerakan Pro Demokrasi Rakyat) 2013-2019. Anggota IKAHIMSI Wilayah VIII Regional SUMUT-Aceh 2016-2018. Pengurus Karang Taruna Kelurahan Sitirejo I Kecamatan Medan Kota 2018-sekarang. Minat Kesenian pada sejarah perkotaan dan Cagar Budaya.

e-mail: akhmadsupandi70@gmail.com



Ambo Asse Ajis

Gambaran Umum temuan Arkeologis era Kerajaan Aceh Darussalam di Gampong Rima Jeuneu, Kecamatan Peukan Bada, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh

Lahir Tahun 1977, di Kota Palopo, Sulawesi Selatan, lulusan dari Jurusan Arkeologi Fakultas Sastra Universitas Hasanuddin pada Tahun 2002. Kini, penulis tinggal di Aceh, bekerja sebagai staf di Unit Pengembangan Balai Pelestarian Cagar Budaya Aceh dan juga mengabdikan di LSM FOMAPAK Aceh. Sebelumnya penulis pernah terlibat di berbagai LSM di Aceh seperti, GeRAK Aceh, Lakaspia Institute, dan sempat mengabdikan di Kota Langsa sebagai Kurator Museum Kota Langsa Tahun 2014-2015.



Arisnawati

50 kiri 21 kanan Pemanfaatan dan Analisis Nilai Penting Terhadap Masjid Teungku Di Anjong Peulanggahan, Kota Banda Aceh

Lahir di Rima Keuneurum, kecamatan Peukan Bada, Kab. Aceh Besar pada 10 Oktober 1996. Menyelesaikan pendidikan sarjana jurusan Sejarah dan Kebudayaan Islam Fakultas Adab dan humaniora di Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh pada tahun 2019. Saat menjadi mahasiswa, penulis aktif di berbagai organisasi kampus seperti HMP. Berminat dalam bidang sejarah, kesenian dan kebudayaan.

e-mail: arisnawati750@gmail.com.



Dede Semiawan

LHOKNGA 1945-1949: MODAL PERJUANGAN DARI UJUNG BARAT SUMATERA

Lahir di Jakarta, 13 Februari 1990. Mendapatkan gelar sarjana setelah menamatkan pendidikan di jurusan Arkeologi di Universitas Indonesia pada tahun 2013. Pada tahun yang sama sudah aktif sebagai pegawai di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Pada tahun 2013-2015 memulai karir dibawah naungan Direktorat Internalisasi Nilai dan Diplomasi Budaya. Kemudian dilanjutkan dibawah naungan Direktorat Warisan dan Diplomasi Budaya sampai awal tahun 2019. Menjadi anggota Keluarga Mahasiswa Arkeologi (KAMA) mulai tahun 2008 sampai dengan sekarang. Saat ini aktif sebagai Pengkaji Pelestari Cagar Budaya di Balai Pelestarian Cagar Budaya Aceh wilayah kerja Aceh dan Sumatera Utara.



Defri Elias Simatupang

**PELINDUNGAN SITUS BENTENG PUTRI HIJAU
MELALUI PENGEMBANGAN STRATEGI KOMUNIKASI
LINGKUNGAN**

Lahir di Pematangsiantar, 13 Mei 1983, merupakan salah satu staf peneliti di Balai Arkeologi Sumatera Utara, bidang kepakaran Manajemen Arkeologi, sub kepakaran Arkeologi Publik. Mendapatkan gelar Sarjana Arkeologi dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta pada tahun 2005, gelar Pasca Sarjana Magister Ilmu Komunikasi dari Universitas Darma Agung Medan pada tahun 2010, dan sejak tahun 2016 hingga saat ini sedang menyelesaikan studi Program Doktor Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan dari Universitas Sumatera Utara Medan. Dalam perjalanan kariernya sebagai peneliti, telah menghasilkan karya tulis ilmiah yang dapat dilihat di laman:

<https://scholar.google.co.id/citations?user=8MIAJjQAAA&hl=en>



Masnauli Butarbutar

**Sejarah Teuku Po Miruk Abdul Wahid Pada Masa
Pemerintahan Sultan Alaidin Mansyursyah di Pulau
Weh/Sabang**

Lulusan Arkeologi Univ. Gajah Mada, tinggal di Banda Aceh, bekerja di Kantor BPCB Aceh Unit kerja Pelindungan. Terlibat pada beberapa kegiatan Kajian Pelestarian Cagar Budaya di Prov. Aceh dan Sumut, Konservasi CB, Pemugaran CB dan aktif menulis artikel atau karya ilmiah.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN
BALAI PELESTARIAN CAGAR BUDAYA ACEH

Jl. Banda Aceh-Meulaboh Km. 7,5 Kec. Peukan Bada, Kab. Aceh Besar 23351

Telp. +62651-45306 / Fax. +62651-45171

e-mail. bp3.aceh@gmail.com / bp3_aceh@yahoo.com